

LAPORAN KEUANGAN

AUDITED
TA. 2024

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN
BUDI DAYA

GEDUNG MINA BAHARI 4 LANTAI 8
JL. MEDAN MERDEKA TIMUR NO 16

JAKARTA



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Jakarta, 28 Mei 2025

Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Dr Tb Haeru Rahayu, A.Pi., M.Sc
NIP. 197106191994031001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan Laporan	iv
I Laporan Realisasi Anggaran	1
II Neraca	2
III Laporan Operasional	3
IV Laporan Perubahan Ekuitas	5
V Catatan Atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	5
A.1 Profil dan Kebijakan Teknis	
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	
A.3 Basis Akuntansi	
A.4 Dasar Pengukuran	
A.5 Kebijakan Akuntansi	
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	10
B.1 Pendapatan	
B.1.2 Penerimaan Pajak	
B.1.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak	
B.2 Belanja	
B.2.1 Belanja Pegawai	
B.2.2 Belanja Barang	
B.2.3 Belanja Modal	
B.2.4 Belanja Bantuan Sosial	
B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran	
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	17
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	
C.2 Kas di Bendahara Penerimaan	
C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas	
C.4 Beban Dibayar Dimuka (prepaid)	
C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)	
C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima	
C.7 Piutang Bukan Pajak	
C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	
C.9 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
C.11 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.13 Persediaan	
C.14 Persediaan yang Belum Diregister	
C.15 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.16 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	
C.17 Piutang Jangka Panjang lainnya	
C.18 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	
C.19 Tanah	
C.20 Tanah Belum Diregister	
C.21 Peralatan dan Mesin	
C.22 Peralatan dan Mesin Belum Diregister	
C.23 Gedung dan Bangunan	
C.24 Gedung dan Bangunan Belum Diregister	
C.25 Jalan, Irigasi dan Jaringan	
C.26 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	
C.27 Aset Tetap Lainnya	

C.28	Aset Tetap yang Belum Diregister	
C.29	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
C.30	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	
C.31	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	
C.32	Aset Tak Berwujud	
C.33	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	
C.34	Aset Lain-lain	
C.35	Aset Lainnya yang Belum Diregister	
C.36	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	
C.37	Utang kepada Pihak Ketiga	
C.38	Utang Yang Belum Ditagihkan	
C.39	Hibah Yang Belum Disahkan	
C.40	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	
C.41	Pendapatan Diterima Dimuka	
C.42	Uang Muka dari KPPN	
C.43	Utang Jangka Pendek Lainnya	
C.44	Ekuitas	
C.45	Catatan Penting Lainnya neraca	
D.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	31
D.1	Pendapatan Negara Bukan Pajak	
D.2	Beban Pegawai	
D.3	Beban Persediaan	
D.4	Beban Barang dan Jasa	
D.5	Beban Pemeliharaan	
D.6	Beban Perjalanan Dinas	
D.7	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	
D.8	Beban Bantuan Sosial	
D.9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	
D.10	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
D.11	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	
D.12	Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	
D.13	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	
D.14	Pos Luar Biasa	
D.15	Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional	
E.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	37
E.1	Ekuitas Awal	
E.2	Surplus (Defisit) LO	
E.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	
E.4	Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	
E.5	Transaksi Antar Entitas	
E.6	Ekuitas Akhir	
F.	Pengungkapan Penting Lainnya Ekuitas	40
VI.	Lampiran dan Daftar	



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAMAN www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Jakarta, 28 Mei 2025

Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Dr Tb Haeru Rahayu, A.Pi., M.Sc

NIP. 197106191994031001

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya 31 Desember 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara periode 31 Desember 2024 merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp117.016.527.359,00.

Realisasi Belanja Negara Netto pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp992.008.206.671,00 atau mencapai 80,84 persen, nilai tersebut merupakan nilai setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp2.924.470.192,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp1.227.143.203.000,00

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024.

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp5.472.241.134.047,00 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp116.503.127.822,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp5.231.423.701.125,00; Properti Investasi (neto) sebesar Rp106.404.785.456,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp17.909.519.644,00

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp11.373.956.194,00 dan Rp5.460.867.177.853,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp112.443.781.807,00 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp1.046.250.651.618,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(933.806.869.811,00). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar defisit Rp46.488.360.159,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(887.318.509.652,00)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp5.406.458.171.217,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp(887.318.509.652,00) kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp2.828.124.143,00, lain-lain Rp332.577.506,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp5.460.867.177.853,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
ESELON I : DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA 04

Tgl Data : 21/05/25 8:14 PM
Tgl Cetak : 18/09/25 12:49 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_es1_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	1,227,143,203,000	992,008,206,671	(235,134,996,329)	80.84	1,100,237,305,000	1,087,136,906,277	(13,100,398,723)	98.81
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

BELUM FINAL

NERACA
TINGKAT ESELON I
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

Tgl Data : 22/05/25 6:25 PM
Tgl Cetak : 18/09/25 12:49 PM
Halaman : 1

lap_neraca_es1_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	9,684,074,100	30,000,001	9,654,074,099	32,180.25
Kas pada Badan Layanan Umum	68,221,487,743	13,966,932,778	54,254,554,965	388.45
Investasi Jangka Pendek- Badan Layanan Umum	5,000,000,000	0	5,000,000,000	0.00
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	0	332,816,000	(332,816,000)	(100.00)
Piutang Bukan Pajak	5,605,882,227	1,864,232,809	3,741,649,418	200.71
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(908,320,347)	(1,034,882,098)	126,561,751	(12.23)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	4,697,561,880	829,350,711	3,868,211,169	466.41
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	166,243,450	0	166,243,450	0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	(831,217)	0	(831,217)	0.00
PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL BLU (NETTO)	165,412,233	0	165,412,233	0.00
Persediaan	38,987,144,811	34,769,045,558	4,218,099,253	12.13
JUMLAH ASET LANCAR	126,755,680,767	49,928,145,048	76,827,535,719	153.88
ASET TETAP				
Tanah	3,756,767,517,642	3,756,515,384,141	252,133,501	0.01
Peralatan dan Mesin	922,411,425,057	925,923,688,626	(3,512,263,569)	(0.38)
Gedung dan Bangunan	1,313,698,875,867	1,347,325,198,064	(33,626,322,197)	(2.50)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	550,975,996,989	471,105,825,468	79,870,171,521	16.95
Aset Tetap Lainnya	4,649,857,349	4,677,754,349	(27,897,000)	(0.60)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	23,005,851,182	1,552,206,900	21,453,644,282	1,382.14
AKUMULASI PENYUSUTAN	(1,338,599,441,391)	(1,275,627,076,117)	(62,972,365,274)	4.94
JUMLAH ASET TETAP	5,232,910,082,695	5,231,472,981,431	1,437,101,264	0.03
Properti Investasi				
Properti Investasi	151,245,930,000	151,245,930,000	0	0.00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(44,841,144,544)	(38,632,207,644)	(6,208,936,900)	16.07
JUMLAH Properti Investasi	106,404,785,456	112,613,722,356	(6,208,936,900)	(5.51)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	4,657,350,748	4,562,770,748	94,580,000	2.07
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	198,690,000	0	198,690,000	0.00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	8,217,751,805	2,820,385,928	5,397,365,877	191.37
Aset Lain-lain	149,285,521,241	173,350,588,698	(24,065,067,457)	(13.88)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(144,449,794,150)	(160,149,958,814)	15,700,164,664	(9.80)
JUMLAH ASET LAINNYA	17,909,519,644	20,583,786,560	(2,674,266,916)	(12.99)
JUMLAH ASET	5,483,980,068,562	5,414,598,635,395	69,381,433,167	1.28
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	20,923,948,650	7,438,673,674	13,485,274,976	181.29

NERACA
TINGKAT ESELON I
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

Tgl Data : 22/05/25 6:25 PM

Tgl Cetak : 18/09/25 12:49 PM

Halaman : 2

lap_neraca_es1_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
Pendapatan Diterima Dimuka	134,081,644	701,790,504	(567,708,860)	(80.89)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	21,058,030,294	8,140,464,178	12,917,566,116	158.68
JUMLAH KEWAJIBAN	21,058,030,294	8,140,464,178	12,917,566,116	158.68
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	5,462,922,038,268	5,406,458,171,217	56,463,867,051	1.04
JUMLAH EKUITAS	5,462,922,038,268	5,406,458,171,217	56,463,867,051	1.04
JUMLAH EKUITAS	5,462,922,038,268	5,406,458,171,217	56,463,867,051	1.04
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	5,483,980,068,562	5,414,598,635,395	69,381,433,167	1.28

Keterangan :

BELUM FINAL

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Bantuan Pemerintah Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2024 yaitu :

Bantuan Pemerintah	
86.890.065 ekor	Benih tawar, payau dan laut
61.157 ekor	Calon induk
560 Unit	Bioflok
100 Unit	Excavator
55 Lokasi	Sosialisasi Kebijakan
55 Lokasi	Bimbingan Teknis PB
90 Unit	Kebun Bibit dan Sarpras Budi Daya Rumput Laut
26.300 kg	Bibit Rumput Laut
500 Unit	Bantuan Pupuk untuk Usaha Budi Daya
40 Unit	Mesin dan Bahan Baku Pakan
10 Unit	Sarpras Ikan Hias
500 Orang	Premi Asuransi Usaha Budi Daya
30 Unit	Sarpras Unit Pembenihan Rakyat (UPR)

Dalam rangka mensukseskan Kegiatan Prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya memiliki Pagu Anggaran sebesar Rp1.227.143.203.000,00 yang terbagi menjadi 3 alokasi kegiatan yaitu Kantor Pusat, Kantor Daerah dan Dekonsentrasi dengan rincian sebagai berikut:

a. Kantor Pusat

SATUAN KERJA	PAGU AWAL	REVISI PAGU	Naik/(Turun)
Sekretariat Direktorat Jenderal	608.736.156.000	584.352.167.000	(1,97%)
TOTAL	608.736.156.000	596.746.156.000	(1,97%)

b. Kantor Daerah

SATUAN KERJA	PAGU AWAL	REVISI PAGU	Naik/(Turun)
BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI	75.687.293.000,00	63.049.874.000,00	-16,70%
BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	73.526.426.000,00	114.836.615.000	56,18%
BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA	55.690.327.000,00	56.464.082.000,00	1,39%

BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO	61.876.745.000,00	66.004.415.000,00	6,67%
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE	25.249.464.000,00	24.655.310.000,00	-2,35%
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM	41.642.315.000,00	39.966.582.000,00	-4,02%
BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG	34.523.006.000,00	33.489.411.000,00	-2,99%
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN	33.443.327.000,00	32.815.398.000,00	-1,88%
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU	26.437.880.000,00	26.187.880.000,00	-0,95%
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR	36.414.995.000,00	37.011.480.000,00	1,64%
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON	34.444.991.000,00	32.927.549.000,00	-4,41%
BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN	18.447.530.000,00	19.007.080.000,00	3,03%
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK	28.597.854.000,00	27.957.854.000,00	-2,24%
BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG	12.898.677.000,00	13.329.389.000,00	3,34%
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT BATAM	34.193.421.000,00	33.728.117.000,00	-1,36%
TOTAL	593.074.251.000	621.431.036.000	4,78%

c. Dekonsentrasi

SATUAN KERJA	PAGU AWAL	REVISI PAGU	Naik/(Turun)
DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	222.751.000,	222.751.000,	0,00%
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat	1.522.967.000,	1.522.967.000,	0,00%
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	915.083.000,	915.083.000,	0,00%
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA	414.589.000,	414.589.000,	0,00%

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	1.514.084.000,	1.514.084.000,	0,00%
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH	780.352.000,	780.352.000,	0,00%
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	807.407.000,	807.407.000,	0,00%
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	488.442.000,	488.442.000,	0,00%
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	499.842.000,	499.842.000,	0,00%
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	441.620.000,	441.620.000,	0,00%
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA	767.676.000,	767.676.000,	0,00%
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	1.303.448.000,	1.303.448.000,	0,00%
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	451.500.000,	451.500.000,	0,00%
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN	401.589.000,	401.589.000,	0,00%
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN	538.216.000,	538.216.000,	0,00%
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN	607.717.000,	607.717.000,	0,00%
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI SULAWESI UTARA	286.920.000,	286.920.000,	0,00%
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	640.944.000,	640.944.000,	0,00%
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	848.595.000,	848.595.000,	0,00%
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI	1.199.226.000,	1.199.226.000,	0,00%
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI MALUKU	314.689.000,	314.689.000,	0,00%
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	397.788.000,	397.788.000,	0,00%
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA	1.372.523.000,	1.372.523.000,	0,00%
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NUSA TENGGARA	335.146.000,	335.146.000,	0,00%
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	442.003.000,	442.003.000,	0,00%
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	414.470.000,	414.470.000,	0,00%
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	279.935.000,	279.935.000,	0,00%

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	360.430.000,	360.430.000,	0,00%
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KEPULAUAN BANGKA	456.991.000,	456.991.000,	0,00%
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	523.755.000,	523.755.000,	0,00%
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	328.660.000,	328.660.000,	0,00%
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	361.214.000,	361.214.000,	0,00%
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. SULAWESI BARAT	612.725.000,	612.725.000,	0,00%
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN	506.703.000,	506.703.000,	0,00%
TOTAL	21.360.000.000,	21.360.000.000,	0,00%

Selama periode berjalan telah melakukan revisi DIPA dari DIPA awal. Hal ini di sebabkan oleh adanya kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain :

Uraian	2024	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	52.426.593.000	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	197.083.901.000	186.783.785.000
Belanja Barang	748.033.969.000	732.542.591.000
Belanja Modal	299.919.240.000	307.816.827.000
Jumlah Belanja	1.244.530.407.000	1.227.143.203.000

*Realisasi
Pendapatan
Rp117.016.527.359,00*

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp117.016.527.359,00 atau mencapai 223,20 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp52.426.593.000,00. Pendapatan terdiri dari Penerimaan bukan Pajak sebesar Rp52.426.593.000,00. Pendapatan ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

Kenaikan dikarenakan setoran penerimaan Kembali belanja modal TAYL berupa temuan BPK RI yaitu kelebihan pembayaran. Dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2024		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	52.426.593.000	117.016.527.359	223,20
Jumlah	52.426.593.000	117.016.527.359	223,20

Realisasi penerimaan bukan pajak mengalami kenaikan sebesar 223,20 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	117.016.527.359	43.255.851.249	170,52%
Jumlah	117.016.527.359	43.255.851.249	170,52%

Realisasi Penerimaan Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp117.016.527.359.00 dan Rp43.255.851.249.00 Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 170.52% persen dari TA 2023. Kenaikan signifikan karena dikarenakan setoran penerimaan Kembali belanja TAYL berupa temuan BPK-RI yaitu kelebihan pembayaran pada pengadaan satker dan pendapatan lain-lain BLU. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan rincian PNPB lainnya TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan	344.968.750	-	#DIV/0!
Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	1.017.159.500	2.248.537.100	-54,76%
Pendapatan Hasil kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	66.073.273.000	-	#DIV/0!
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	564.679.971	52.686.082	971,78%
Pendapatan Lain-lain BLU	23.702.944.699	11.202.209.102	111,59%
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	179.474.390	3.416.480	5153,20%
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	491.473.383	26.380.300	1763,03%
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya	420.000	55.910.240	-99,25%
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	13.412.266.129	18.171.730.277	-26,19%
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	38.477.800	41.986.800	-8,36%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	2.014.396.347	1.512.026.922	33,22%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	27.918.000	40.756.178	-31,50%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	743.111.147	974.806.786	-23,77%
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	707.176.924	926.360.024	-23,66%
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	3.706.286.800	5.187.657.000	-28,56%
Pendapatan Jasa Tenaga, pekerjaan dan Informasi	34.500.000	660.000	5127,27%
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	4.800.000	-	#DIV/0!

Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	1.249.447.622	1.130.883.535	10,48%
Pendapatan denda lainnya	0	6.871.389	-100,00%
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	392.446.010	47.713.697	722,50%
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	2.281.873.298	498.785.798	357,49%
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	29.102.029	3.719.124.544	-99,22%
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	1.451.560	3.618.000	-59,88%
Pendapatan Anggaran lain-lain	0	9.260.000	-100,00%
Jumlah	117.017.647.359	45.861.380.254	155,16%

Realisasi Pendapatan lingkup antara lain berasal dari :

1. Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian. Perkebunan. Peternakan dan pembudidaya berupa penjualan benih ikan dan indukan terdapat pada 14 satker UPT.
2. Pendapatan dari penjualan tanah, Gedung dan bangunan terdapat pada BPBL Batam.
3. Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin sebagai berikut :

NMSATKER	Penjelasan
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM	Lelang 1 (satu) unit Kijang Standart KF 80 Merk Toyota SK Penghapusan nomor 411/KEPMEN-KP/SJ/PL.75/224
BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM	Pendapatan penjualan BMN berupa Peralatan dan Mesin dengan SK Penghapusan 1. Nomor 526/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/2024 tanggal 3 Juni 2024 2. Nomor 583/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/2024 tanggal 21 Juni 2024 3. Nomor 585/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/2024 tanggal 21 Juni 2024
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO	Lelang : Backhoe Loader merk Sumitomo, Crawler Excavator + Attachment merk Komatsu, Station Wagon Merk Isuzu Panther, Station Wagon Merk Ford Ranger, Station Wagon Merk Toyota Innova, Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang) Merk Mitsubhisi, Mobil Unit Monitoring Frekwensi Merk Suzuki APV
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON	Lelang 1 (satu) Paket alsin dengan Noor Risalah lelang 73/17.01/2004-01 tgl 26 maret 2024
BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG	Pendapatan penjualan BMN berupa Peralatan dan Mesin dengan SK Penghapusan Nomor 440/Kepmen-KP/SJ/PL.750/2024 dan 438/Kepmen-KP/SJ/PL.750/2024 Tanggal 2 Mei 2024
SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	Pendapatan penjualan BMN berupa Peralatan dan Mesin

4. Pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya sebagai berikut :

NMSATKER	Penjelasan
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. SULAWESI BARAT	
BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG	berupa Lelang 1 unit mobil merk Toyota Kijang Grand Long dan 2 kendaraan roda tiga merk Viar dengan nomor Risalah Lelang Nomor 160/05.02/2024-01 tanggal 22 Februari 2024
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE	Berupa Lelang 1 unit gedung pos jaga permanen dengan risalah lelang : 78/01.01/2024-01 tanggal 27 Februari 2024

5. Pendapatan Sewa Tanah. Gedung dan Bangunan berupa sewa rumah dinas dan dipotong melalui gaji pns terdapat di 14 satker UPT kecuali LP2IL Serang.

6. Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai tusi berupa berupa sewa guest house dan sewa ruang pertemuan terdapat pada 15 satker UPT.

7. Pendapatan Pengujian. sertifikasi berupa pengujian sampel lab terdapat di 13 satker UPT. Pendapatan pengujian sample lab terbesar di BBPBAT Sukabumi. Adapun rincian sebagai berikut :

NMSATKER	RPHREAL
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM	(56.390.000,)
BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI	(1.207.275.000,)
BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG	(180.649.000,)
BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM	(215.723.800,)
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU	(130.000,)
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO	(1.700.000,)
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE	(66.410.000,)
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT BATAM	(63.435.000,)
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN	(63.555.000,)
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR	(610.467.000,)
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON	(21.993.000,)
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK	(123.073.000,)
BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG	(1.095.486.000,)
TOTAL	(3.706.286.800,)

8. Pendapatan jasa tenaga kerja, pekerjaan dan Informasi terdapat di BBPBAT Sukabumi yaitu berupa jasa bimbingan teknis pembudidayaan ikan.
9. Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya terdapat di 3 (tiga) satker BLU yaitu BLUPPB Karawang, BBPBAP Jepara dan BPBAP Situbondo berupa Pendapatan Penjualan Pakan Buatan. Kekurangan Setoran Pendapatan Penjualan Benih Udang Windu. Pendapatan Jasa Pengujian Laboratorium. Pendapatan Penjualan Benih Bandeng. Pendapatan Penjualan Benih Ikan Bandeng. Pendapatan Penjualan Benih Ikan Nila Salin. Pendapatan Penjualan Benih Udang Vaname. Pendapatan Penjualan Benih Udang Windu. Pendapatan Penjualan Calin Kepiting. Pendapatan Penjualan Induk Afkir Udang Putih. Pendapatan Penjualan Nauplius Udang Vaname. Pendapatan Penjualan Pakan Alami. Pendapatan Penjualan Pakan Buatan. Pendapatan penjualan Udang Putih Konsumsi. Pendapatan Penjualan Udang Vaname Konsumsi, dan pendapatan jasa analisa laboratorium.
10. Pendapatan jasa layanan perbankan BLU yaitu berupa Penerimaan BLU dari jasa Bunga Bank, Tarif Sesuai PP No. 85 Tahun 2021.
11. Pendapatan lain-lain BLU yaitu Penerimaan BLU dari Penjualan Komoditas Perikanan, Tarif Sesuai PP No. 85 Tahun 2021.
12. Pendapatan BLU lainnya dari sewa tanah berupa Penerimaan Denda dari Keterlambatan Sewa Tanah Oleh Koperasi Graha Mina, Surat no. B1895/BLUPPB/HP.520/IX/2023 ttg Instruksi Terkait Hasil Evaluasi Irjen KKP.
13. Pendapatan BLU lainnya dari sewa lainnya berupa Penerimaan BLU dari Sewa Asrama dan Aula, Tarif Sesuai PP No. 85 Tahun 2021.

*Realisasi Belanja
Rp992.008.206.671,00*

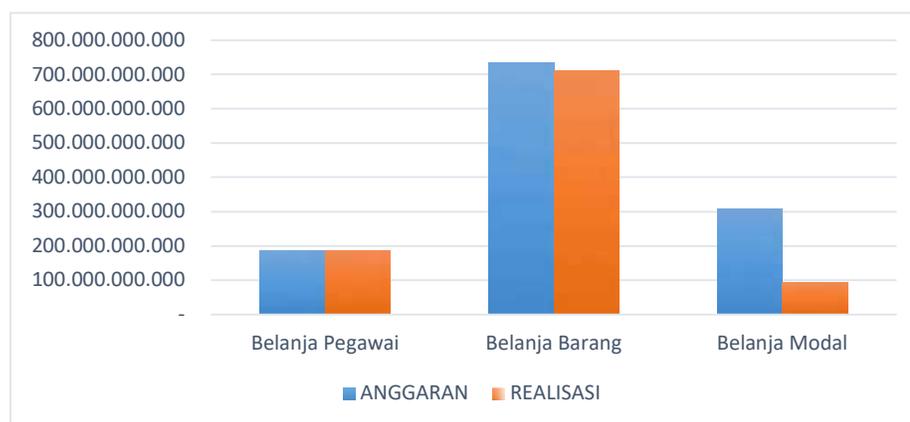
B.2. BELANJA

Realisasi Belanja Bersih pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp992.008.206.671,00 atau 80,84% dari anggaran belanja sebesar Rp1.227.143.203.000,00 Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan TA 2024

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	186.783.785.000	185.892.176.729	99,52
Belanja Barang	732.542.591.000	711.938.177.892	97,19
Belanja Modal	307.816.827	94.177.852.050	30,60
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	1.227.143.203.000	992.008.206.671	80,84

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi Belanja Netto 31 Desember 2024 mengalami penurunan dibandingkan realisasi belanja pada 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya anggaran terblokir.

Perbandingan Realisasi Belanja Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Pegawai	185.892.176.729	165.462.819.652	0,12
Belanja Barang	711.938.177.892	797.757.879.989	-0,11
Belanja Modal	94.117.852.050	123.916.206.636	-0,24
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	991.948.206.671	1.087.136.906.277	-0,09

Belanja Pegawai
Rp185.892.176.729,00

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Bersih 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing - masing sebesar Rp185.892.176.729,00 dan Rp165.462.819.652,00 Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS). dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 12.35% dibandingkan Realisasi belanja 30 Juni 2023. Hal ini disebabkan antara lain penerimaan pegawai P3K.

Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Gaji Pokok PNS	61.965.358.000	60.046.529.376	3,20%
Belanja Pembulatan Gaji PNS	883.949	840.935	5,12%
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	4.774.433.080	4.606.876.598	3,64%
Belanja Tunj. Anak PNS	1.483.438.206	1.424.739.781	4,12%
Belanja Tunj. Struktural PNS	784.210.000	888.920.000	-11,78%
Belanja Tunj. Fungsional PNS	4.322.801.000	4.694.579.000	-7,92%
Belanja Tunj. PPh PNS	613.214.647	179.595.648	241,44%
Belanja Tunj. Beras PNS	3.356.405.510	3.532.502.760	-4,99%
Belanja Uang Makan PNS	7.975.680.000	8.229.305.000	-3,08%
Belanja Tunjangan Umum PNS	1.019.390.000	1.086.775.000	-6,20%
Belanja Gaji PPPK	5.653.418.900	234.034.200	2315,64%
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	109.108	4.485	2332,73%
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	301.029.970	10.054.170	2894,08%
Belanja Tunjangan Anak PPPK	79.982.574	2.669.850	2895,77%
Belanja Tunjangan Struktural PPPK	-	-	#DIV/0!
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	208.253.720	24.075.000	765,02%
Belanja Tunjangan Betras PPPK	313.288.920	11.442.360	2637,97%
Belanja Tunjangan Lauk Pauk PPPK	56.176.000	3.182.000	1665,43%

Belanja Uang Makan PPPK	928.844.000	39.157.000	2272,10%
Belanja Tunjangan kompensasi kerja PPPK	426.970.924	33.916.506	1158,89%
Belanja Tunjangan Umum PPPK	-	-	#DIV/0!
Belanja Uang Lembur	404.852.000	1.216.793.500	-66,73%
Belanja Uang Lembur PPPK	38.166.000	2.208.000	1628,53%
Belanja Tunjangan (Tunkin)	84.810.105.477	78.944.621.372	7,43%
Belanja Tunjangan (Tunkin) PPPK	6.512.386.226	332.712.829	1857,36%
Jumlah Belanja kotor	186.029.398.211	165.545.535.370	12,37%
Pengembalian Belanja Pegawai	137.221.482	82.715.718	65,90%
Jumlah Belanja	185.892.176.729	165.462.819.652	12,35%

Belanja Barang
Rp711.938.177.892,00

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Bersih 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp711.938.177.892,00 dan Rp 797.757.879.989,00. Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2024 mengalami penurunan 10,33 persen dari Realisasi Barang 31 Desember 2023. Hal ini antara lain disebabkan oleh beberapa akun yang terkena blokir.

Perbandingan Belanja Barang Tahunan TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Barang Operasional	44.507.303.303	48.058.120.510	-7,39%
Belanja Barang Non Operasional	44.227.685.595	65.305.708.519	-32,28%
Belanja Barang Persediaan	77.643.326.768	88.837.943.756	-12,60%
Belanja Jasa	101.411.761.522	89.027.064.299	13,91%
Belanja Pemeliharaan	37.886.420.103	33.764.220.937	12,21%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	90.002.552.478	118.658.098.388	-24,15%
Belanja Perjalanan Luar Negeri	2.661.519.392	12.746.926.699	-79,12%
Belanja Barang BLU	31.984.081.628	1.134.638.619	2718,88%
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	248.836.270.881	285.813.538.351	-12,94%
Belanja Barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat	35.241.956.322	55.253.384.066	-36,22%
Jumlah Belanja Kotor	714.402.877.992	798.599.644.144	32,63%
Pengembalian Belanja	2.464.700.100	841.764.155	192,80%
Jumlah Belanja	716.867.578.092	799.441.408.299	-10,33%

Belanja Modal
Rp94.177.852.050,00

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Bersih 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp94.177.852.050,00 dan Rp123.916.206.636,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 18,05 persen dibandingkan TA 2023. Hal ini disebabkan belum banyak terealisasinya belanja modal.

Perbandingan Belanja Modal Tahunan TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Tanah	252.133.501	0	#DIV/0!
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.306.446.430	33.704.831.106	-18,98%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	42.431.339.067	86.796.977.639	-51,11%
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	23.632.868.762	2.316.227.009	920,32%
Belanja Modal Lainnya	94.580.000	238.872.000	-60,41%
Belanja Modal BLU	783.032.900	879.900.710	-11,01%
Jumlah Belanja Kotor	94.500.400.660	123.936.808.464	-23,75%
Pengembalian Belanja	322.548.610	20.601.828	1465,63%
Jumlah Belanja	94.177.852.050	123.916.206.636	-24,00%

*Belanja Modal Tanah
Rp252.133.501,00*

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Tanah Bersih per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp25.015.259,00 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp0. Hal ini disebabkan adanya kegiatan pematangan tanah ataupun pembuatan sertifikat.

*Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp27.291.877.159,00*

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Bersih per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp27.291.877.159,00 mengalami penurunan sebesar 19,03 persen bila dibandingkan dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp33.704.831.106,00. Hal ini disebabkan menurunnya pagu anggaran belanja modal peralatan dan mesin.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan

TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.306.446.430	33.704.831.106	-18,98%
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	-	5.000.000	-
Jumlah Belanja Kotor	27.306.446.430	33.709.831.106	-19,00%
Pengembalian	14.569.271	0	-
Jumlah Belanja	27.291.877.159	33.709.831.106	-19,04%

*Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp42.345.488.241,00*

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Bersih Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp42.345.488.241,00 mengalami penurunan 51,21 persen sebesar Rp86.778.207.162,00 bila dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan adanya anggaran terblokir.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Tahunan TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.902.035.350	74.505.632.775	-50,47%
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0	1.267.199.842	-100,00%
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	5.529.303.717	11.024.145.022	-49,84%
Jumlah Belanja Kotor	42.431.339.067	86.796.977.639	-51,11%
Pengembalian Belanja	85.850.826	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja	42.345.488.241	86.796.977.639	-51,21%

Belanja Modal JIJ
Rp23.410.740.249,00

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Bersih Belanja Modal JIJ 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp23.410.740.249,00 dan Rp2.314.396.658,00 Realisasi 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 911,53 persen dibandingkan TA 2023. hal ini dikarenakan banyaknya kegiatan Pembangunan JIJ di tahun 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Tahunan TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	2.001.299.424	1.204.770.057	66,11%
Belanja Modal Perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan	80.946.550	5.994.000	1250,46%
Belanja Modal Irigasi	10.908.967.755	402.989.588	2607,01%
Belanja Modal Jaringan	2.437.126.466	-	#DIV/0!
Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	8.204.528.567	193.918.000	4130,93%
Belanja Penambahan Nilai Irigasi	0	508.555.364	-100,00%
Jumlah Belanja Kotor	23.632.868.762	2.316.227.009	920,32%
Pengembalian Belanja	222.128.513	1.831.351	12029,22%
Jumlah Belanja	23.410.740.249	2.314.395.658	911,53%

Belanja Modal Lainnya
Rp94.580.000,00

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Bersih Belanja Modal Lainnya 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp94.580.000,00 dan Rp0. Realisasi 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 100 persen dibandingkan TA 2023. hal ini dikarenakan tidak adanya realisasi belanja modal anggaran Belanja Modal lainnya di tahun 2023 dampak Automatic Adjustment.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahunan TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Lainnya	94.580.000	238.872.000	-60,41%
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dan/atau Aset Lainnya dari Hibah	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	94.580.000	238.872.000	-60,41%

Pengembalian Belanja	0	0	-
Jumlah Belanja	94.580.000	238.872.000	-60,41%

*Belanja Modal BLU
Rp783.032.900,00*

B.5.6 Belanja Modal BLU

Realisasi Bersih Belanja Modal BLU 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp783.032.900,00 dan Rp879.900.710,00. Belanja Modal BLU ini terdapat di BLUPPB Karawang, BBPBAP Jepara, BPBAP Situbondo.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal BLU TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BLU	584.342.900	108.250.000	439,81%
Belanja Modal Lainnya-BLU	198.690.000	771.650.710	-74,25%
Jumlah Belanja Kotor	783.032.900	879.900.710	-11,01%
Pengembalian Belanja	0	0	-
Jumlah Belanja	783.032.900	879.900.710	-11,01%

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp0*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

*Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran
Periode 31 Desember 2024 dan 2023*

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	0	0
Jumlah	0	0

*Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp5.000.000.000,00*

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar 5.000.000.000,00 dan Rp30.000.001,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas
Periode 31 Desember 2024 dan 2023*

Keterangan	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	5.000.000.000,00	30.000.001,00
Kas Lainnya dari Hibah yang Belum Disahkan	-	-
Jumlah	5.000.000.000,00	30.000.000,00

Kas Pada Badan Layanan Umum Rp0

C.3 Kas Pada Badan Layanan Umum

Kas pada badan layanan umum per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Berikut rincian pada satuan kerja sebagai berikut:

Belanja dibayar Dimuka (Prepaid) Rp0

C.4 Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)

Belanja dibayar dimuka per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp332.816.000,00. Belanja dibayar dimuka adalah Pengeluaran satuan kerja/pemerintah yang telah dibayarkan dari rekening Kas Umum Negara dan membebani pagu anggaran, namun barang/jasa dari pihak ketiga belum diterima/dinikmati satuan kerja/pemerintah.

Investasi Jangka Pendek-Badan Layanan Umum Rp5.000.000.000,00

C.5 Investasi Jangka Pendek-Badan Layanan Umum

Investasi Jangka Pendek-Badan Layanan umum merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Ini merupakan deposito berjangka pada BPBAP Situbondo hasil dari Penjualan lobster.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0

C.6 Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang masih harus diterima per tanggal Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan yang masih harus diterima adalah Pendapatan yang seharusnya sudah dibayarkan oleh wajib bayar namun belum diterima pembayarannya atau belum disetor ke Kas Negara.

Piutang Bukan Pajak Rp941.750.301,00

C.7 Piutang bukan Pajak

Nilai Piutang bukan pajak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp941.750.301,00 dan Rp1.864.232.809,00.

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022
Piutang Lainnya	857.750.301	1.633.792.809
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	84.000.000	230.440.000
Jumlah	941.750.301	1.864.232.809

Adapun rincian satuan kerja yang terdapat piutang lainnya sebagai berikut :

KODE	NMSATKER	RPHREAL
032.04.237657	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM	1,00
032.04.238734	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI	3.355.143,00
032.04.239192	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA	10.199.497,00
032.04.427706	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG	3.069.602,00
032.04.445393	BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (BLUPPB) KARAWANG	6.008.250,00
032.04.445394	BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM	3.418.100,00
032.04.538911	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU	4.342.475,00
032.04.567385	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE	2.947.387,00
032.04.567474	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT BATAM	7.292.235,00
032.04.567584	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN	2.877.700,00
032.04.567680	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR	2.094.352,00
032.04.567720	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON	6.306.094,00
032.04.567762	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK	3.140.959,00

032.04.567800	BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG	1.984.000,00
032.04.632462	SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	800.714.506,00
TOTAL		857.750.301,00

KODE	NMSATKER	RPHREAL
032.04.445393	BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (BLUPPB) KARAWANG	84.000.000,
Total		84.000.000,

Penjelasan :

- Terdapat potongan gaji melalui SPM untuk sewa rumah dinas yang belum SP2D.
- Terdapat pada satker Setditjen PB (anak satker Dit. Produksi dan Usaha), pelimpahan PUPN dan temuan BPK RI terkait tugas belajar, kelebihan pembayaran perjalanan dinas, kelebihan pembayaran belanja modal BUBK dengan bukti setor NTPN 829F448WEMDGI3G tanggal 4 April 2024 sebesar Rp113.731.802, NTPN EB8C648VVEMDGIVI tanggal 4 April 2024 sebesar Rp89.817.566.
 - a. Terdapat piutang lainnya sebesar Rp413.513.040,- yang terdiri dari :
 - Temuan Inspektorat Jenderal 2017 mengenai kegiatan kekerangan sebesar Rp137.690.000,-
 - Temuan Inspektorat Jenderal No. 5.29/ITJ.3/HP.410/IV/2019 merupakan kegiatan saran budidaya rumput laut sebesar Rp315.823.040,- sudah dilakukan cicilan sebesar Rp25.000.000,- dan Rp15.000.000,- sisa Rp275.823.040,-
 - b. Terdapat piutang lainnya sebesar Rp136.465.703, yang terdiri :
 - Temuan Itjen CV. Cahaya Abadi melakukan pekerjaan paket bantuan budidaya lele system bioflok di Jawa Tengah dengan rincian nilai pekerjaan sebesar

Rp719.466.426,- yang dibayarkan sebesar Rp.1.034.093.072,- sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp314.626.646,- pada tahun 2018 dan telah dilakukan pembayaran sebesar Rp267.710.337,- sehingga masih memiliki kekurangan bayar sebesar Rp46.916.309,-

- Temuan BPK RI Terdapat pekerjaan pagar SKPT Sumba Timur yang tidak sesuai dengan kontrak sehingga CV Satria Rumpun Hijau diharuskan mengembalikan sebesar Rp70.830.000,- dan telah dilakukan pembayaran cicilan sebesar Rp10.000.000,- pada semester 1 2018 sehingga masih terdapat kekurangan bayar sebesar Rp.60.830.000,-
- Temuan BPK RI Pekerjaan lantai jamur pada lokasi SKPT Sumba Timur tidak sesuai kontrak sehingga CV Cipta Prasarana harus mengembalikan sebesar Rp101.438.788,- yang telah dilakukan pembayaran sebesar Rp50.719.394,-; Rp12.000.00,-; Rp10.000.000,- sehingga masih terdapat kekurangan bayar sebesar Rp28.719.394,-.

Adapun Piutang PNBPN terdapat di BLUPPB Karawang yaitu temuan BPK tahun 2020 perihal sewa tambak yang belum dilakukan setor ke negara oleh pihak ketiga senilai Rp350.000.000,00. Dan telah dilimpahkan ke PUPN (KPKNL Purwakarta) dengan nomor surat pelimpahan B1153/BLUPPB/HP.520/V/2023 tanggal 31 Mei 2023. Surat penerimaan pengurusan piutang negara cabang Jawa Barat nomor SP3N-02/PUPNC.13.04/2023 tanggal 21 Juli 2023. Menindaklanjuti surat PUPN, KPKNL Purwakarta memanggil Direktur PT Perikanan Indonesia untuk penyelesaian hutang tersebut dengan nomor surat S-1241/KNL.0804/2023 tanggal 21 Juli 2023. Hasil dari pertemuan tersebut PT Perikanan Nusantara bersedia menyicil dengan jangka waktu 1 (satu) tahun, sehingga 30 Juni 2024 menjadi sebesar Rp84.000.000,00.

*Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak
Rp(884.714.506,00)*

C.8 Pinyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp(884.714.506,00) dan Rp Rp(1.034.882.098,00). Penyisihan piutang tak tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar presentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Saldo Penyisihan Piutang tak tertagih –piutang Bukan Pajak tersebut adalah terkait Piutang PNPB yang terdapat di BLUPPB Karawang serta piutang lainnya di 15 (lima belas) satker.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak TA 2024 dan 2023

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	57.035.795	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	884.714.506	100%	884.784.084
Jumlah	941.750.301		884.784.084

*Persediaan
Rp209.781.466.231,00*

C.9 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp209.781.466.231,00 dan Rp34.769.045.558,00.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan/atau untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Jenis	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
Barang Konsumsi	14.900.067.067	8.627.709.768
Bahan untuk Pemeliharaan	96.640.006	101.420.412
Suku Cadang	1.375.820.416	

Tanah bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	2.068.031.124	
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	21.758.790.673	
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	35.505.313.735	
Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	12.556.843.579	
Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat – Dalam Proses	108.719.887.074	
Bahan Baku	7.152.723.186	
Persediaan Lainnya	5.647.349.371	
Jumlah	209.781.466.231	34.769.045.558

Di bawah ini merupakan uraian transaksi persediaan selama tahun 2024, menurut jenis transaksi, berdasarkan pencatatan dalam Aplikasi SAKTI modul Persediaan.

URAIAN		NILAI
Saldo Awal per 1 Januari 2024 (31 Desember 2023 Audited)		34.769.045.558
MUTASI TAMBAH		259.307.351.301
M01	Saldo Awal	18.540.000
M02	Pembelian	198.693.238.157
M06	Perolehan Lainnya	48.712.878.881
M10	Reklasifikasi Masuk	8.042.528.567
M11	Reklasifikasi Dari Aset	77.000.000
M13	Transfer Masuk Online	484.528.150
M15	Persediaan Dalam Proses Masuk	3.233.476.000
M99	Koreksi Kuantitas Tambah	45.161.546
MUTASI KURANG		115.323.758.270
K01	Habis Pakai	73.929.962.095
K04	Usang	1.436.400
K05	Rusak	86.250.000
K06	Keluar Lainnya	29.332.857.058
K10	Reklasifikasi Keluar	8.026.758.567
K13	Transfer Keluar Online	484.528.150
K15	Persediaan Dalam Proses Keluar	3.233.972.000
K98	Koreksi Nilai Kurang	31.400.000
K99	Koreksi Kuantitas Kurang	196.594.000
OPNAME FISIK		-1.385.771.193
P01	Hasil Opname Fisik	-1.385.771.193
Saldo Akhir		177.366.867.396

Catatan Khusus pada pos persediaan :

- 1) Saldo akhir persediaan barang konsumsi tercatat senilai Rp17.992.201.125,00 yang di dominasi oleh pencatatan pakan sebagai sarana pendukung produksi senilai Rp10.539.380.521,00 dan persediaan penunjang Laboratorium senilai Rp1.657.981.793,00 serta adanya pengadaan Kabel listrik tegangan tinggi senilai Rp1.797.223.300,00 sebagai suku cadang pemeliharaan jaringan pada BUBK Kebumen.
- 2) Saldo akhir bahan untuk pemeliharaan tercatat senilai Rp107.755.116,00 yang di dominasi oleh pencatatan Bahan Kimia Untuk Pembersih senilai total Rp40.626.907,00 dan Perabot Kantor Lainnya senilai Rp36.279.952,00
- 3) Saldo akhir atas suku cadang tercatat senilai Rp430.157.411,00 yang di dominasi oleh pencatatan suku cadang alat laboratorium umum dan suku cadang alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak.
- 4) Saldo Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat senilai Rp798.865.220,00 terdapat pada BPBAP Situbondo berupa pencatatan atas komponen pekerjaan tambak luster secara swakelola yang berlokasi di Kabupaten Pangandaran
- 5) Saldo Hewan dan tanaman untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat senilai total Rp20.568.593.357,00 merupakan biota laut/ikan hasil produksi yang pengeluarannya berdasarkan permintaan bantuan/pembelian oleh masyarakat.
- 6) Saldo Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat senilai total Rp3.128.276.500,00 terdiri atas paket bantuan kendaraan roda 3 pada Dit Perbenihan, paket bantuan mesin pakan pada Dit Pakan dan Obat Ikan serta komponen Pembangunan kluster Bandeng pada BLUPPB karawang.
- 7) Saldo Barang persediaan lainnya untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat senilai Rp8.175.557.129,00 merupakan pencatatan atas pakan mandiri hasil produksi yang pengeluarannya bergantung atas permohonan bantuan/pembelian oleh Masyarakat

- 8) Saldo Barang Persediaan lainnya dalam proses senilai total Rp113.728.263.391,00 terdapat pada Setditjen Perikanan Budidaya UAPKPB Dit Kawasan dan Kesehatan Ikan berupa Pembayaran Termin kontrak dan ongkos Kirim Pengadaan Excavator senilai Rp100.407.319.000,00 selebihnya tersebar pada beberapa UPT berupa biaya swakelola Pembangunan tambak kluster dan bantuan pemerintah lainnya yang masih dalam proses kontrak/pengerjaan.
- 9) Saldo Bahan Baku senilai Rp7.710.861.313,00 didominasi oleh pencatatan bahan Kimia padat senilai Rp2.153.022.453,00 bahan baku lainnya senilai Rp3.562.341.974,00 serta bahan kimia lainnya senilai Rp980.256.960,00.
- 10) Saldo Persediaan lainnya senilai Rp4.726.336.834,00 didominasi oleh pencatatan Biota Laut/Ikan pada Unit Pelaksana Teknis Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya senilai total Rp3.448.365.007,00
- 11) Persediaan senilai Rp91,775,000,00 dalam kondisi rusak pada satker:
 - Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee senilai total Rp5.525.000,00 berupa 300 Kg Pakan Udang Forte 931 (Tambak) yang rusak akibat hama tikus dan senilai total Rp67.500.000,00 berupa 9.000 Kg Pakan Ikan Mandiri Tenggelam yang kadaluarsa
 - Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam pada Akun Barang konsumsi senilai Rp18.750.000,00 berupa 271 Kg pakan apung (produksi pasaman).

Terhadap saldo persediaan kondisi rusak periode Tahun 2023 pada Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung senilai total Rp370.157.400,00 berupa 45.533 Kg pakan apung lele dan 2.000 Kg pakan buatan patin hasil produksi pabrik pakan pangandaran telah dilakukan pemusnahan melalui proses penguburan/penimbunan sesuai Berita Acara nomor B.1980/BBPBL/PL.450/VII/2024 tanggal 25 Juni 2024.

12) Terdapat saldo Persediaan senilai Rp21,671,698 dalam kondisi usang pada satker Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar berupa bahan Kimia laboratorium yang telah kadaluarsa.

Belum terdapat realisasi atas belanja persediaan pada Satuan Kerja Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya yang disebabkan oleh peralihan/penghentian satker Dekonsentrasi menjadi Satker Tugas Pembantuan yang selesai proses pengesahan DIPA di bulan Juni 2024.

*Persediaan yang Belum
diregister
Rp62.439.488,00*

C.10 Persediaan yang Belum dregister

Nilai Persediaan yang Belum dregister per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp62.439.488,00 dan Rp0. Persediaan yang Belum dregister. Dikarenakan Operator komitmen merubah tanggal BAST di aplikasi Sakti.

*Properti Investasi
Rp151.245.930.000,00*

C.11 Properti Invesatasi

Nilai Properti Investasi per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp151.245.930.000,00 dan Rp151.245.930.000,00. Properti Investasi adalah property untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai asset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh Masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administrative, atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada Masyarakat. Rincian Properti Investasi 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Properti Investasi Tahunan TA 2024 dan 2023

U R A I A N	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
Properti Investasi	151.245.930.000	151.245.930.000
-	-	-
Jumlah	151.245.930.000	151.245.930.000

Adapun satker yang memiliki properti investasi sebagai berikut :

NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI	3.935.518.000,	1 Unit Bangunan Gedung Pendidikan Permanen senilai Rp.202.879.000 ; 1 Unit Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen senilai Rp.305.564.000 ; 12 Unit Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen senilai Rp.3.427.075.000
BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (BLUPPB) KARAWANG	114.874.867.000,	Berupa kolam/Bak Ikan yg rencana akan disewakan
BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG	32.435.545.000,	Properti Investasi berupa Tanah sebanyak 2 NUP dan Bangunan sebanyak 27 NUP yang saat ini sedang disewakan kepada Pihak ketiga dengan nomor perjanjian 572/LP2IL/KU.340/III/2020 an PT Tri Karta Pratama dengan jangka waktu 2 Maret 2020 s.d 2 Maret 2025 dan 605/LP2IL/KU.340/III/2020 an PT Tri Karta Pratama dengan jangka waktu 2 Maret 2020 s.d 2 Maret 2025
	151.245.930.000,	

Transaksi Reklasifikasi BMN Ke PI senilai total Rp320.748.230.000,00 terjadi pada beberapa satker antara lain :

1. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi senilai Rp3.935.518.000,00 berupa 1 unit Bangunan Gedung Pendidikan Permanen yang dimanfaatkan sebagai TPA dan Taman Kanak-kanak dikelola oleh Darma Wanita Persatuan BBPBAT Sukabumi sesuai surat B.2919/BBPBAT/TU450/IX/2022 tanggal 29 September 2022 dan 13 unit Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen yang di manfaatkan oleh pegawai/tamu sesuai SK penetapan KA Balai / KPKNL nomor S-133/MK.6/KNL.0803/2023 tanggal 6 Oktober 2023
2. Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang senilai Rp284.377.167.000,00 berupa 1 unit Bangunan Gedung Kantor Permanen, 412 unit Bangunan Kolam/Bak Ikan dan 1 unit Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar

Permanen yang dimanfaatkan sebagian oleh KPRI graha Mina dan dikelola oleh Koperasi Pegawai sesuai surat perjanjian sewa Nomor 751/BLUPPB/HK.320/V/2022 tanggal 20 Mei 2022.

3. Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang senilai Rp32.435.545.000,00 berdasarkan Berita Acara Inventarisasi Bersama BMN dalam Rangka Identifikasi Properti Investasi Nomor B.2463/BPKIL/PL.760/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 berupa 6 unit Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen, 4 unit Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen, 3 unit Bangunan Gedung Kantor Permanen, 2 unit Bangunan Gedung Laboratorium Permanen, 1 unit Bangunan Gedung Laboratorium Semi Permanen, 1 unit Bangunan Gudang Tertutup Permanen, 8 unit Bangunan Kolam/Bak Ikan, 2 unit Gedung Pos Jaga Permanen dan Tanah Tambak/Empang/Kolam Ikan/Akuarium seluas 50.001 meter persegi dengan nilai total perolehan senilai Rp18.387.569.000,00 terhadap aset tetap yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga sesuai perjanjian kerjasama dengan PT. Suri Tani Pemuka Nomor 605/LP2IL/KU.340/III/2020 tanggal 5 Maret 2020 dan dengan PT. Tri Karta Pratama Nomor 572/LP2IL/KU.340/III/2020 tanggal 2 Maret 2020 dimana masa perjanjian kerjasama berlangsung selama 5 tahun dimulai sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2025

Transaksi Perubahan PI ke BMN Terjadi pada BLUPPB karawang berupa 250 unit Kolam Bak Ikan senilai total Rp169.502.616.525,00 yang berdiri diatas tanah yang tidak sepenuhnya dikuasai oleh satker, transaksi ini merupakan tindak lanjut atas hasil audit BPK RI terhadap LK Tahun 2023.

*Akumulasi Penyusutan
Properti Investasi
Rp(41.736.676.005,00)*

C.12 Akumulasi Penyusutan Properti Invesatasi

Nilai Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp(41.736.676.005,00) dan Rp(38.632.207.644,00). Akumulasi Penyusutan Properti Investasi merupakan kotra akun Aset Properti Investasi yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Proeperti Investasi.

*Tanah
Rp3.756.569.583.869*

C.13 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.756.569.583.860 dan Rp3.756.515.384.141. Nilai aset tetap Tanah mengalami perubahan TA 2024 yaitu :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	3.756.515.384.141
Mutasi tambah :	
Transfer Masuk	144.000.000
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	25.015.259
Pengurangan Nilai Aset	-
	-
Mutasi kurang :	-
Transfer keluar	144.000.000
Perubahan BMN Ke PI	-
	-
Saldo per 30 Juni 2024	3.756.540.399.400

Rincian transaksi atas mutasi BMN berupa tanah terdapat pada beberapa satker:

1. Transfer Keluar dan Transfer masuk atas tanah seluas 3.000 m² senilai masing-masing Rp144.000.000,00 terjadi antara Setditjen Perikanan Budidaya kepada Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam dalam rangka pengelolaan UPPI Pasaman.
2. Pengembangan Nilai Aset Langsung atas tanah senilai Rp25.015.259,00 terjadi pada Balai Perikanan Budidaya Air

Tawar Sungai Gelam berupa pekerjaan penimbunan/pembuatan pematang tambak di Dharmasraya.

3. Koreksi Perubahan Kuantitas yang mengurangi kuantitas / luasan tanah seluas 71.160 M² terjadi pada Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam berupa koreksi penyesuaian luasan tanah tercatat dengan luasan surat Ukur/se rtifikat yang baru saja diterbitkan yaitu pada kode barang 2010201003 NUP 2 dan 3.

Terdapat permasalahan pada BMN berupa tanah yang dikuasai/ditatausahakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, yaitu:

Rincian Permasalahan BMN berupa Tanah
Per 31 Desember 2023

Permasalahan Tanah	Kuantitas	Nilai (Rp)
Permasalahan ruislag tanah tambak sidoarjo	472.440 m ²	180.483.744.000

Penjelasan rinci atas permasalahan tanah diatas ialah:

- Dalam putusan atas perkara Nomor 302/III/ARB-BANI/2009 tanggal 19 Agustus 2009 BANI memutuskan antara lain menyatakan bahwa Perjanjian Tukar Menukar Tanah dan Bangunan No. 51 tanggal 26 Maret 1998 antara Departemen Pertanian (sekarang menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan) dengan PT. Semeru Cemerlang adalah sah dan mengikat para pihak dan memerintahkan ruislag perlu dilanjutkan sesuai dengan perjanjian dimaksud.
- Dirjen Kekayaan Negara sesuai surat nomor S-1062/KN/2017 tanggal 1 Agustus 2017 hal Penyelesaian Pelaksanaan Ruislag (tukar-Menukar) tanah tambak sidoarjo, menyampaikan tanah tambak di desa Segoro Tambak yang merupakan objek tukar menukar adalah BMN yang seharusnya dicatat pada Departemen Pertanian (yang sekarang beralih ke Departemen Kelautan dan perikanan).

Atas dasar putusan tersebut telah dilakukan Langkah-langkah sebagai berikut:

- Lahan seluas 472.440 m² yang menjadi **objek ruislag** telah di catat dalam SIMAK BMN Sekretariat DJPB KKP RI sebagai saldo awal per tanggal 3 Juli 2017.

- DJPB telah bersurat kepada KPKNL Jakarta Kemenkeu RI pada tanggal 28 September 2017, perihal permohonan penilaian/reevaluasi BMN terkait bmn yang akan di ruislagh.
- DJPB sedang menelusuri eksistensi keberadaan aset pengganti yang telah diserahkan PT Semeru Cemerlang kepada KKP yang termasuk prestasi dalam perjanjian ruislag, yang akan di konversikan dengan nilai wajar saat ini sebagai bahan perbandingan persentase terhadap nilai wajar lahan segoro tambak yang telah ditetapkan BPK-RI senilai kurang lebih Rp. 117 milyar.
- DJPB dan Setjen KKP akan mengundang PT. Semeru Cemerlang untuk renegosiasi harga tanah objek ruislag agar sesuai dengan nilai wajar yang di tetapkan BPK-RI.

DJPB akan menyiapkan rincian bangunan dan prasarana teknologi perikanan yang dibutuhkan saat ini dengan memperhatikan nilai aset yang akan di ajukan harus diatas nilai wajar lahan objek ruislag yang telah di tetapkan BPK-RI sebagai antisipasi terhadap timbulnya kerugian negara.

Permasalahan Tanah di BPBAP Takalar

Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Takalar memiliki Aset Tanah sebanyak 10 bidang yang tersebar di Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan data dari aplikasi SIMAN dan Monserahper 5 April 2023, Aset Tetap Tanah yang dimiliki senilai Rp112.956.384.000,00, dengan rincian seperti pada tabel berikut.

	JENIS BARANG	KODE BARANG	NAMA BARANG	NUP	TAHUN PEROLEHAN	Nilai	LUAS TANAH (M ²)
						112.956.384.000	
TANAH							
1	Tanah Rawa	2010201001	Tanah Tambak Pirang	3	30/03/1992	469.300.000	20.000
2	Tanah Rawa	2010201001	Tanah Tambak Lagaruda	4	30/03/1992	5.256.609.000	273.927
3	Tanah Rawa	2010201001	Tanah Maros	5	01/07/2011	4.800.729.000	16.228
4	Tanah Tambak/Empang/Koam Ikan/Akuarium	2010201003	Tanah Lokasi 2	1	19/01/2000	10.087.875.000	32.025
5	Tanah Tambak/Empang/Koam Ikan/Akuarium	2010201003	Tanah Tambak Pirang	4	30/03/1992	11.915.107.000	503.810
6	Tanah Tambak/Empang/Koam Ikan/Akuarium	2010201003	Tanah tambak Lagaruda	5	01/07/2011	7.129.200.000	371.506
7	Tanah Tambak/Empang/Koam Ikan/Akuarium	2010201003	Tanah di Makassar	6	04/12/2012	55.020.000.000	15.000
8	Tanah Tambak/Empang/Koam Ikan/Akuarium	2010201003	Tanah Di Pangkep	7	04/12/2012	5.147.980.000	19.094
9	Tanah Kering Lainnya	2010209999	Tanah Lokasi 1	1	19/01/2000	6.572.276.000	21.218
10	Tanah Untuk Bangunan Hatchery	2010306008	Tanah Lokasi 3	1	21/07/2009	6.557.208.000	21.098

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa:

Terdapat 1(satu) bidang tanah di Maros dengan luas tanah 16.228 m² Senilai Rp4.800.729.000,00 dengan status bersertifikat Hak Pakai (terbit tahun 1992) atas nama pemerintah RI c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan namun sampai saat ini masih dikuasai masyarakat, dan menjadi tanah sengketa sejak tahun 2012, namun

sampai saat ini belum ada penyelesaiannya. Adapun kronologis adalah sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 16 Agustus 2010 telah dilakukan Serah Terima Barang Milik Negara dari Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP ke Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP berupa BMN Tanah sebanyak 7(tujuh)sertifikat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 3844/PL.430.S1/DPT.0/VIII/2010 tanggal 16Agustus 2010.
- 2) Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP melakukan penyerahan BMN tersebut pada point nomor 1) kepada Kepala Balai Budidaya Air Payau Takalar sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 3609/DPBDPB/PL.210.S1/VII/2011,tanggal 1 Juli 2011.
- 3) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima tersebut di atas maka tanah-tanah tersebut telah dicatat sebagai aset Barang Milik Negara (BMN) Satuan Kerja Balai Budidaya Air Payau Takalar.
- 4) Sesuai BeritaAcaraSerah Terima tersebut maka pada Tahun 2011 Balai Budidaya Air Payau Takalar telah melakukan balik nama kepemilikan tanah-tanahtersebut dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang diperuntukan bagi Balai Budidaya Air Payau Takalar, meliputi:
 - a) Tanah Lokasi Galesong, Kab. Takalar, dengan sertifikat Hak Pakai Nomor 001/Mappakalompotanggal 29 Juli 2011dan sertifikat Hak Pakai nomor01/Galesong Kotatanggal 29 Juli 2011;
 - b) Tanah Lokasi Desa Lampa Kabupaten Pinrang, dengan sertifikat Hak Pakai Nomor00002/Lampatanggal 5 Februari 1991 dan sertifikat Hak pakai nomor 00001/Lampa tanggal 28 November 1990;
 - c) Tanah di Desa Maccini Baji, Kabupaten Maros, dengan sertifikat Hak Pakai Nomor01/Maccini Baji terbit 14 Januari tahun 1992. Sedangkan yang belum dibalik nama meliputi:
 - a) Tanah di Desa Mandalle, Kab. Pangkep oleh karena terdapat bangunan UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan;
 - b) Tanah di Desa Bira, KotaMakassar oleh karena terdapat bangunan LPPMHP milik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan;
 - c) Tanah di Desa Lagaruda,KabupatenTakalar.
- 5) Pada tanggal 31 Juli 2012, BPBAP Takalar akan melaksanakan pembangunan kolam danjembatanpada lokasi tanahdi Desa Maccini Baji, Kab. Maros tersebut namun terjadi pembongkaran yang dilakukan oleh pihak ketiga yang mengaku memiliki sertifikat kepemilikan pada lahan tersebut termasuk pembongkaran dan pencabutan plang (papan nama) Satker BPBAP Takalar.
- 6) Pada tanggal 4 Agustus2012, pihak BPBAP Takalar melaporkan kepada pihak berwajib (Kepolisian Sektor Lau, Kab. Maros) perihal kejadian tersebut dan pada tanggal 6 Agustus 2012 pihak BPBAP Takalar mendapatkan informasi dari pihak kepolisian

- Sektor Lau bahwa tanah tersebut terdapat sertifikasi Ajudikasi (sertifikasi atas tanah yang tidak dimanfaatkan) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kab. Maros berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 02876/Maccini a.n. Muttiara tanggal 11 November 2009. Dengan demikian, maka terdapat sertifikat ganda yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Maros.
- 7) Pada tanggal 3 Juli 2017 terdapat putusan a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Sulawesi Selatan yang berbunyi:
- a) Membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 02876/Maccini Baji a.n. Muttiara tanggal 11 November 2009.
 - b) Memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Maros untuk:
 - Mencatat batalnya Sertifikat Hak Milik Nomor 02876/Maccini a.n. Muttiara sebagaimana diktum kesatu pada buku dan tanah dan daftar-daftar lainnya yang ada dalam administrasi pendaftaran tanah dengan membubuhkan tanda tangan dan cap stempel;
 - Menarik dari peredaran Sertifikat Hak Milik Nomor 02876/Maccini a.n. Muttiara sebagaimana diktum satu;
 - Apabila penarikan sertifikat tidak dapat dilaksanakan, agar diumumkan di Kantor Pertanahan dan Kantor Kelurahan setempat dalam waktu 30 hari serta diumumkan satu kali dalam surat kabar harian yang beredar/terbit secara umum di wilayah Kab. Maros mengenai isi diktum satu.
- 8) Karena belum ada tindak lanjut dari Kepala Kantor Pertanahan Kab. Maros, Pada tanggal 3 Desember 2020, Kepala BPBAP Takalar bersurat kembali kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Maros mengenai penyelesaian keputusan tersebut. Namun sampai selesai pemantauan belum ada jawaban dari Kepala Kantor Pertanahan Kab. Maros sehingga tanah tersebut masih dikuasai oleh masyarakat.

Terdapat 2 (dua) bidang tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan kondisi sebagai berikut:

- 1) Tanah di Desa Bira, Kota Makassar dengan luas tanah 15.000 m² dengan nilai Rp55.020.000.000,00 bersertifikat Hak Pakai Nomor 20004/Parang Loe a.n. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terbit tahun 2019 dan telah tercatat sebagai aset milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tanah ini terdapat bangunan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Penerapan Mutu Produk Perikanan milik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.
- 2) Tanah di Desa Mandalle, Kab. Pangkep dengan luas tanah 19.394 m² dengan nilai Rp5.147.980.000,00 bersertifikat Hak Pakai a.n. Departemen Pertanian RI Jakarta Kantor dan Unit *Hatchery* Ditjen Perikanan dan Kepulauan, dengan sertifikat Hak Pakai Nomor 2/Mandelle, tanggal 2 Februari 1989. Pada tanah ini terdapat bangunan UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Sertifikat tanah tersebut berupa salinan dan dipegang oleh Satker BBPAP Takalar.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menguasai kedua tanah tersebut sejak tahun 1993 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor PL.430/Dj.8492/93, tanggal 28 Agustus 1993 antara Direktur Jenderal Perikanan (Ir. H. Muchtar Abdullah), Departemen Pertanian dengan Kepala Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan (Abdul Munif Kadir).

Terhadap penguasaan 2 (dua) tanah tersebut telah dilakukan upaya penyelesaian permasalahan sebagai berikut:

- 1) Terdapat Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 593.44/724/Aset, tanggal 8 Februari 2011 perihal usul hibah aset tambak milik KKP sebanyak 5 bidang tanah kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk dimanfaatkan secara optimal guna mendukung program peningkatan produk perikanan dan sumber pendapatan pemerintah. Terhadap surat tersebut, Dirjen Perikanan Budidaya menyetujui untuk hibah 2 bidang tanah tersebut di atas dan telah berkirin surat ke Sekretaris Jenderal KKP tanggal 3 Februari 2015.
- 2) Sekretaris Jenderal menjawab surat Dirjen Perikanan Budidaya tanggal 4 Maret 2015 untuk meminta audit dari APIP dan membentuk tim internal untuk melakukan persiapan persetujuan hibah dan setelahnya mengusulkan kembali setelah persyaratan usulan hibah lengkap.
- 3) Kepala BPBAP Takalar bersurat kembali ke Sekretaris Dirjen Perikanan Budidaya tanggal 24 September 2019 mengenai hibah tersebut karena belum ada tindak lanjutnya.
- 4) Inspektorat Jenderal telah melakukan Audit Kinerja untuk TA 2020 sesuai Laporan Hasil Audit Nomor 5040/ITJ/HP.110/VI/2021 tanggal 20 Juni 2021. Rekomendasi audit kinerja tersebut menyatakan bahwa Kepala BPBAP Takalar harus berkoordinasi secara tertulis dengan Sekretaris Ditjen Perikanan Budidaya untuk percepatan penyelesaian terhadap kedua tanah tersebut. Berdasarkan rekomendasi tersebut, Kepala BPBAP Takalar kembali bersurat mengenai usulan hibah tersebut sesuai Surat Nomor 3148/BPBAP/HK.440/VI/2021.

Adapun satuan kerja yang memiliki akun Tanah adalah sebagai berikut :

NAMA SATKER	2024
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM	8.271.090.389,
BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI	1.631.916.832.000,
BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA	1.363.723.985.511,
BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG	11.050.462.500,
BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (BLUPPB) KARAWANG	237.732.841.000,
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU	5.285.989.000,
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO	102.353.116.000,

BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE	16.041.736.000,
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT BATAM	1.331.260.000,
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN	24.284.286.000,
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR	112.956.384.000,
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON	25.370.380.000,
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK	4.048.291.000,
BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG	26.936.432.000,
SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	185.237.314.000,
TOTAL	3.756.540.399.400,00

*Peralatan dan Mesin
Rp917.905.233.527,00*

C.14 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp917.905.233.527,00 dan Rp925.923.688.626,00

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	925.923.688.626
Mutasi tambah:	
Saldo Awal	5.909.797.050
Pembelian	14.758.526.707
Transfer Masuk	582.817.200
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	1.208.900.000
Perolehan Lainnya	132.000.000
Likuidasi masuk	9.877.117.996
Koreksi Pencatatan Nilai bertambah	1.312.076.342
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	1.386.980.000
Transfer Keluar	2.561.817.200
Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	77.000.000
Koreksi Pencatatan	332.000.000
Likuidasi Keluar	9.877.117.996
Penghentian Aset Dari Penggunaan	13.856.385.288
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	983.359.500
Saldo per 30 Juni 2024	932.596.982.937
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	-790.066.505.459
Nilai Buku per 30 Juni 2024	142.530.477.478

Rincian transaksi atas mutasi BMN berupa alat besar terdapat pada beberapa satker, antara lain:

a) Transaksi pembelian atas Alat Besar senilai total Rp5.212.580.376,00 terjadi pada

- Setditjen Perikanan Budidaya UAPKPB Dit Kawasan dan Kesehatan Ikan berupa 4 unit Crawler Excavator + Attachment senilai total Rp4.725.900.000,00 dalam rangka pengadaan sarana pendukung operasional yang diserahkan kepada beberapa satker Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen Perikanan Budidaya maupun lintas Eseloaan I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo senilai total Rp174.416.000,00 berupa berupa 22 unit Paddle Mixer (Paddle Wheel Aerator) dalam rangka sarana pendukung kegiatan pembesaran budidaya.
- Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung senilai total Rp192.764.376,00 berupa 4 unit Pompa Air sebagai saran pendukung kolam produksi benih dan pembesaran.
- Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekeurangan Karangasem senilai total Rp119.500.000,00 berupa 7 unit Pompa Air sebagai saran pendukung kolam produksi benih dan pembesaran.

b) Transfer Keluar dan Transfer Masuk atas alat besar terjadi pada:

- Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepulauan Bangka Belitung senilai Rp360.000,00 berupa 5 unit Portable Water Pump dan 20 unit Belt Conveyor (Feeder) dalam rangka likuidasi asset stker Dekonsentrasi kepada Satker Tugas Pembantuan
- Balai Perikanan Budidaya Laut Batam senilai Rp11.275.000,00 berupa 1 unit Pompa Air perolehan dari Dit Kawasan dan Kesehatan Ikan dalam rangka dukungan kegiatan operasional satker.

Selain hal tersebut terjadi selisih nilai Transfer Keluar dan Transfer masuk antar Satker lingkup Ditjen Perikanan Budidaya yang disebabkan adanya transfer Keluar asset berupa 1 unit Crawler Excavator + Attachment yang dilakukan lintas unit Eselon I dari Dit Kawasan dan Kesehatan Ikan (DJPB) diserahkan kepada Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan (DJPT)

- c) Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP atas Alat Besar senilai Rp1.208.900.000,00 terjadi pada Dit Kawasan dan Kesehatan Ikan berupa pengadaan Excavator yang langsung di reklasifikasi menjadi barang jadi, hal ini disebabkan karena adanya kesalahan pemilihan kodefikasi barang dimana seharusnya tercatat sebagai aset tetap tetapi tercatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan.
- d) Likuidasi Masuk dan Likuidasi keluar atas alat besar senilai total Rp1.615.251.375,00 terjadi pada beberapa Satker Dinas Provinsi dalam rangka peralihan kewenangan Satker yang semula Dekonsentrasi menjadi Tugas Pembantuan dengan rincian sebagai berikut:

e)

N a	Kuantitas	Nilai
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi	2	62.000
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi	6	97.500.000
Dinas Kelautan Provinsi Kalimantan Barat	1	4.985.000
Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi	23	666.890.000
Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi	5	222.250.000
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi	615	282.500.900
Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah	12	341.063.475
Jumlah	664	1.615.251.375

Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah atas Alat Besar senilai Rp230.000.000,00 terjadi pada Dit Kawasan dan

Kesehatan Ikan berupa kapitalisasi atas nilai pembelian dan jasa onkos kirim barang ke Lokasi pemanfaatan asset.

- f) Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif atas Alat Besar terjadi pada Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung berupa 1 unit Stationary Generating Set senilai Rp348.975.000,00 dalam rangka koreksi kondisi Barang yang masih baik/dimanfaatkan tetapi secara pencatatan telah di reklas ke aset lain-lain.
- g) Penghentiaan Aset dari Penggunaan atas Alat Besar senilai total Rp5.706.440.000,00 terjadi pada:
- Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung berupa 1 unit Stationary Generating Set senilai Rp152.100.000,00 dalam rangka usulan penghapusan BMN rusak berat.
 - Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar senilai Rp5.554.340.000,00 berupa 1 unit Floating Excavator + Attachment, 7 unit Paddle Mixer, 3 unit Pompa Lainnya, 13 unit Pompa Air dan 1 unit Tower Crane dalam rangka usulan penghapusan BMN rusak berat.

Alat Besar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 291 unit dengan nilai sebesar Rp58.098.696.102,00

Akumulasi Penyusutan Alat Besar pada Laporan Barang Pengguna per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp150.621.829.077,00.

Rincian transaksi atas mutasi BMN berupa alat Angkutan terdapat pada beberapa satker, antara lain:

- a) Perolehan Saldo Awal atas Alat angkutan terjadi pada Setditjen Perikanan Budidaya UAPKPB Dit Perbenihan berupa 1 unit rumah ponton senilai Rp1.384.450.000,00, hal ini merupakan pemecahan 2 unit rumah ponton yang tercatat sebanyak 1 unit perolehan tahun 2023 dengan melakukan koreksi nilai atas sebagian nilai perolehan barang sebelumnya
- b) Pembelian atas alat angkutan senilai total Rp1.108.149.500,00 terjadi pada :

- Setditjen Perikanan Budidaya UAPKPB Dit. Produksi dan Usaha Perikanan berupa 11 paket pekerjaan jasa mutasi kendaraan dinas Roda 3 hasil belanja bantuan pemerintah yang tercatat sebagai Sepeda Motor senilai total Rp77.000.000,00 dalam hal ini terjadi kesalahan pemilihan Kodefikasi Barang.
 - Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang senilai total Rp148.400.000,00 berupa 3 unit Sepeda Motor Honda CRF 150 L / Trail Transmisi Manual dan 2 unit Sepeda Motor Honda Beat CBS ISS DELUXE Transmisi Matic yang di pergunakan sebagai sarana pengawasan dan pengamanan Tambak BUBK Kebumen.
 - Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee senilai Rp1.650.000,00 berupa 1 unit kursi roda sebagai pelengkap sarana pendukung pada unit pelayanan publik.
 - Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin senilai total Rp449.099.500,00 berupa 1 unit station Wagon merk Toyota / Kijang Innova 2.4 G A/ dan 1 unit kendaraan bermotor roda 3 merk VIAR / V15 RL M/T
 - Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekeurangan Karangasem senilai Rp293.500.000,00 berupa 1 unit pickup merk isuzu traga
 - Balai Perikanan Budidaya Laut Batam senilai Rp138.500.000,00 berupa 1 unit Speed Boat / Motor Tempel merk YAMAHA 2T/40 PK
- c) Likuidasi Masuk dan Likuidasi Keluar atas alat angkut senilai masing-masing Rp1.353.171.818,00 terjadi disebabkan adanya perubahan kewenangan satker Dekonsentrasi menjadi Satker Tugas Pembantuan, transaksi ini terjadi pada:

Uraian Transaksi	Kuantitas	Nilai
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	14	93.705.000
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi	11	90.980.000

Dinas Kelautan Provinsi Kalimantan Barat	13	185.646.000
Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Timur	1	13.000.000
Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Utara	3	416.250.000
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo	14	312.981.818
Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Papua	23	240.609.000
Jumlah	79	1.353.171.818

- d) Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif atas alat angkutan senilai Rp66.000.000,00 terjadi pada Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung berupa 1 unit Long boat yang akan dilakukan perbaikan dan dipergunakan kembali sebagai sarana pendukung kegiatan satker
- e) Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang atas Alat angkutan terjadi pada Setditjen Perikanan Budidaya UAPKPB Dit Perbenihan berupa 1 unit rumah ponton senilai Rp1.384.450.000,00, hal ini merupakan pemecahan 2 unit rumah ponton yang tercatat sebanyak 1 unit perolehan tahun 2023 yang kemudian nilainya di catat kembali sebagai perolehan saldo awal 1 unit rumah ponton yang baru.
- f) Reklasifikasi Keluar ke Persediaan atas alat angkutan senilai Rp77.000.000,00 terjadi pada Setditjen Perikanan Budidaya UAPKPB Dit. Produksi dan Usaha yang merupakan tindak lanjut atas kesalahan kodefikasi barang perolehan pekerjaan jasa mutasi kendaraan dinas Roda 3 hasil belanja bantuan pemerintah yang tercatat sebagai Sepeda Motor
- g) Penghentian Aset Dari Penggunaan atas alat angkutan senilai total Rp536.182.000,00 terjadi pada:
- Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya senilai Rp194.152.000,00 berupa 2 unit Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) dalam rangka usulan penghapusan BMN Rusak Berat sesuai dokumen nomor B.2611/DJPB.1/PL.750/IV/2024 tanggal 18 April 2024

- Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar senilai total Rp306.200.000,00 berupa 1 unit pickup, 2 unit Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Lainnya dan 2 unit Sepeda Motor dalam rangka usulan penghapusan BMN rusak berat
- Balai Perikanan Budidaya Laut Batam senilai Rp35.830.000,00 dalam rangka usulan penghapusan BMN rusak berat

Alat Angkutan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 152 unit dengan nilai total sebesar Rp28.694.426.952,00.

Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan pada Laporan Barang Pengguna per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp51.335.292.589.-.

Rincian transaksi atas mutasi BMN berupa Alat Bengkel dan Alat Ukur terdapat pada beberapa satker, antara lain:

- Transfer Keluar dan Transfer Masuk atas Alat Bengkel dan Alat Ukur senilai masing-masing Rp1.478.000,00 terjadi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka Likuidasi Satker Dekonsentrasi kepada Satker Tugas pembantuan proses perubahan Kewenangan Satker Dinas Provinsi.
- Likuidasi Keluar dan Likuidasi Masuk Alat Bengkel dan Alat Ukur senilai masing-masing Rp198.697.625,00 terjadi disebabkan adanya perubahan kewenangan satker Dekonsentrasi menjadi Satker Tugas Pembantuan, transaksi ini terjadi pada :

Uraian Transaksi	Kuantitas	Nilai
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi	30	62.817.000
Dinas Kelautan Provinsi Kalimantan Barat	18	2.410.000
Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Timur	46	30.750.000
Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Utara	1	19.990.000
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo	26	25.433.000

Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Papua	49	57.297.625
Jumlah	170	198.697.625

c) Penghentiaan Aset Dari Penggunaan atas Alat Bengkel dan Alat Ukur senilai total Rp110.334.000,00 terjadi pada :

- Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang senilai total Rp108.200.000,00 berupa 18 unit PH Meter (Alat Ukur Universal) dan 1 unit Scanner (Universal Tester) dalam rangka usulan penghapusan BMN rusak berat
- Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara berupa 2 unit PH Meter (Alat Ukur Universal) senilai Rp564.000,00 dalam rangka usulan penghapusan BMN rusak berat
- Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon berupa 3 unit Thermohyrometer (Alat Ukur Universal) dan 2 unit Test Tube Rack Stainlesstel With 10 Holes 18 mm DIA senilai total Rp1.570.000,00 dalam rangka usulan penghapusan BMN rusak berat

Alat Bengkel dan alat ukur yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 200 unit dengan nilai sebesar Rp631.281.169,00.

Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur pada Laporan Barang Pengguna per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp9.217.764.256,00.

Rincian transaksi atas mutasi BMN berupa Alat Pertanian terdapat pada beberapa satker, antara lain:

a) Pembelian atas Alat Pertanian senilai total Rp1.499.071.180,00 terjadi pada beberapa satker antara lain:

- Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee berupa 2 unit Lemari Penyimpan senilai Rp15.448.500,00 yang dipergunakan sebagai lemari tempahan pada unit pelayanan publik dan sebagai lemari penyimpan Kamera (CASEL)
- Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung berupa 2 unit Penyemprot Mesin (Power Sprayer) senilai

Rp37.322.680,00 yang di pergunakan sebagai saran pendukung pada unit Pelaksana Divisi Teknis.

- Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekeangan Karangasem berupa 1 unit Alat Produksi Perikanan Lainnya (Kincir Minipad) senilai Rp6.300.000,00
- Balai Perikanan Budidaya Laut Batam berupa 14 unit Keramba (Jaring Apung) senilai total Rp1.440.000.000,00 yang dipergunakan sebagai sarana pendukung produksi Lobster.

b) Transfer Keluar dan Transfer Masuk atas Alat Pertanian senilai masing- masing Rp14.474.700,00 terjadi pada :

- Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara kepada Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo berupa 1 unit Alat Pengolahan Lainnya senilai Rp11.244.300,00 sesuai BAST nomor B1297/BBPBAPJ/PL.760/III/2024 tanggal 19 Maret 2024.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepulauan Bangka Belitung senilai Rp3.230.400,00 dalam rangka perubahan kewenangan satker Dekonsentrasi menjadi Satker Tugas Pembantuan.

c) Likuidasi Keluar dan Likuidasi Masuk senilai masing-masing Rp1.478.153.362,00 terjadi disebabkan adanya perubahan kewenangan satker Dekonsentrasi menjadi Satker Tugas Pembantuan, transaksi ini terjadi pada :

Uraian Transaksi	Kuantitas	Nilai
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	2	136.000
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi	22	255.762.000
Dinas Kelautan Provinsi Kalimantan	2	94.200.000
Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi	287	352.297.000
Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Utara	19	214.220.000
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi	64	460.893.662

Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah	44	100.644.700
Jumlah	440	1.478.153.362

- d) Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah atas Alat Pertanian senilai Rp1.082.076.342,00 terjadi pada Setditjen Perikanan Budidaya UAPKPB Dit Kawasan dan Kesehatan Ikan berupa Alat Produksi Perikanan Lainnya (HDPE) tambak BUBK Kebumen yang merupakan tindak lanjut atas pendetailan asset perolehan jasa konstruksi tahap II.
- e) Koreksi Pencatatan atas alat pertanian senilai total Rp200.000.000,00 terjadi pada Balai Perikanan Budidaya Laut Batam berupa 5 unit Keramba (Jaring Apung) yang merupakan koreksi kesalahan kodefikasi atas belanja operasional berupa komponen/suku cadang pemeliharaan Keramba (Jaring Apung)
- f) Penghentian Aset Dari Penggunaan atas Alat Pertanian senilai total Rp1.570.174.000,00 terjadi pada:
- Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang senilai Rp1.555.224.000,00 berupa 600 unit Alat Produksi Perikanan Lainnya dalam rangka usulan penghapusan BMN rusak berat
 - Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar senilai Rp14.950.000,00 berupa 1 unit Alat Pengambil Sample Tanah dalam rangka usulan penghapusan BMN rusak Berat

Alat Pertanian yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 1.937 unit dengan nilai sebesar Rp57.937.434.445,00

Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian pada Laporan Barang Pengguna per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp118.901.891.864,00.

Rincian transaksi atas mutasi BMN berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga terdapat pada beberapa satker, antara lain:

- a) Transaksi Perolehan Saldo Awal atas Alat Kantor dan Rumah Tangga senilai total Rp21.156.000,00 terjadi pada Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin berupa 1 unit Mesin

Penghitungan Uang dan 3 unit Mesin Pemotong Rumput yang merupakan tindak lanjut atas Hasil Audit Kinerja TA 2023 – 2024 berupa pertanggungjawaban belanja pemeliharaan peralatan dan mesin serta belanja pemeliharaan gedung dan bangunan yang realisasi belanjanya menghasilkan aset

b) Transaksi Pembelian atas Alat Kantor dan Rumah Tangga senilai total Rp1.761.654.069,00 terjadi pada:

- Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya senilai Rp562.648.000,00 berupa 3 unit A.C. Split, 10 unit Gordy/Kray, 48 unit (m²) Karpas pendukung Gudang arsip di Jl Juanda dan Jl. Kwitang, 215 unit kursi besi metal pengganti kursi kerja staff Setditjen Perikanan Budidaya, dan 5 unit meja kerja kayu (Top Table Multi) yang ditempatkan di ruang kerja IISAP.
- Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi senilai Rp18.656.000,00 berupa 2 unit Sofa dan 2 unit AC windows guna mendukung pelayanan tamu dan Publik
- Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang senilai total Rp507.600.000,00 berupa 6 unit A.C. Split 2 PK sebagai sarana pendukung pada Aula utama, Gedung pelayanan teknis dan ruang tamu kantor utama, 5 unit A.C. Split 1 PK sebagai sarana pendukung Gedung kantor BUBK Kebumen, 4 unit A.C. Split Panasonic / 1 PK, 3,6 A, 760 Watt sebagai sarana pendukung asrama dan ruang kerja PBJ serta 6 unit Penangkal Petir (PGV-197518160, R150 Mtr, Teg Aktif 25 KV) yang di tempatkan di area tambak Blok A, B, D1, D2, D3 dan J2
- Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara senilai Rp17.850.000,00 berupa 2 unit Televisi dan 1 unit A.C. Split sebagai sarana pendukung kegiatan pada Gedung tata Usaha.
- Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo senilai total Rp160.792.000,00 berupa 6 unit Lemari Besi/Metal

yang dimanfaatkan sebagai Lemari Arsip di Ruang Arsip Pecaron, 18 unit meja rapat dan 113 unit Kursi Besi/Metal

- Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee senilai Rp69.242.600,00 berupa microwave, Alat Penghancur Kertas, 5 unit CCTV - Camera Control Television System, Mimbar/Podium, Microphone Table Stand, Sound System, Televisi, 2 unit Kipas Angin, A.C. Split, 3 unit Mesin Pemotong Rumput, 2 unit Kursi Besi/Metal dan 1 unit Mesin Antrian
- Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam senilai Rp7.658.919,00 berupa Sound System dan Mesin Pemotong Rumput
- Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung senilai Rp119.060.000,00 berupa 2 unit A.C. Split pendukung ruang pelatihan, 1 unit A.C. Split pendukung ruang tamu/lobby kantor utama, 3 unit Perkakas Kantor Lainnya (panel Listrik) sarana jaringan kelistrikan kolam, dan 2 unit Mesin Pemotong Rumput sebagai sarana pendukung kebersihan taman dan area kolam/tambak.
- Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin senilai Rp24.996.800,00 berupa 3 unit A.C. Split dan 1 unit Pemotong Rumput sebagai sarana pendukung ketatausahaan, perkantoran dan kebersihan wilayah kantor.
- Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar senilai Rp71.700.000,00 berupa 3 unit A.C. Split sebagai sarana pendukung kegiatan pada AULA Utama dan pelayanan Publik.
- Balai Perikanan Budidaya Laut Ambons senilai total Rp100.149.750,00 berupa 16 unit Kursi Besi/Metal, 4 unit Meja Kerja Kayu dan 1 unit Televisi
- Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem senilai Rp48.700.000,00 berupa 5 unit A.C. Split 2 PK, 1 unit Sound System AV-MP326BT, dan 1 unit

Mesin Pemotong Rumput Honda UMR 435 N sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan operasional satker.

- Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan Serang senilai Rp52.600.000,00 berupa 1 unit LCD Projector dan 1 unit televisi

c) Transfer Keluar dan Transfer Masuk atas Alat Kantor dan Rumah Tangga senilai masing-masing Rp347.018.000,00 terjadi pada:

- Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi senilai Rp98.340.000,00 berupa 50 unit Kursi Besi/Metal dan 2 unit Meja Kerja Kayu perolehan dari Setditjen Perikanan Budidaya
- Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang senilai Rp141.845.000,00 berupa 75 unit Kursi Besi/Metal perolehan dari Setditjen Perikanan Budidaya
- Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan Serang berupa 40 unit Kursi Besi/Metal senilai Rp95.480.000,00 perolehan dari Setditjen Perikanan Budidaya
- Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepulauan Bangka Belitung senilai Rp11.353.000,00 dalam rangka likuidasi perubahan Kewenangan kode Satker dari Satker Dekonsentrasi menjadi Satker Tugas Pembantuan.

d) Likuidasi Keluar dan Likuidasi Masuk atas Alat Kantor dan Rumah Tangga senilai masing-masing senilai masing-masing Rp816.065.280,00 terjadi disebabkan adanya perubahan kewenangan satker Dekonsentrasi menjadi Satker Tugas Pembantuan, transaksi ini terjadi pada:

Uraian Transaksi	Kuantitas	Nilai
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	12	2.299.880
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi	49	97.724.000
Dinas Kelautan Provinsi Kalimantan Barat	27	34.292.000
Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Timur	27	26.935.000
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara	129	145.231.400

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo	202	112.828.600
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua	176	396.754.400
Jumlah	622	816.065.280

- e) Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif atas Alat Kantor dan Rumah Tangga senilai Rp568.384.500,00 terjadi pada Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon berupa Water Filter
- f) Transfer Masuk dan Transfer Keluar Internal atas Alat Kantor dan Rumah Tangga senilai masing-masing Rp89.851.000,00 terjadi pada Setditjen Perikanan Budidaya yang diserahkan dari UAPKPB Dit Kawasan dan Kesehatan Ikan berupa 4 unit LCD Projector/Infocus, 2 unit Handy Cam dan 1 unit Televisi dalam rangka usulan penghapusan BMN rusak berat secara terpadu.
- g) Penghentian Aset Dari Penggunaan atas Alat Kantor dan Rumah Tangga senilai total Rp1.229.860.500,00 terjadi pada:
- Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang senilai total Rp330.384.000,00 berupa 1 unit Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi), 1 unit Mesin Ketik Elektronik/Selektrik, 1 Mesin Fotocopy Electronic, 2 unit LCD Projector/Infocus, 24 unit A.C. Window, 28 unit A.C. Split dan 2 unit Chiller dalam rangka usulan penghapusan BMN rusak berat
 - Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar senilai total Rp168.106.000,00 berupa 5 unit Lemari Besi/Metal, 3 unit Lemari Kayu, 10 unit Meja Kerja Kayu, 10 unit Kursi Besi/Metal, 12 unit Tempat Tidur Kayu, 5 unit Meja Makan Kayu, 4 unit Lemari Es, 13 unit A.C. Split, 1 unit Televisi, 4 set Sound System dan 20 unit Water Filter dalam rangka usulan penghapusan BMN rusak berat
 - Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon senilai total Rp731.370.500,00 berupa 2 unit Rak Kayu, 1 unit CCTV - Camera Control Television System, 4 unit Overhead Projector, 2 unit Kursi Besi/Metal, 2 unit Lemari Es, 9 unit A.C. Split, 2

unit Kitchen Set dan 3 unit Water Filter dalam rangka usulan penghapusan BMN

Alat Kantor dan Rumah Tangga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 1.910 unit dengan nilai sebesar Rp3.232.157.430,00.

Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Laporan Barang Pengguna per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp60.100.249.988,00.

Rincian transaksi atas mutasi BMN berupa Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar terdapat pada beberapa satker, antara lain:

a) Transaksi Pembelian atas Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar senilai total Rp1.301.883.782,00 terjadi pada:

- Setditjen Perikanan Budidaya UAPKPB Dit Kawasan dan Kesehatan Ikan senilai Rp1.100.000.000,00 berupa 2 unit Genset
- Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi senilai Rp15.000.000,00 berupa 1 unit Uninterruptible Power Supply (UPS) merk ICA Sinewave UPS/SE3100
- Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee senilai Rp8.412.500,00 berupa Mixer Sound Sistem, Peralatan Studio Audio Lainnya dan Handphone Encription
- Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon senilai Rp55.125.482,00 berupa 2 unit Telephone Mobile pendukung kegiatan Kepala Satker dan Bendahara dan 1 unit Camera Digital
- Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok senilai Rp50.815.800,00 berupa 6 unit Video Wall sebagai sarana pendukung pada Aula Kantor Sekotong
- Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan Serang senilai Rp47.000.000,00 berupa 1 unit Uninterruptible Power Supply (UPS)

- Balai Perikanan Budidaya Laut Batam senilai Rp25.530.000,00 berupa 1 unit Camera Conference
- b) Transfer Masuk dan transfer Keluar atas Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar senilai masing-masing Rp400.000,00 terjadi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka likuidasi perubahan Kewenangan kode Satker dari Satker Dekonsentrasi menjadi Satker Tugas Pembantuan.
- c) Transaksi Perolehan Lainnya atas Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar senilai Rp53.300.000,00 terjadi pada :
- Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi senilai Rp32.300.000,00 berupa 1 unit Camera Digital yang merupakan pencatatan Kembali atas koreksi pencatatan kamera digital (kesalahan kodefikasi barang terekam sebagai kode bidang Alat Persenjataan) dalam hal ini terjadi kesalahan penggunaan menu perbaikan kodefikasi barang yang seharusnya menggunakan reklasifikasi keluar dan reklasifikasi masuk tetapi menggunakan koreksi pencatatan dan perolehan lainnya.
 - Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar senilai Rp21.000.000,00 berupa 3 unit Scanner Facsimile yang merupakan tindak lanjut kesalahan pembelian 1 paket peralatan tercatat sebagai 1 NUP barang sesuai surat keterangan nomor B.1276/BPBAPT/TU.100/III/2024 tanggal 28 Maret 2024. D)
- d) Likuidasi Keluar dan Likuidasi Masuk atas Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar senilai masing-masing Rp207.465.750,00 terjadi disebabkan adanya perubahan kewenangan satker Dekonsentrasi menjadi Satker Tugas Pembantuan, transaksi ini terjadi pada:

Uraian Transaksi	Kuantitas	Nilai
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi	4	16.800.000
Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Timur	4	56.850.000
Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Utara	11	103.700.000

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo	2	400.000
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua	12	29.715.750
Jumlah	33	207.465.750

- e) Transfer Masuk dan Transfer Keluar Internal atas Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar senilai masing-masing Rp143.968.800,00 terjadi pada Setditjen Perikanan Budidaya yang diserahkan dari UAPKPB Dit Kawasan dan Kesehatan Ikan berupa 4 unit Voice Recorder, 11 unit Camera Digital dan 4 unit Telephone Mobile dalam rangka usulan penghapusan BMN rusak berat secara terpadu.
- f) Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang atas Alat Studio Komunikasi dan Pemancar senilai Rp2.530.000,00 terjadi pada Balai Perikanan Budidaya Laut Batam
- g) Penghentian Aset Dari Penggunaan atas Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar senilai total Rp221.458.400,00 terjadi pada:
- Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang berupa 1 unit Camera Digital, 2 unit Facsimile, 6 unit Handy Talky (HT) dan 39 unit Switcher/Patch Panel senilai total Rp124.558.900,00 dalam rangka usulan penghapusan BMN rusak berat
 - Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar senilai Rp19.991.000,00 berupa 1 unit Film Projector dalam rangka usulan penghapusan BMN rusak berat
 - Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon senilai total Rp76.908.500,00 berupa 3 unit Automatic Voltage Regulator (AVR), 1 unit Camera Electronic, 1 unit Compact Disc Juke Box System, 2 unit Facsimile, 2 unit GPS Receiver dan 2 unit Solar Cell dalam rangka usulan penghapusan BMN rusak berat

Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 306 unit dengan nilai sebesar Rp18.874.599.874,00.

Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar pada Laporan Barang Pengguna per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp21.001.500.043,00.

Rincian transaksi atas mutasi BMN berupa Alat Kedokteran dan Kesehatan terdapat pada beberapa satker, antara lain:

a) Transaksi Pembelian atas Alat Kedokteran dan Kesehatan senilai Rp132.110.000,00 terjadi pada:

- Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung berupa 1 unit Lemari Obat (Kaca) senilai Rp4.670.000,00
- Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar berupa 1 unit Refrigerated Centrifuge merk Biomedlab senilai Rp127.440.000,00 sebagai saran pendukung kegiatan pada Lab Fisika/Kimia

b) Transfer Keluar dan Transfer Masuk atas Alat Kedokteran dan Kesehatan senilai masing-masing Rp45.308.000,00 terjadi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka likuidasi asset proses perubahan kewenangan dari Satker Dekonsentrasi menjadi Satker Tugas Pembantuan

c) Likuidasi Keluar dan Likuidasi Masuk atas Alat Kedokteran dan Kesehatan senilai masing-masing Rp138.703.550,00 terjadi disebabkan adanya perubahan kewenangan satker Dekonsentrasi menjadi Satker Tugas Pembantuan, transaksi ini terjadi pada:

Uraian Transaksi	Kuantitas	Nilai
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	200	636.900
Dinas Kelautan Provinsi Kalimantan Barat	8	31.173.000
Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Timur	9	35.862.500
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo	48	20.186.500
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua	63	50.844.650
Jumlah	328	138.703.550

d) Penghentian Aset Dari Penggunaan atas Alat Kedokteran dan Kesehatan senilai total Rp123.572.300,00 terjadi pada:

- Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara senilai Rp83.916.300,00 berupa Binocular Microscope (Alat Kedokteran Patologi Anatomy) dan Vacuum Extractor (Alat Kesehatan Kebidanan Dan Penyakit Kandungan) dalam rangka usulan penghapusan BMN rusak berat
 - Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar senilai total Rp27.756.000,00 berupa 5 unit Gunting Lurus, 1 unit Microtome (Alat Kedokteran Patologi Anatomy) dan 1 unit Proyektor Romad Complet dalam rangka usulan penghapusan BMN rusak berat
 - Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon senilai Rp11.900.000,00 berupa 2 unit Mobile Operating Lamp, 2 unit Refractometer (Alat Kedokteran Mata) dan 8 unit Test Tube Box dalam rangka usulan penghapusan BMN rusak berat
- Alat Kedokteran dan Kesehatan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 148 unit dengan nilai sebesar Rp443.009.830,00.

Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan pada Laporan Barang Pengguna per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp22.529.534.349,00

Rincian transaksi atas mutasi BMN berupa alat Laboratorium terdapat pada beberapa satker, antara lain:

- a) Transaksi Pembelian atas alat Laboratorium senilai Rp386.519.200,00 terjadi pada:
- Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee berupa 1 unit Refrigerator/Freezer senilai Rp4.750.000,00
 - Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung senilai total Rp97.569.200,00 berupa Burette, Freezer (Alat Laboratorium Pertanian), Micro Pippettes, Refrigerator, Rod Blower dan TV Monitor
 - Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar berupa 1 unit Komponen/Alat Pengolah Data senilai Rp99.700.000,00 dalam hal ini terjadi kesalahan kodefikasi dan kuantitas barang

yang selanjutnya dilakukan penyesuaian berdasarkan surat keterangan nomor B.1276/BPBAPT/TU.100/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 dengan rincian :

SEMULA			MENJADI			
Kode Barang	Nama Barang	Nilai	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Nilai
3000158009	Komponen/Alat Pengolah Data	99.700.000	3100102000	Lap top	1	24.100.000
			3100102000	Lap top	2	35.100.000
			3100201000	Printer (Peralatan Personal Computer)	2	9.400.000
			3060345001	Scanner Facsimile	3	21.000.000
			3100102009	Tablet PC	2	12.100.000
	JUMLAH	99.700.000		JUMLAH		99.700.000

- Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Keckerangan Karangasem senilai total Rp127.500.000,00 berupa 2 unit Refrigerator, 2 unit Rod Blower dan 1 unit TV Monitor
 - Balai Perikanan Budidaya Laut Batam senilai Rp57.000.000,00 berupa Pompa Airasil dan Turbidity Meter
- b) Transfer Masuk dan Transfer Keluar atas Alat Laboratorium senilai masing-masing Rp22.704.810,00 terjadi pada:
- Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo perolehan dari Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara berupa 3 unit Refrigerator/Freezer senilai total Rp11.678.310,00 sesuai dengan BAST nomor B1297/BBPBAPJ/PL.760/III/2024 tanggal 19 Maret 2024
 - Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepulauan Bangka Belitung senilai Rp11.026.500,00 dalam rangka perubahan kewenangan Satker Dekonsentrasi menjadi Satker Tugas Pembantuan.
- c) Likuidasi Keluar dan Likuidasi Masuk atas Alat Laboratorium senilai masing-masing Rp2.743.701.364,00 terjadi disebabkan adanya perubahan kewenangan satker Dekonsentrasi menjadi Satker Tugas Pembantuan, transaksi ini terjadi pada:

Uraian Transaksi	Kuantitas	Nilai
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	69	10.562.890
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi	12	231.150.000
Dinas Kelautan Provinsi Kalimantan Barat	60	123.229.000
Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan	14	257.250.000
Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Utara	93	477.850.000

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua	183	1.234.927.952
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo	154	408.731.522
Jumlah	585	2.743.701.364

- d) Internal Transfer Masuk dan Internal Transfer Keluar atas Alat Laboratorium senilai Rp260.827.000,00 terjadi pada Setditjen Perikanan Budidaya yang diserahkan dari UAPKPB Dit Kawasan dan Kesehatan Ikan berupa 10 unit Stabilizer/UPS, 2 unit Tripod dan 5 unit Waterbath (Shake, Still) dalam rangka usulan penghapusan BMN rusak berat secara terpadu.
- e) Koreksi Pencatatan atas Alat laboratorium senilai Rp99.700.000,00 terjadi pada Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar berupa 1 unit Komponen/Alat Pengolah Data dalam rangka penyesuaian kesalahan kodefikasi dan kuantitas perekaman BAST modul komitmen dengan rincian sebagai berikut:

SEMULA			MENJADI			
Kode Barang	Nama Barang	Nilai	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Nilai
3080158069	Komponen/Alat Pengolah Data	99.700.000	3100102000	Lap-top	1	24.300.000
			3100102000	Lap-top	2	33.100.000
			3100201000	Printer (Peralatan Personal Computer)	2	9.400.000
			3060345001	Scanner Fasimile	3	21.000.000
			3100102009	Tablet PC	2	12.100.000
	JUMLAH	99.700.000		JUMLAH		99.700.000

- f) Penghentiaan Aset Dari Penggunaan atas Alat Laboratorium senilai total Rp2.483.319.538,00 terjadi pada:
- Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang senilai total Rp1.030.947.459,00 berupa Alat Laboratorium Tekanan Dan Suhu Lainnya, Alat Laboratorium Umum Lainnya, Autoclave (Alat Laboratorium Umum), Automatic Burete, Blender, Buret/Peralatan Titiasi, Burete, Centrifuge Hematocrit, Desicator, DO Meter (Alat Laboratorium Kualitas Air Dan Tanah), DO Meter (Alat Laboratorium Pertanian), Freezer (Alat Laboratorium Patologi), Hot Plate Stirer, Hot Plate Stirrer, Incubator (Alat Laboratorium Umum), Mesin Waste Water Purification, Micro Pippettes, Microscope, Microscope Tringular, Oven (Alat Laboratorium Umum), PH Meter (Alat Laboratorium Umum), Pippet Machine,

Refractometer (Alat Laboratorium Umum), Rod Blower, Salino Meter, Timbangan Elektronik, Uninterrupted Power Supply (UPS) dan Water Quality Checker dalam rangka usulan penghapusan BMN rusak berat

- Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara senilai total Rp349.998.404,00 berupa Analytical Balance (Alat Laboratorium Mikrobiologi), Autoclave (Alat Laboratorium Umum), Dissolved Oksigen Analyzer, Fotometer, Freezer (Alat Laboratorium Patologi), High Performance Liquid Chromatography (HPLC), Ice Maker (Alat Laboratorium Makanan), Micro Pippettes, Microcentrifuge, Mikroskop Dengan Camera, Oven (Alat Laboratorium Umum), PH Meter (Alat Laboratorium Umum), Stiring Hot Plat, Timer (Alat Laboratorium Hematologi) dan Water Distillation Purifier dalam rangka usulan penghapusan BMN rusak berat
- Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar senilai total Rp698.298.883,00 berupa Water Distillation Purifier, Autoclave (Alat Laboratorium Umum), Bak Aquarium, Bak Fiberglass, Filter Press, Freezer (Alat Laboratorium Pertanian), Generator Set (Lab Scale), Laminar Air Flow Cabinet, Micro Pippettes, Microscope, Mobile Lab. Met System Sands Shelter & Test Book, Neraca Analitis Kalibrator, Pressure Gauge (Alat Laboratorium Tekanan Dan Suhu), Refrigerator/Freezer, Rod Blower, Staining Jar dan Turbidity Meter dalam rangka usulan penghapusan BMN rusak berat
- Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon senilai total senilai total Rp389.842.552,00 berupa Aquarium (Alat Laboratorium Biologi), Bunsen Burner & Kelengkapannya, Centrifuge (Alat Laboratorium Umum), Chip Clasifier, Disseting Set, Filter Cartigges, Haemocytometer, Higromoter, Hot Plate Stirer, Laboratory Chemical Pack Standards, Magnetic Stirer & Rod With Hot Plate, Multi Meter / AVO Meter, PH Meter Digital, Photo Meter, Stabilizer, Tool Grinding For Woodworking

Knives, Triple Beam Balance, Vacum Pump dan Water Quality Checker dalam rangka usulan penghapusan BMN rusak berat

- Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem senilai total Rp14.232.240,00 berupa 24 unit Beaker, 20 unit Beaker Low, 100 unit Mobile Lab. Spare Bottles For Grab Samplers dan 106 unit Petri Dish dalam rangka usulan penghapusan BMN rusak berat

Alat Laboratorium yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 1.813 unit dengan nilai sebesar Rp7.933.166.745,00

Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium pada Laporan Barang Pengguna per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp260.526.529.007,00

Rincian transaksi atas mutasi BMN berupa Alat Persenjataan terdapat pada beberapa satker, antara lain:

- Pembelian atas Alat Persenjataan senilai Rp32.300.000,00 terjadi pada Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi berupa 1 unit Kamera Digital, dalam transaksi ini terjadi kesalahan pemilihan kodefikasi barang dimana seharusnya tercatat sebagai Camera Digital (alat studio, komunikasi dan pemancar)
- Transfer Masuk dan Transfer Keluar atas Alat persenjataan senilai masing-masing Rp90.000 berupa 2 buah golok terjadi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka likuidasi perubahan Kewenangan kode Satker dari Satker Dekonsentrasi menjadi Satker Tugas Pembantuan.
- Likuidasi Masuk dan Likuidasi Keluar atas Alat Persenjataan senilai masing-masing Rp32.440.000,00 terjadi disebabkan adanya perubahan kewenangan satker Dekonsentrasi menjadi Satker Tugas Pembantuan, transaksi ini terjadi pada:

Uraian Transaksi	Kuantitas	Nilai
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi	2	5.000.000
Dinas Kelautan Provinsi Kalimantan Barat	1	14.800.00
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara	4	5.600.000

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo	1	7.040.000
Jumlah	8	17.640.000

d) Koreksi Pencatatan atas Alat Persenjataan senilai Rp32.300.000,00 terjadi pada Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi berupa 1 unit kamera Digital yang di catat kembali sebagai perolehan lainnya Camera Digital (3.06) dalam hal ini terjadi kesalahan penggunaan menu perbaikan kodefikasi barang yang seharusnya menggunakan reklasifikasi keluar dan reklasifikasi masuk tetapi menggunakan koreksi pencatatan dan perolehan lainnya.

Alat Persenjataan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 15 unit dengan nilai sebesar Rp46.250.000,00

Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan pada Laporan Barang Pengguna per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp14.400.605.042,00.

Rincian transaksi atas mutasi BMN berupa komputer terdapat pada beberapa satker, antara lain:

- a) Transaksi Perolehan Saldo Awal atas Komputer senilai total Rp16.400.000,00 terjadi pada Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin berupa 6 unit Printer (Peralatan Personal Komputer) yang merupakan tindak lanjut Hasil Audit Kinerja inspektorat III KKP nomor T.209/ITJ/HP.110/VI/2024 tanggal 11 Juni 2023 dimana Terdapat pertanggungjawaban belanja pemeliharaan peralatan dan Mesin yang menghasilkan aset
- b) Pembelian atas Komputer senilai total Rp908.822.520,00 terjadi pada beberapa satker antara lain:
 - Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya berupa 2 unit laptop dan 2 unit Tablet PC senilai total Rp41.279.920,00 sebagai sarana pendukung pelaksanaan kegiatan perkantoran bagian Keuangan dan Umum.
 - Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi senilai total Rp38.000.000,00 berupa 2 unit Lap Top dan 3 unit Printer (Peralatan Personal Komputer)
 - Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang berupa 2 unit Scanner (Peralatan Personal Komputer) EPSON DS 1630 senilai total Rp13.394.600,00 yang dipergunakan

sebagai sarana pendukung administrasi pada BUBK Kebumen dan ruang Kerja PBJ.

- Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara senilai total Rp78.300.000,00 berupa 6 unit Printer (Peralatan Personal Komputer), 5 unit Note Book dan 4 unit Lap Top
 - Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo senilai total Rp99.760.000,00 berupa 6 unit Lap Top dan 1 unit P.C Unit
 - Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee senilai total Rp124.125.000,00 berupa 1 unit Komputer Unit Lainnya, 1 unit Personal Komputer Lainnya dan 5 unit Lap Top
 - Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam senilai total Rp102.500.000,00 berupa 1 unit router, 1 unit Scanner (Peralatan Personal Komputer), 1 unit Printer (Peralatan Personal Komputer) dan 6 unit Lap Top
 - Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung senilai total Rp99.850.000,00 berupa 2 unit Scanner (Peralatan Personal Komputer), 3 unit Printer (Peralatan Personal Komputer), 4 unit Lap Top dan 4 unit P.C Unit
 - Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin senilai total Rp96.500.000,00 berupa 4 unit Lap Top, 1 unit Monitor dan 2 unit Scanner (Peralatan Personal Komputer)
 - Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Keheranan Karangasem senilai total Rp80.540.000,00 berupa 3 unit Note Book dan 2 unit P.C Unit
 - Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok senilai total Rp96.800.000,00 berupa 7 unit Note Book
 - Balai Perikanan Budidaya Laut Batam senilai total Rp37.773.000,00 berupa 3 unit Lap Top dan 3 unit Printer (Peralatan Personal Komputer)
- c) Perolehan Lainnya atas Komputer senilai total Rp78.700.000,00 adalah tindak lanjut atas kesalahan kodefikasi dan kuantitas Komponen/Alat Pengolah Data (3.08) yang dilakukan kreksi

- pencatatan dan Sebagian dicatat Kembali berupa 3 unit Lap Top, 2 unit Printer (Peralatan Personal Komputer) dan 2 unit Tablet PC
- e) Likuidasi Masuk dan Likuidasi Keluar atas Komputer senilai masing- masing Rp1.040.475.744,00 terjadi disebabkan adanya perubahan kewenangan satker Dekonsentrasi menjadi Satker Tugas Pembantuan.
- d) Internal Transfer Masuk dan Internal Transfer Keluar senilai masing- masing Rp389.095.200,00 terjadi pada Setditjen Perikanan Budidaya yang diserahkan dari UAPKPB Dit Kawasan dan Kesehatan Ikan berupa 16 unit Note Book, 4 unit P.C Unit dan 3 unit Printer (Peralatan Personal Komputer) dalam rangka usulan penghapusan BMN rusak berat secara terpadu.
- e) Penghentian Aset Dari Penggunaan atas Komputer senilai total Rp803.256.680,00 terjadi pada:
- Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang senilai total Rp248.531.080,00 berupa 2 unit Lap Top, 1 unit Note Book, 17 unit P.C Unit dan 15 unit Printer (Peralatan Personal Komputer), dalam rangka usulan penghapusan BMN rusak berat
 - Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar senilai total Rp183.725.000,00 berupa 9 unit Note Book, 4 unit P.C Unit, 1 unit Peralatan Jaringan Lainnya dan 9 unit Printer (Peralatan Personal Komputer) dalam rangka usulan penghapusan BMN rusak berat
 - Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon senilai total Rp371.000.600,00 berupa 27 unit Lap Top dan 1 unit Note Book dalam rangka usulan penghapusan BMN rusak berat
- Komputer yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 347 unit dengan nilai sebesar Rp2.846.443.385,00
- Akumulasi Penyusutan komputer pada Laporan Barang Pengguna per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp24.338.485.415,00.

Rincian transaksi atas mutasi BMN berupa Alat Keselamatan Kerja terdapat pada beberapa satker, antara lain:

- a) Transfer Keluar dan Transfer Masuk atas Alat Keselamatan Kerja senilai masing-masing Rp1.194.000,00 berupa 12 unit Baju Anti Panas, transaksi ini terjadi pada terjadi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka likuidasi perubahan Kewenangan kode Satker dari Satker Dekonsentrasi menjadi Satker Tugas Pembantuan.
- b) Likuidasi Keluar dan Likuidasi Masuk senilai masing-masing Rp77.649.930,00 terjadi disebabkan adanya perubahan kewenangan satker Dekonsentrasi menjadi Satker Tugas Pembantuan.

Alat Keselamatan Kerja yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 20 unit dengan nilai sebesar Rp71.650.000,00

Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja pada Laporan Barang Pengguna per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp2.235.137.997,00

Rincian transaksi atas mutasi BMN berupa Peralatan Proses/Produksi terdapat pada beberapa satker, antara lain:

- a) Perolehan Saldo Awal atas Peralatan Proses/Produksi senilai Rp4.487.791.050,00 terjadi pada Setditjen Perikanan Budidaya UAPKPB Dit Kawasan dan Kesehatan Ikan berupa 3 unit Centrifugal Pump sebagai tindak lanjut pendetailan penyelesaian kontrak pengadaan konstruksi BUBK Kebumen Tahap II.
- b) Pembelian atas Peralatan Proses/Produksi senilai total Rp2.296.749.630,00 terjadi pada :
 - Setditjen Perikanan Budidaya UAPKPB Dit Kawasan dan Kesehatan Ikan senilai Rp1.784.720.000,00 berupa 54 unit Submersible Pump

- Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi senilai Rp130.700.000,00 berupa 4 unit Blower dan 1 unit Submersible Pump
 - Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang senilai Rp287.331.500,00 berupa 10 unit Submersible Pump sebagai sarana pendukung kegiatan pembesaran udang pada instalasi BUBK Kebumen dan 5 unit Centrifugal Pump sebagai sarana pendukung produksi pada Budidaya Ikan Nila Salin.
 - Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung berupa 1 unit Submersible Pump senilai Rp23.346.630,00

 - Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon senilai Rp70.651.500,00 berupa 2 unit Blower dan 1 unit Centrifugal Pump
- c) atas Peralatan Proses/Produksi senilai masing-masing Rp214.204.590,00 terjadi antara:
- Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo perolehan dari Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara berupa 5 unit Submersible Pump senilai Rp176.344.590,00 sesuai BAST Nomor B1297/BBPBAPJ/PL.760/III/2024 tanggal 19 Maret 2024
 - Balai Perikanan Budidaya Laut Batam perolehan dari Setditjen Perikanan Budidaya UAPKPB Dit Kawasan dan Kesehatan Ikan berupa 1 unit Centrifugal Pump senilai Rp36.610.000,00
 - Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepulauan Bangka Belitung senilai Rp1.250.000,00 berupa 25 unit Beg Filter dalam rangka perubahan kewenangan Satker Dekonsentrasi menjadi Satker Tugas Pembantuan
- d) Likuidasi Masuk dan Likuidasi Keluar atas Peralatan Proses/Produksi senilai masing-masing Rp293.973.000,00 terjadi disebabkan adanya perubahan kewenangan satker Dekonsentrasi menjadi Satker Tugas Pembantuan.

e) Penghentian Aset Dari Penggunaan atas Peralatan Proses/Produksi senilai total Rp1.092.064.310,00 terjadi pada:

- Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang senilai Rp668.964.310,00 berupa 115 unit Aerator dan 8 unit Submersible Pump dalam rangka usulan penghapusan BMN rusak berat
- Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar senilai Rp423.100.000,00 berupa 42 unit Aerator dan 2 unit Blower dalam rangka usulan penghapusan BMN rusak berat

Peralatan Proses/Produksi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 342 unit dengan nilai sebesar Rp2.573.555.930,00

Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi pada Laporan Barang Pengguna per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp41.874.478.865,00.

Rincian transaksi atas mutasi BMN berupa Peralatan Olah Raga terdapat pada beberapa satker, antara lain:

a) Pembelian atas Peralatan olah Raga senilai total Rp54.616.450,00 terjadi pada:

- Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee senilai Rp11.276.500,00 berupa 1 unit Alat Tenis Meja dan 2 unit Peralatan Permainan Lainnya
- Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung senilai Rp43.339.950,00 berupa Motor penarik/Speed Boat

b) Transfer Masuk dan Transfer Keluar atas Peralatan Olah Raga berupa 1 unit Alat Tenis Meja senilai Rp50.000,00 terjadi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka perubahan kewenangan Satker Dekonsentrasi menjadi Satker Tugas Pembantuan

Peralatan Olah Raga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00.

Akumulasi Penyusutan Peralatan Olah Raga pada Laporan Barang Pengguna per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp148.883.475,00.

*Gedung dan Bangunan
Rp1.296.414.510.000,00*

C.15 Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.296.414.510.000,00 dan Rp1.347.325.198.064,00.

Ringkasan transaksi mutasi Gedung dan Bangunan disajikan dalam tabel berikut ini.

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	1.347.325.198.064
Mutasi tambah:	
Saldo Awal	9.061.679.951
Pembelian	494.600.000
Reklasifikasi Masuk	6.701.756.544
Penyelesaian Pembangunan Langsung	218.400.000
Likuidasi masuk	32.897.062.677
Koreksi pencatatan bertambah	730.052.940
Pengembangan melalui KDP	367.931.899
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	62.160.305.745
Hibah Keluar	342.726.000
Reklasifikasi Keluar	6.701.756.544
Koreksi Pencatatan	680.052.940
Likuidasi keluar	32.897.062.677
Penghentian Aset dari penggunaan	414.755.678

Saldo per 30 Juni 2024	1.294.600.022.491
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	-246.259.513.505
Nilai Buku per 30 Juni 2024	1.048.340.508.986

Rincian transaksi atas mutasi BMN berupa Bangunan Gedung terdapat pada beberapa satker, antara lain:

- a) Transaksi Perolehan Saldo Awal atas Bangunan Gedung senilai total Rp9.078.879.951,00 terjadi pada:
- Setditjen Perikanan Budidaya UAPKPB Dit Kawasan dan Kesehatan Ikan senilai total Rp9.061.679.951,00 berupa 2 unit Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen, 1 unit Bangunan Terbuka Lainnya, dan 2 unit Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen yang merupakan tindak lanjut atas pendetailan penyelesaian pengadaan Konstruksi BUBK Kebumen Tahap II
 - Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin berupa 1 unit Bangunan Gazebo senilai Rp17.200.000,00 yang merupakan tindak lanjut Hasil Audit Kinerja inspektorat III KKP nomor T.209/ITJ/HP.110/VI/2024 tanggal 11 Juni 2023 dimana Terdapat pertanggungjawaban belanja pemeliharaan peralatan dan Mesin yang menghasilkan aset
- b) Pembelian atas Bangunan Gedung senilai Rp494.600.000,00 terjadi pada Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang berupa 2 unit Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen (Box Container Tandem 20 Feed) yang dimanfaatkan sebagai rumah jaga dan gudang pakan instalasi Budidaya Ikan Nila Salin (1 unit Blok D1 dan 1 unit diantara Blok C1 dan C2)
- c) Reklasifikasi keluar dan Reklasifikasi Masuk atas bangunan Gedung senilai total Rp6.122.392.544,00 terjadi pada:
- Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon senilai Rp610.183.162,00 berupa :
 - Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen senilai Rp367.016.162,00 yang di reklas menjadi Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan Permanen

- Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen senilai Rp243.167.000,00 yang di reklas menjadi Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen
 - Balai Perikanan Budidaya Laut Batam senilai total Rp5.512.209.382,00 berupa:
 - Gedung Garasi/Pool Semi Permanen yang di reklas menjadi Bangunan Gudang Tertutup Permanen senilai Rp61.558.000,00 yang merupakan tindak lanjut atas Hasil Audit Kinerja Inspektorat III nomor B.33/ITJ.3/HP.550/I/2024 tanggal 23 Januari 2024
 - 48 unit Mess/Wisma/ Bungalow/ Tempat Peristirahatan Permanen senilai total Rp5.450.651.382,00 yang di reklas menjadi 1 unit Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen dan 47 unit Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen tindak lanjut koreksi kodefikasi barang hasil inventarisasi dengan Berita Acara Inventarisasi dalam rangka penetapan status Golongan Rumah Negara.
- d) Likuidasi Masuk dan Likuidasi Keluar atas Bangunan Gedung senilai total Rp32.358.942.277,00 terjadi disebabkan adanya perubahan kewenangan satker Dekonsentrasi menjadi Satker Tugas Pembantuan.
- e) Transaksi Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah atas Bangunan senilai total Rp680.052.940,00 terjadi pada Balai Perikanan Budidaya Laut Batam yang merupakan tindak lanjut atas Hasil Audit Kinerja Inspektorat III nomor B.33/ITJ.3/HP.550/I/2024 tanggal 23 Januari 2024 berupa Kapitalisasi nilai asset Bangunan Gedung Laboratorium Permanen NUP 1,2,3 dari nilai Rehab Bangunan Laboratorium NUP 7, 8 dan 9.
- f) Pengembangan Melalui KDP atas Bangun Gedung senilai total Rp367.931.899,00 terjadi pada:
- Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo berupa pekerjaan rehab Tambak atas Bangunan Pembesar Ikan NUP 1 senilai Rp218.315.899,00 penyelesaian atas Bangunan dalam Pengerjaan NUP 142.

- Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin berupa Rehabilitasi Asrama Permanen Nup 1 senilai Rp149.616.000,00 penyelesaian atas Bangunan dalam Pengerjaan NUP 10.
- g) Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang atas Bangunan Gedung senilai total Rp62.160.305.745,00 terjadi pada:
- Setditjen Perikanan Budidaya UAPKPB Dit Kawasan dan Kesehatan Ikan berupa koreksi kurang atas bangunan Bangunan Kolam/Bak Ikan senilai Rp62.149.530.186,00. Transaksi ini merupakan tindak lanjut atas pendetailan aset peorlehan pengadaan Konstruksi BUBK Kebumen Tahap II (koreksi nilai aset induk tercatat)
 - Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin senilai Rp1.103.900,00 atas Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen NUP 14 yang merupakan tindak lanjut Hasil Audit Kinerja inspektorat III KKP nomor T.209/ITJ/HP.110/VI/2024 tanggal 11 Juni 2023 berupa kelebihan pembayaran pekerjaan Pekerjaan Peningkatan Prasarana Produksi Calon Induk Gabus Haruan (Fasilitas Pemijahan)
 - Balai Perikanan Budidaya Laut Batam atas Bangunan Gedung Laboratorium Permanen NUP 2 senilai Rp9.671.659,00 yang merupakan tindak lanjut hasil audit kinerja tahun 2024
- h) Hibah Keluar atas Bangunan gedung senilai Rp342.726.000,00 terjadi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten berupa Bangunan Gedung Laboratorium Permanen Nup 5 dan 6 sesuai SK Penghapusan Nomor 580/Kepmen-KP/SJ/PL.750/2024 tanggal 20 Juni 2024
- i) Koreksi Pencatatan atas Bangunan Gedung senilai Rp680.052.940,00 terjadi pada Balai Perikanan Budidaya Laut Batam yang merupakan tindak lanjut atas Hasil Audit Kinerja Inspektorat III nomor B.33/ITJ.3/HP.550/I/2024 tanggal 23 Januari 2024 berupa Kapitalisasi nilai asset Bangunan

Gedung Laboratorium Permanen NUP 1,2,3 dari nilai Rehab Bangunan Laboratorium NUP 7, 8 dan 9.

j) Penghentian Aset Dari Penggunaan atas Bangunan Gedung senilai Rp414.755.678,00 terjadi pada:

- Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo atas Bangunan Kolam/Bak Ikan NUP 33 senilai Rp401.171.678,00 dalam rangka usulan penghapusan BMN rusak berat
- Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam atas Gedung Pos Jaga Permanen NUP 2 senilai Rp13.584.000,00 dalam rangka usulan penghapusan BMN rusak berat

Bangunan Gedung yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional adalah sejumlah 84 unit dengan nilai sebesar Rp4.188.515.626,00.

Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung pada Laporan Barang Pengguna per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp223.810.573.736,00.

Bangunan Menara yang statusnya dalam proses penghapusan atau pemindah tanganan adalah sejumlah 60 unit dengan nilai sebesar Rp12.780.000,00. Likuidasi Masuk dan Likuidasi Keluar atas Bangunan Menara senilai masing- masing Rp151.645.000,00 terjadi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dalam rangka peralihan kewenangan Satker Dekonsentrasi menjadi Satker Tugas Pembantuan.

Bangunan Menara yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 1 unit dengan nilai sebesar Rp31.650.000,00

Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara pada Laporan Barang Pengguna per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp139.276.774,00

Rincian transaksi atas mutasi BMN berupa Tugu Titik Kontrol/Pasti terdapat pada beberapa satker, antara lain:

a) Reklasifikasi Keluar dan Reklasifikasi Masuk atas Tugu Titik Kontrol/Pasti senilai Rp579.364.000,00 terjadi pada Balai

- Perikanan Budidaya Laut Ambon yang semula tercatat sebagai 2 unit Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan di koreksi menjadi 2 unit Pagar Permanen,
- b) Penyelesaian Pembangunan Langsung atas Tugu Titik Kontrol/Pasti senilai Rp218.400.000,00 terjadi pada Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo berupa 1 unit Pagar Semi Permanen yang berlokasi di Instalasi Gelung
- c) Likuidasi Keluar dan Likuidasi Masuk senilai masing-masing Rp426.910.400,00 terjadi disebabkan adanya perubahan kewenangan satker Dekonsentrasi menjadi Satker Tugas Pembantuan, transaksi ini terjadi pada:
- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi senilai Rp52.352.000,00 berupa 1 unit Pagar Lainnya dan 2 unit Jaring Kontrol Pasang Surut Sungai Dan Danau
 - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo senilai Rp374.558.400,00 berupa 2 unit Pagar Permanen dan 2 unit Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan
- c) Perolehan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra terjadi pada Balai Perikanan Budidaya Laut Batam berupa Pagar Lainnya NUP 1 senilai Rp200.000,00 yang berubah menjadi senilai Rp50.000.000,00 akibat penggabungan total 250 NUP menjadi 1 kesatuan dengan nilai awal masing-masing Rp200.000,00
- d) Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah atas Tugu Titik Kontrol/Pasti dengan nilai total penambahan sebesar Rp49.800.000,00 terjadi pada Balai Perikanan Budidaya Laut Batam berupa Pagar Lainnya NUP 1 yang merupakan tindak lanjut atas Hasil Audit Kinerja Inspektorat III nomor B.33/ITJ.3/HP.550/I/2024 tanggal 23 Januari 2024 berupa Reklasifikasi asset pagar lainnya dari 250 NUP menjadi 1 NUP.
- e) Koreksi Pencatatan atas Tugu Titik Kontrol/Pasti senilai total Rp49.800.000,00 terjadi pada Balai Perikanan Budidaya Laut Batam berupa Pagar Lainnya NUP 2 sd 250 yang digabungkan kedalam Pagar Lainnya NUP 1 yang merupakan tindak lanjut atas Hasil Audit Kinerja Inspektorat III nomor

B.33/ITJ.3/HP.550/I/2024 tanggal 23 Januari 2024 berupa Reklasifikasi asset pagar lainnya dari 250 NUP menjadi 1 NUP.

f) Penghapusan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra terjadi pada Balai Perikanan Budidaya Laut Batam berupa Pagar Lainnya NUP 1 senilai Rp200.000,00 yang berubah menjadi senilai Rp50.000.000,00 akibat penggabungan total 250 NUP menjadi 1 kesatuan dengan nilai awal masing-masing Rp200.000,00

Tugu Titik Kontrol/Pasti yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 2 unit dengan nilai sebesar Rp723.735.470,00.

Akumulasi Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti pada Laporan Barang Pengguna per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp3.759.337.538,00.

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp535.147.042.811,00

C.16 Jalan Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp535.147.042.811,00 dan Rp471.105.825.468,00.

Ringkasan transaksi mutasi Jalan Irigasi Jaringan disajikan dalam tabel berikut ini.

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	471.105.825.468
Mutasi tambah:	
Saldo Awal	2.168.622.785
Pembelian	272.587.536
Transfer Masuk	6.009.927.763
Perolehan Lainnya	38.335.136
Penyelesaian pembangunan langsung	760.600.000
Likuidasi masuk	3.571.098.728
Pengembangan Nilai Aset (langsung)	1.047.804.778
Koreksi Pencatatan bertambah	6.199.120.163
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan	6.060.850.299
Likuidasi keluar	3.571.098.728
	-
Saldo per 30 Juni 2024	481.541.973.330
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	-277.183.387.322

Nilai Buku per 20 Juni 2024

203.339.327.111

Rincian transaksi atas mutasi BMN berupa Jalan dan Jembatan terdapat pada beberapa satker, antara lain:

- a) Transaksi Transfer Masuk atas Jalan dan Jembatan terjadi pada Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang berupa Jalan Lainnya seluas 8.994m² senilai Rp6.009.927.763,00 yang diperoleh dari Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
- b) Likuidasi Keluar dan Likuidasi Masuk atas Jalan dan jembatan senilai total Rp247.201.000 terjadi disebabkan adanya perubahan kewenangan satker Dekonsentrasi menjadi Satker Tugas Pembantuan.
- c) Koreksi Perubahan Kuantitas atas Jalan dan Jembatan dengan total penambahan seluas 4.531 m² terjadi pada:
 - Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang pada Jalan Khusus Proyek NUP 7 dengan penambahan seluas 3.911m² dan NUP 14 seluas 280 m² yang merupakan penyesuaian luasan
 - Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok pada Jalan Lainnya NUp 1 dengan penambahan seluas 340 m² yang semula hanya tercatat seluas 1 m² sesuai Surat Keterangan nomor B.1758/BPBL- L/TU.210/IV/2024 tanggal 09 April 2024
- d) Pengembangan Nilai Aset (Langsung) atas Jaln dan Jembatan senilai Rp1.047.804.778,00 terjadi pada Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang pada Jalan Khusus Proyek NUP 1 senilai Rp1.014.893.543,00 dan Jembatan Pada Jalan Khusus Proyek NUP 2 senilai Rp32.911.235,00
- e) Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah atas Jalan dan jembatan senilai total Rp6.186.532.763,00 terjadi pada:
 - Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang atas Jalan Khusus Kompleks NUP 4 senilai Rp3.004.973.000 dan NUP 12 senilai Rp3.004.954.763 yang merupakan kapitalisasi nilai koreksi dari Jalan

Lainnya perolehan transfer masuk dari Setditjen Perikanan Tangkap yang secara fisik berupa ATR/Pengembangan atas jalan Khusus Komplek NUP 4 dan 12

- Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan Serang dengan penambahan senilai Rp176.605.000,00 atas Jalan Khusus Kompleks NUP 2 yang merupakan kapitalisasi atas belanja pemeliharaan memenuhi syarat Kapitalisasi Aset tetap.
- f) Koreksi Pencatatan atas Jalan dan Jembatan terjadi pada Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang berupa Jalan Lainnya seluas 8.994m² senilai Rp6.009.927.763,00 yang diperoleh dari Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang secara fisik berupa ATR/Pengembangan atas jalan Khusus Komplek NUP 4 dan 12 Jalan dan Jembatan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 495 m² dengan nilai sebesar Rp96.837.000,00
- Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan pada Laporan Barang Pengguna per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp28.520.418.402,00.

Rincian transaksi atas mutasi BMN berupa Irigasi terdapat pada beberapa satker, antara lain:

- a) Ttransaksi Pembelian atas irigasi terjadi pada Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara berupa 8 unit Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Irigasi) senilai Rp38.335.136,00 dalam hal ini terjadi kesalahan kuantitas dimana pembangunan atas irigasi terdiri atas 2 unit irigasi dengan panjang 3 mmeter dan 5 meter (satuan tercatat adalah meter)
- b) Perolehan Lainnya atas irigasi terjadi pada Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara berupa 2 unit Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Irigasi) senilai Rp38.335.136,00 yang merupakan tindak lanjut atas kesalahan kuantitas transaksi pembelian 8 meter Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Irigasi).

- c) Penyelesaian Pembangunan Langsung atas irigasi terjadi pada Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo berupa 1 unit Saluran Induk (Bangunan Pembawa Irigasi) senilai Rp760.600.000,00 yang berlokasi pada Instalasi Pasuruan.
- d) Likuidasi Keluar dan Likuidasi Masuk atas irigasi senilai masing-masing Rp3.010.336.931,00 terjadi disebabkan adanya perubahan kewenangan satker Dekonsentrasi menjadi Satker Tugas Pembantuan
- e) Koreksi Pencatatan atas Irigasi terjadi pada Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara berupa 2 unit Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Irigasi) senilai Rp38.335.136,00 yang merupakan tindak lanjut atas kesalahan kuantitas transaksi pembelian 8 meter Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Irigasi).

Irigasi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 58 unit dengan nilai sebesar Rp4.836.187.205,00.

Akumulasi Penyusutan Irigasi pada Laporan Barang Pengguna per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp227.956.494.898,00.

Instalasi yang statusnya sedang dalam proses penghapusan atau pemindah tanganan adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00. Likuidasi Keluar dan Likuidasi Masuk senilai masing-masing Rp117.575.700,00 terjadi pada Dinas KP Provinsi Gorontalo dan Dinas KP Provinsi Jambi dalam rangka perubahan kewenangan Satker Dekonsentrasi menjadi Satker Tugas Pembantuan. Instalasi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 8 unit dengan nilai sebesar Rp242.664.000,00.

Akumulasi Penyusutan Instalasi pada Laporan Barang Pengguna per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp6.354.491.231,00.

Rincian transaksi atas mutasi BMN berupa Jaringan terdapat pada beberapa satker, antara lain:

- a) Transaksi Perolehan Saldo Awal atas Jaringan senilai Rp2.168.622.785,00 terjadi pada Setditjen Perikanan Budidaya UAPKPB Dit Kawasan dan Kesehatan Ikan berupa 1 unit Jaringan Transmisi Tegangan Diatas 300 KVA yang merupakan tindak lanjut atas pendetailan aset perolehan pengadaan Konstruksi BUBK Kebumen Tahap II.
- b) Transaksi Pembelian Atas Jaringan senilai total Rp234.252.400,00 terjadi pada:
- Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang berupa 1 unit Jaringan Transmisi Lainnya (Trafo B&D/3 P, 250KVA, 20Kv/400Kv) senilai Rp109.000.000,00 sebagai saran pendukung peralatan yang berlokasi di Blok D tambak BINS.
 - Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara senilai total Rp125.252.400,00 berupa 28 unit Jaringan Listrik Lainnya (14 batang tiang lampu dan 14 buah lampu jalan) sebagai penerangan area tambak Kluster Mauk.
- c) Likuidasi Keluar dan Likuidasi Masuk atas Jaringan senilai total Rp195.985.097,00 terjadi disebabkan adanya perubahan kewenangan satker Dekonsentrasi menjadi Satker Tugas Pembantuan
- d) Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah atas Jaringan terjadi pada Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara dengan total penambahan senilai Rp12.587.400,00 berupa 14 unit Jaringan Listrik Lainnya (tiang Lampu) yang merupakan pencatatan Kembali nilai 14 unit almpu jalan yang dilakukan koreksi pencatatan dalam rangka penggabungan nilai dengan Tiang lampu.
- e) Koreksi Pencatatan atas Jaringan terjadi pada Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara senilai Rp12.587.400,00 berupa 14 unit Jaringan Listrik Lainnya (Lampu Jalan) yang merupakan koreksi dalam rangka penggabungan nilai dengan Tiang lampu.

Jaringan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 4 unit dengan nilai sebesar Rp141.991.000,00.

Akumulasi Penyusutan Jaringan pada Laporan Barang Pengguna per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp4.935.093.826,00.

Aset Tetap Lainnya
Rp4.657.954.349,00

C.17 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah peralatan dan mesin gedung dan bangunan jalan irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp4.657.954.349,00 dan Rp4.677.754.394,00.

Ringkasan transaksi mutasi Aset tetap Lainnya disajikan dalam tabel berikut ini.

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	4.677.754.349
Mutasi tambah:	
Saldo Awal	45.349.360.058
Likuidasi keluar	126.581.500
Mutasi Kurang:	
Likuidasi keluar	126.581.500
Saldo per 30 Juni 2024	50.027.114.407
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	-94.973.186
Nilai Buku per 30 Juni 2024	49.932.141.221

Bahan Perpustakaan yang statusnya sedang dalam proses penghapusan atau pemindah tangan adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00. Likuidasi Keluar dan Likuidasi Masuk atas BMN berupa bahan perpustakaan senilai masing-masing Rp34.581.500,00 terjadi pada Dinas KP Daerah Provinsi Papua, Dinas KP Provinsi Gorontalo dan Dinas KKP Provinsi Jambi dalam rangka peralihan kewenangan Satker Dekonsentrasi menjadi Satker Tugas Pembantuan.

Bahan Perpustakaan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 23 unit dengan nilai sebesar

Rp75.950.000,00. Akumulasi Penyusutan Bahan Perpustakaan pada Laporan Barang Pengguna per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp0,00.

Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga yang sedang dalam proses penghapusan/pemindah tangan adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00.

Likuidasi Keluar dan Likuidasi Masuk atas BMN berupa bahan perpustakaan senilai masing-masing Rp15.000.000,00 terjadi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dalam rangka peralihan kewenangan Satker Dekonsentrasi menjadi Satker Tugas Pembantuan.

Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 1 unit dengan nilai sebesar Rp34.999.000,00.

Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga pada Laporan Barang Pengguna per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp19.950.200,00.

Rincian transaksi atas mutasi BMN berupa Ikan terdapat pada beberapa satker, antara lain:

- a) Likuidasi Keluar dan Likuidasi Masuk atas Ikan senilai masing-masing Rp20.145.490,00 terjadi pada:
 - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi berupa 1 ekor Ikan Budidaya Lainnya senilai Rp20.000.000,00
 - Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Papua berupa 1 ekor Ikan Air Laut Budidaya senilai Rp145.490,00
Transaksi ini disebabkan adanya peralihan kewenangan Satker Dekonsentrasi menjadi Satker Tugas Pembantuan
- b) Penghentian Aset Dari Penggunaan atas Ikan senilai total Rp60.000.000,00 terjadi pada Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon berupa 10 ekor Ikan Air Laut Budidaya

Ikan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 432 unit dengan nilai sebesar Rp194.712.500,00.

Akumulasi Penyusutan Ikan pada Laporan Barang Pengguna per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp0,00.

Rincian mutasi atas Aset Tetap Renovasi terbagi atas beberapa transaksi yang terjadi pada beberapa satker antara lain:

- a) Transaksi Perolehan Saldo Awal atas Aset Tetap Renovasi senilai total Rp45.349.360.058,00 terjadi pada Setditjen Perikanan Budidaya UAPKPB Dit Kawasan dan Kesehatan Ikan berupa 8 unit Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Renovasi yang merupakan tindak lanjut atas pendetailan aset perolehan pengadaan Konstruksi BUBK Kebumen Tahap II (jajaln area tambah yang akan di gabungkan dengan perolehan di Tahap I yang saat ini sudah tercatat sebagai aset Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang.
- b) Likuidasi Keluar dan Likuidasi Masuk atas Aset Tetap Renovasi senilai RP77.000.000,00 terjadi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Utara berupa Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Renovasi dalam rangka peralihan kewenangan Satker Dekonsentrasi menjadi Satker Tugas Pembantuan.

Aset Tetap Renovasi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Renovasi pada Laporan Barang Pengguna per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp149.756.435,00.

C.18 Konstruksi Dalam Pengerjaan

*Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Rp18.362.887.715,00*

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp18.362.887.715,00 dan Rp1.552.206.900,00 yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) berasal sebagaimana tabel berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	1.552.206.900
Mutasi tambah:	
Perolehan/Penambahan KDP	3.258.368.665
Pengembanagna KDP	8.953.688.041
Perolehan lainnya KDP	52.708.253
Mutasi Kurang:	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	1.208.900.000
Pengembangan melalui KDP	367.931.899
Penghapusan KDP	133.144.000
Koreksi Nilai KDP berkurang	52.708.253
Saldo per 30 Juni 2024	12.054.287.707

Rincian transaksi atas mutasi BMN berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan terdapat pada beberapa satker, antara lain:

1. Mutasi atas Perolehan KDP Tahun 2024.
 - a) Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan berupa Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan senilai Rp1.208.900.000,00 berupa pengadaan Excavator yang langsung di reklasifikasi menjadi barang jadi, hal ini disebabkan karena adanya kesalahan pemilihan kodefikasi barang dimana seharusnya tercatat sebagai aset tetap tetapi tercatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan.
 - b) Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi
 - Gedung dan bangunan dalam pengerjaan nomor urut aset:
 - o 120 berupa DED pembangunan dengan nilai perolehan awal Rp305.250.000,00 dan nilai

- pengembangan senilai Rp915.750.000,00 yang masih akan dilanjutkan pekerjaannya
- o 121 berupa DED pembangunan dengan nilai perolehan awal Rp53.739.500,00 yang masih akan dilanjutkan pekerjaannya
 - Jalan dalam pengerjaan no urut aset 1 berupa DED pembangunan dengan nilai perolehan awal Rp20.000.000,00 yang masih akan dilanjutkan pekerjaannya
 - Irigasi dalam pengerjaan no urut aset 2 berupa DED pembangunan dengan nilai perolehan awal Rp20.000.000,00 yang masih akan dilanjutkan pekerjaannya
- c) Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang
- Gedung dan bangunan dalam pekerjaan nomor urut aset:
 - o 163 berupa DED pembangunan dengan nilai perolehan awal Rp426.000,00 dan nilai pengembangan senilai Rp38.875.400,00 yang masih akan dilanjutkan pekerjaannya
 - o 164 berupa DED pembangunan dengan nilai perolehan awal Rp426.000,00 dan nilai pengembangan senilai Rp38.875.400,00 yang masih akan dilanjutkan pekerjaannya
 - o 165 berupa DED pembangunan dengan nilai perolehan awal Rp426.000,00 dan nilai pengembangan senilai Rp38.875.400,00 yang masih akan dilanjutkan pekerjaannya
 - o 166 berupa DED pembangunan dengan nilai perolehan awal Rp426.000,00 dan nilai pengembangan senilai Rp38.875.400,00 yang masih akan dilanjutkan pekerjaannya.

- o 167 berupa DED pembangunan dengan nilai perolehan awal Rp426.000,00 dan nilai pengembangan senilai Rp38.875.400,00 yang masih akan dilanjutkan pekerjaannya
- o 168 berupa DED pembangunan dengan nilai perolehan awal Rp426.000,00 dan nilai pengembangan senilai Rp38.875.400,00 yang masih akan dilanjutkan pekerjaannya
- o 169 berupa DED pembangunan dengan nilai perolehan awal Rp426.000,00 dan nilai pengembangan senilai Rp38.875.400,00 yang masih akan dilanjutkan pekerjaannya
- o 170 berupa DED pembangunan dengan nilai perolehan awal Rp426.000,00 dan nilai pengembangan senilai Rp38.875.400,00 yang masih akan dilanjutkan pekerjaannya
- o 171 berupa DED pembangunan dengan nilai perolehan awal Rp426.000,00 dan nilai pengembangan senilai Rp38.875.400,00 yang masih akan dilanjutkan pekerjaannya
- o 172 berupa DED pembangunan dengan nilai perolehan awal Rp426.000,00 dan nilai pengembangan senilai Rp38.875.400,00 yang masih akan dilanjutkan pekerjaannya
- o 173 berupa DED pembangunan dengan nilai perolehan awal Rp426.000,00 dan nilai pengembangan senilai Rp38.875.400,00 yang masih akan dilanjutkan pekerjaannya
- o 174 berupa DED pembangunan dengan nilai perolehan awal Rp426.000,00 dan nilai pengembangan senilai Rp38.875.400,00 yang masih akan dilanjutkan pekerjaannya
- o 175 berupa DED pembangunan dengan nilai perolehan awal Rp426.000,00 dan nilai

- pengembangan senilai Rp38.875.400,00 yang masih akan dilanjutkan pekerjaannya
- o 176 berupa DED pembangunan dengan nilai perolehan awal Rp426.000,00 dan nilai pengembangan senilai Rp38.875.400,00 yang masih akan dilanjutkan pekerjaannya
 - o 177 berupa DED pembangunan dengan nilai perolehan awal Rp436.000,00 dan nilai pengembangan senilai Rp39.001.400,00 yang masih akan dilanjutkan pekerjaannya

 - o 178 berupa DED pembangunan dengan nilai perolehan awal Rp143.000,00 dan nilai pengembangan senilai Rp24.622.750,00 yang masih akan dilanjutkan pekerjaannya
 - o 179 berupa DED pembangunan dengan nilai perolehan awal Rp143.000,00 dan nilai pengembangan senilai Rp24.622.748,00 yang masih akan dilanjutkan pekerjaannya
 - o 180 berupa DED pembangunan dengan nilai perolehan awal Rp143.000,00 dan nilai pengembangan senilai Rp24.622.748,00 yang masih akan dilanjutkan pekerjaannya
 - o 181 berupa DED pembangunan dengan nilai perolehan awal Rp143.000,00 dan nilai pengembangan senilai Rp24.622.748,00 yang masih akan dilanjutkan pekerjaannya
 - o 182 berupa DED pembangunan dengan nilai perolehan awal Rp143.000,00 dan nilai pengembangan senilai Rp23.204.115,00 yang masih akan dilanjutkan pekerjaannya
 - o 183 berupa DED pembangunan dengan nilai perolehan awal Rp143.000,00 dan nilai

- pengembangan senilai Rp23.204.112,00 yang masih akan dilanjutkan pekerjaannya
- o 184 berupa DED pembangunan dengan nilai perolehan awal Rp143.000,00 dan nilai pengembangan senilai Rp23.204.112,00 yang masih akan dilanjutkan pekerjaannya
 - o 185 berupa DED pembangunan dengan nilai perolehan awal Rp143.000,00 dan nilai pengembangan senilai Rp23.204.112,00 yang masih akan dilanjutkan pekerjaannya
 - o 186 berupa DED pembangunan dengan nilai perolehan awal Rp143.000,00 dan nilai pengembangan senilai Rp17.028.432,00 yang masih akan dilanjutkan pekerjaannya
 - o 187 berupa DED pembangunan dengan nilai perolehan awal Rp143.000,00 dan nilai pengembangan senilai Rp17.028.432,00 yang masih akan dilanjutkan pekerjaannya
 - o 188 berupa DED pembangunan dengan nilai perolehan awal Rp143.000,00 dan nilai pengembangan senilai Rp17.028.432,00 yang masih akan dilanjutkan pekerjaannya
 - o 189 berupa DED pembangunan dengan nilai perolehan awal Rp143.000,00 dan nilai pengembangan senilai Rp17.028.432,00 yang masih akan dilanjutkan pekerjaannya
 - o 190 berupa DED pembangunan dengan nilai perolehan awal Rp143.000,00 dan nilai pengembangan senilai Rp17.028.432,00 yang masih akan dilanjutkan pekerjaannya
 - o 191 berupa DED pembangunan dengan nilai perolehan awal Rp143.000,00 dan nilai pengembangan senilai Rp17.028.432,00 yang masih akan dilanjutkan pekerjaannya

- o 192 berupa DED pembangunan dengan nilai perolehan awal Rp143.000,00 dan nilai pengembangan senilai Rp16.978.432,00 yang masih akan dilanjutkan pekerjaannya
- o 193 berupa DED pembangunan dengan nilai perolehan awal Rp143.000,00 dan nilai pengembangan senilai Rp15.175.432,00 yang masih akan dilanjutkan pekerjaannya
- o 194 berupa DED pembangunan dengan nilai perolehan awal Rp143.000,00 dan nilai pengembangan senilai Rp15.175.432,00 yang masih akan dilanjutkan pekerjaannya
- o 195 berupa DED pembangunan dengan nilai perolehan awal Rp143.000,00 dan nilai pengembangan senilai Rp15.175.432,00 yang masih akan dilanjutkan pekerjaannya
- o 196 berupa DED pembangunan dengan nilai perolehan awal Rp143.000,00 dan nilai pengembangan senilai Rp15.175.432,00 yang masih akan dilanjutkan pekerjaannya
- o 197 berupa DED pembangunan dengan nilai perolehan awal Rp143.000,00 dan nilai pengembangan senilai Rp15.175.432,00 yang masih akan dilanjutkan pekerjaannya
- o 198 berupa DED pembangunan dengan nilai perolehan awal Rp143.000,00 dan nilai pengembangan senilai Rp15.175.432,00 yang masih akan dilanjutkan pekerjaannya
- o 199 berupa DED pembangunan dengan nilai perolehan awal Rp143.000,00 dan nilai pengembangan senilai Rp15.175.432,00 yang masih akan dilanjutkan pekerjaannya
- o 200 berupa DED pembangunan dengan nilai perolehan awal Rp143.000,00 dan nilai

- pengembangan senilai Rp15.175.432,00 yang masih akan dilanjutkan pekerjaannya
- o 201 berupa DED pembangunan dengan nilai perolehan awal Rp143.000,00 dan nilai pengembangan senilai Rp15.175.432,00 yang masih akan dilanjutkan pekerjaannya
 - o 202 berupa DED pembangunan dengan nilai perolehan awal Rp143.000,00 dan nilai pengembangan senilai Rp15.175.432,00 yang masih akan dilanjutkan pekerjaannya
 - o 203 berupa DED pembangunan dengan nilai perolehan awal Rp143.000,00 dan nilai pengembangan senilai Rp15.175.432,00 yang masih akan dilanjutkan pekerjaannya
 - o 204 berupa DED pembangunan dengan nilai perolehan awal Rp143.000,00 dan nilai pengembangan senilai Rp15.175.432,00 yang masih akan dilanjutkan pekerjaannya
 - o 205 berupa DED pembangunan dengan nilai perolehan awal Rp143.000,00 dan nilai pengembangan senilai Rp15.175.432,00 yang masih akan dilanjutkan pekerjaannya
 - o 206 berupa DED pembangunan dengan nilai perolehan awal Rp143.000,00 dan nilai pengembangan senilai Rp15.175.432,00 yang masih akan dilanjutkan pekerjaannya
 - o 207 berupa DED pembangunan dengan nilai perolehan awal Rp143.000,00 dan nilai pengembangan senilai Rp15.537.972,00 yang masih akan dilanjutkan pekerjaannya
- Jalan dalam Pengerjaan nomor urut 2 berupa DED pembangunan ... dengan nilai perolehan awal senilai Rp739.012.575,00 dan nilai pengembangan senilai

Rp4.813.299.750,00 yang masih akan dilanjutkan pekerjaannya

- Irigasi Dalam pengerjaan dengan nomor urut aset:
 - o 1 berupa DED pembangunan dengan nilai perolehan awal senilai Rp8.008.300,00 dan nilai pengembangan senilai Rp1.277.900.525,00 yang masih akan dilanjutkan pekerjaannya
 - o 2 berupa DED pembangunan dengan nilai perolehan awal senilai Rp3.375.000,00 dan nilai pengembangan senilai Rp13.498.000,00 yang masih akan dilanjutkan pekerjaannya
- d) Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo berupa Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan dengan nomor urut asset:
 - 142 berupa DED pembangunan dengan nilai perolehan awal senilai Rp12.643.899,00 dan nilai pengembangan senilai Rp205.672.000,00 dan telah di Reklasifikasi menjadi Barang Jadi
 - 143 berupa DED pembangunan dengan nilai perolehan awal senilai Rp84.235.000,00 yang masih akan dilanjutkan pekerjaannya
- e) Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam
 - Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan dengan nomor urut asset:
 - o 151 berupa DED pembangunan dengan nilai perolehan awal senilai Rp76.724.000,00 dan nilai pengembangan senilai Rp80.427.468,00 yang masih akan dilanjutkan pekerjaannya, Atas KDP ini dilakukan koreksi nilai berkurang senilai Rp52.708.253
 - o 152 berupa DED pembangunan dengan nilai perolehan awal senilai Rp75.657.000,00 yang masih akan dilanjutkan pekerjaannya.
 - Jalan Dalam Pengerjaan dengan nomor urut asset 16 berupa DED Pembangunan dengan nilai perolehan

awal senilai Rp120.192.890,00 yang masih akan dilanjutkan pekerjaannya.

- Irigasi Dalam pengerjaan nomor urut aset 3 berupa DED pembangunan dengan nilai perolehan awal senilai Rp17.583.808,00 dan nilai pengembangan senilai Rp105.472.716,00 yang masih akan dilanjutkan pekerjaannya.
- f) Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin yaitu Gedung Dalam Pengerjaan dengan nomor urut aset 10 berupa pekerjaan dengan nilai perolehan awal senilai Rp142.135.200,00 dan nilai pengembangan senilai Rp7.480.800 yang telah dilakukan Reklasifikasi menjadi Barang Jadi
- g) Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu yaitu Gedung Dalam Pengerjaan dengan nomor urut aset 1 berupa pekerjaan dengan nilai perolehan awal senilai Rp199.178.889,00 dan nilai pengembangan senilai Rp11.000.000,00 yang masih akan dilanjutkan pekerjaannya
- h) Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar yaitu Gedung Dalam Pengerjaan dengan nomor urut aset:
- 101 berupa pekerjaan dengan nilai perolehan awal senilai Rp60.583.600,00 yang masih akan dilanjutkan pekerjaannya .
 - 102 berupa pekerjaan dengan nilai perolehan awal senilai Rp37.243.004,00 yang masih akan dilanjutkan pekerjaannya.
- i) Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon yaitu Gedung Dalam Pengerjaan dengan nomor urut aset:
- 45 berupa pekerjaan dengan nilai perolehan awal senilai Rp38.497.600,00 dan nilai pengembangan senilai Rp6.179.600,00 yang masih akan dilanjutkan pekerjaannya.

- 46 berupa pekerjaan dengan nilai perolehan awal senilai Rp24.718.400 dan nilai pengembangan senilai Rp218.782.543,00 yang masih akan dilanjutkan pekerjaannya.

2. Tindak Lanjut atas Saldo KDP Tahun Anggaran 2022:

- Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang terjadi transaksi Penghapusan/Penghentian KDP atas 15 paket pengadaan berupa Perencanaan Gedung dan Bangunan (RJT dan Kolam/Bak Ikan) senilai total Rp98.780.000,00 sesuai Surat Keputusan nomor S-21/MK.6/KNL.0804/2024 Tanggal 17 Mei 2024
- Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar terjadi Penghapusan/Penghentian KDP atas 1 paket pengadaan berupa Perencanaan Pembangunan Gudang Pakan Mandiri senilai Rp34.364.000,00 sesuai dengan Surat Keputusan nomor NO.468/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/2024 tanggal 13 Mei 2024

3. Data KDP tanpa Mutasi selama tahun 2024

Selain kondisi tersebut masih terdapat KDP perolehan Tahun 2023 yang tidak mengalami mutasi selama periode Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Kode	NU P	Nilai Tahun	Tahun	Uraian Pekerjaan	Rencana
SETDITJEN PERIKANAN BUDI DAYA					
7010101002	2	84.000.000	2017	Pembayaran GU pendukung KPA - 6 Feb 2017 senilai Rp25.000.000, Sewa Kendaraan Roda 4 senilai Rp4.000.000, Sewa Alat Ukur Fisika dan Kimia Air 31 Jan - 4 Feb 2017 Rp4.000.000, Sewa Kapal	Dihentikan / Proses Inventarisasi

				Rp30.000.000)	
7010101002	3	102.006.600	2017	Pembayaran pendukung KJA Offshore (perjalanan dinas)	Dihentikan / Proses Inventarisasi
7010101002	4	199.095.000	2017	Pembayaran GU (Analisa Sampel Fisika dan Kimia Perairan Rp29.095.000, Analisa Permodelan Parameter Fisika dan Kimia Perairan di Kab Pangandaran Rp40.000.000, Analisa Permodelan Parameter Fisika dan Kimia Perairan di Kab Jepara Rp40.000.000, Analisa Permodelan Parameter Fisik dan Kimia Perairan Kab Pangandaran Rp45.000.000, Analisa Permodelan Parameter Fisik dan Kimia Perairan Kab Jepara Rp45.000.000)	Dihentikan / Proses Inventarisasi
7010101002	5	23.920.000	2017	Pembayaran pendukung KJA Offshore (perjalanan dinas)	Dihentikan / Proses Inventarisasi
7010101002	6	242.164.650	2017	Pembayaran pendukung KJA Offshore (perjalanan dinas)	Dihentikan / Proses Inventarisasi
7010101002	7	49.747.500	2017	DED BBI Mokdale	Dihentikan / Proses Inventarisasi
7010101002	8	527.345.500	2017	Jasa Konsultan Badan Usaha: Pervuaman	Dihentikan / Proses Inventarisasi

				Budidaya Ikan Lepas Pantai	
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO					
7010101003	135	84.617.500	2020	Perencanaan Bangunan Berupa Kluster Tambak di Instalasi Pasuruan	Akan diusulkan Penghapusan
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM					
7010101003	135	39.000.000	2019	Gedung dan Bangunan (Master Plan BPBAT Sungai Gelam)	Penghapusan
BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG					
7010101003	97	25.543.325	2022	Perencanaan rehab gedung bangunan modul 1	Akan dilakukan penghapusan karena tidak ada anggaran di tahun 2024
7010101003	98	25.763.325	2022	Perencanaan rehab gedung bangunan auditorium	Akan dilakukan penghapusan karena tidak ada anggaran di tahun 2024
7010101003	99	15.859.500	2022	Perencanaan pembuatan pagar komplek	Akan dilakukan penghapusan karena tidak ada anggaran di tahun 2024

4. Saldo KDP Tahun Anggaran 2024 per 30 Juni 2024

Berdaskan data mutase tersebut maka terbentuklah data Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan yang masih tercatat sebagai Aset tetap sampai dengan periode tanggal 30 Juni 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Kode	NU P	Nilai Tahun	Tahun	Uraian Pekerjaan	Rencana
Setditjen Perikanan Budidaya UAPKPB Direktorat Perbenihan					
7010101002	2	84.000.000	2017	Pembayaran GU pendukung KJA Offshore (Sewa Alat Ukur Fisika tgl	Dihentikan / Proses Inventarisasi

				2 - 6 Feb 2017 senilai Rp25.000.000, Sewa Kendaraan Roda 4 senilai Rp4.000.000, Sewa Alat Ukur Fisika dan Kimia Air 31 Jan - 4 Feb 2017 Rp4.000.000, Sewa Kapal Rp30.000.000)	
701010100 2	3	102.006.600	7 201	Pembayaran GU pendukung KJA Offshore (perjalanan dinas)	Dihentikan / Proses Inventarisasi
701010100 2	4	199.095.000	7 201	Pembayaran GU Pendukung KJA Offshore (Analisa Sampel Fisika dan Kimia Perairan Rp29.095.000, Analisa Permodelan Parameter Fisika dan Kimia Perairan di Kab Pangandaran Rp40.000.000, Analisa Permodelan Parameter Fisika dan Kimia Perairan di Kab Jepara Rp40.000.000, Analisa Permodelan Parameter Fisik dan Kimia Perairan Kab Pangandaran Rp45.000.000, Analisa Permodelan Parameter Fisik dan Kimia Perairan	Dihentikan / Proses Inventarisasi

Kode	NUP	Nilai Tahun 2023	Tahun Perolehan	Uraian Pekerjaan	Rencana
------	-----	---------------------	--------------------	---------------------	---------

					Tindak Lanjut
7010101002	5	23.920.000	2017	Pembayaran GU pendukung KJA Offshore (perjalanan dinas)	Dihentikan / Proses Inventarisasi
7010101002	6	242.164.650	2017	Pembayaran GU pendukung KJA Offshore (perjalanan dinas)	Dihentikan / Proses Inventarisasi
7010101002	7	49.747.500	2017	DED BBI Mokdale	Dihentikan / Proses Inventarisasi
7010101002	8	527.345.500	2017	Jasa Konsultan Badan Usaha: Penyusunan Dok Lingkungan Instalasi Budidaya Ikan Lepas Pantai	Dihentikan / Proses Inventarisasi
Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi					
7010101003	120	1.221.000.000	2023		
7010101003	121	53.739.500	2023		
7010101004	1	20.000.000	2023		
7010101006	2	20.000.000	2023		
Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang					
7010101003	163	39.301.400	2023		
7010101003	164	39.301.400	2023		
7010101003	165	39.301.400	2023		
7010101003	166	39.301.400	2023		
7010101003	167	39.301.400	2023		
7010101003	168	39.301.400	2023		

7010101003	169	39.301.400	2023		
7010101003	170	39.301.400	2023		
7010101003	171	39.301.400	2023		
7010101003	172	39.301.400	2023		
7010101003	173	39.301.400	2023		
7010101003	174	39.301.400	2023		
7010101003	175	39.301.400	2023		
7010101003	176	39.301.400	2023		
7010101003	177	39.437.400	2023		
7010101003	178	24.765.750	2023		
7010101003	179	24.765.748	2023		

*Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp(1.313.704.379.472,00)*

C.19 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing Rp(1.313.704.379.472,00) dan Rp(1.275.627.076.117,00).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024 sedangkan penjelasan terinci mengenai akumulasi penyusutan aset tetap terdapat pada Laporan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Semester I TA 2024

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	925.923.688.626	(780.176.747.647)	145.746.940.979
2	Gedung dan Bangunan	1.347.325.198.064	(227.514.144.580)	1.119.811.053.484
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	471.105.825.468	(267.766.498.357)	203.339.327.111
4	Aset Tetap Lainnya	4.677.754.349	(169.685.533)	4.508.068.816
Akumulasi Penyusutan		2.749.032.466.507	(1.275.627.076.117)	1.473.405.390.390

*Aset Tetap yang Belum
diregister
Rp715.010.456,00*

C.20 Aset Tetap Dang Belum Diregister

Nilai Aset Tetap Belum Diregister per 30 September 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp715.010.456,00 dan Rp0. Dikarenakan Operator Komitmen merubah tanggal BAST di Aplikasi Sakti.

*Aset Tak Berwujud
Rp4.657.350.748,00*

C.21 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp4.657.350.748,00 dan Rp4.562.770.748,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Mutasi Aset Tetap Berwujud per 30 Juni 2024 :

Saldo Nilai per 1 Januari 2023	4.309.645.359
Mutasi tambah:	
Pembelian	189.810.000
Hibah (Masuk)	16.003.389
Pengembangan Nilai Aset	49.062.000
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	1.750.000
Saldo Nilai per 31 Desember 2022	4.562.770.748
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2022	(3.082.840.635)
Nilai Buku per 30 Juni 2024	1.479.930.113

Jenis-jenis Aset Tak Berwujud
Pada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
Per 31 Desember 2023

Kode	Uraian	Kuantitas	Nilai
162151	Software	82	4.318.945.748
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	5	243.825.000
Total		87	4.562.770.748

Rincian transaksi atas mutasi BMN berupa Software terdapat pada beberapa satker, antara lain:

- Transaksi Pembelian atas Software senilai total Rp189.810.000,00 terjadi pada Setditjen Perikanan Budi Daya berupa:
 - Software Komputer berbentuk Aplikasi Perjalanan Dinas yang di aplikasikan oleh Tim Kerja Perencanaan dan Program Ditjen Perikanan Budi Daya
 - Software Komputer berbentuk Alokasi Monev Dana Alokasi Kegiatan (DAK) yang di aplikasikan oleh Tim Kerja Perencanaan dan Program Ditjen Perikanan Budi Daya
- Hibah Masuk atas Software senilai total Rp16.003.389,00 terjadi pada Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang berupa:
 - Software Office Pro 2019 License # R9FJ2-2TY74- CTKRK-DGM39-7KPOZ senilai Rp13.659.528,00
 - Software Antivirus Sophos Home Premium 1 Year License senilai Rp2.343.861,00
Perolehan dari DAI-Flaming Fund sesuai BAST Nomor B.3895/BPKIL/PL.450/XII/2023 dan nomor 0515/EX/2024 /01/DAI-FFCGI tanggal 29 Desember 2023
- Pengembangan Nilai Aset (Langsung) atas Software senilai Rp49.062.000,00 terjadi pada Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam berupa Pengembangan atas Aplikasi Siginjai sebagai sarana pendukung pengajuan perjalanan dinas dan pelaporan
- Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang atas Software senilai Rp1.750.000,00 terjadi pada Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam yang merupakan tindak lanjut dari Laporan hasil

audit kinerja Itjen atas progress pekerjaan pengembangan aplikasi Siginjai.

Software yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 58 unit dengan nilai sebesar Rp1.517.845.250,00.

Aset Tak Berwujud Lainnya sebanyak 0 unit dengan nilai Rp0,00 sehingga saldo Aset Tak Berwujud Lainnya per 31 Desember 2023 yaitu sebanyak 5 unit dengan nilai Rp243.825.000,00.

Tidak terdapat mutasi tambah maupun kurang terhadap Aset Tak Berwujud Lainnya selama Periode T.A. 2023

Aset Tak Berwujud Lainnya yang statusnya sedang dalam proses penghapusan atau pemindah tangan adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00.

Aset Tak Berwujud Lainnya yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00.

Akumulasi amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp3.082.840.635,00. Nilai ini merupakan gabungan amortisasi antara amortisasi software dan amortisasi aset tak berwujud lainnya.

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	932.596.982.937	-790.066.505.459	142.530.477.478
2	Gedung dan Bangunan	1.294.600.022.491	-246.259.513.505	1.048.340.508.986
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	481.541.973.330	-277.183.387.322	204.358.586.008
4	Aset Tetap Lainnya	50.027.114.407	-194.973.186	49.832.141.221
Akumulasi Penyusutan		2.758.766.093.165	-1.313.704.379.472	1.445.061.713.693

Rincian transaksi atas mutasi BMN berupa Software terdapat pada beberapa satker, antara lain:

Transaksi Pembelian atas Software senilai total Rp94.580.000,00 terjadi pada Setditjen Perikanan Budi Daya berupa Software Komputer berbentuk Aplikasi Layanan Pakan Ikan yang di aplikasikan oleh Direktorat Pakan dan Obat Ikan.

Software yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 58 unit dengan nilai sebesar Rp1.517.845.250,00.

Aset Tak Berwujud Lainnya Periode Semester I Tahun 2024 per 30 Juni 2024 yaitu sebanyak 5 unit dengan nilai Rp243.825.000,00.

Tidak terdapat mutasi tambah maupun kurang terhadap Aset Tak Berwujud Lainnya selama Periode T.A. 2023

Aset Tak Berwujud Lainnya yang statusnya sedang dalam proses penghapusan atau pemindah tanganan adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0

Aset Tak Berwujud Lainnya yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00. Akumulasi amortisasi Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2024 adalah senilai Rp3.082.840.635,00. Nilai ini merupakan gabungan amortisasi antara amortisasi software dan amortisasi aset tak berwujud lainnya.

*Dana Yang Dibatasi
Penggunaannya Rp0*

C.22 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Nilai dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 30 September 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp2.820.385.928,00. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun demikian dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan Belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan. Adapun rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 30 September 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Uraian	T.A. 2024	T.A. 2023
Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	0	2.820.385.928
-	-	-
Total	0	-

Aset Lain-Lain
Rp199.716.618.847,00

C.23 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp180.537.209.809,00 dan Rp173.350.588.698,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Mutasi Aset lain-lain per 30 Juni 2024 sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	173.350.588.698
Mutasi tambah:	
Transfer masuk (Henti Guna)	5.460.789.250
Penghentian Aset dari penggunaan	14.271.140.966
Mutasi Kurang:	
Likuidasi keluar henti guna	5.460.789.250
Hibah Keluar (BMN Yang Dihentikan)	585.983.000
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	983.359.500
Pencatatan Barang yang mau dihapuskan	5.515.177.355
Saldo per 30 Juni 2024	180.537.209.809
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	-172.013.759.296
Saldo per 30 Juni 2024	8.523.450.513

Rincian transaksi atas mutasi BMN berupa BMN yang dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah terdapat pada beberapa satker, antara lain:

- a. Transaksi Likuidasi Keluar dan Likuidasi Masuk aset yang dihentikan penggunaannya dari operasional senilai total Rp5.512.247.650,00 terjadi pada beberapa satker Dinas Provinsi dalam rangka perubahan kewenangan Seluruh Satker Dinas Provinsi yang semula sebagai Satker Dekonsentrasi menjadi Satker Tugas Pembantuan.
- b. Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sejumlah total 4.381 item senilai Rp163.297.878.035,00

- c. Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap sebanyak 3 item senilai Rp983.359.500,00 terjadi pada :
- Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung berupa 1 unit longboat dan 1 unit Stationary Generating Set
 - Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon berupa 1 unit Water Filter yang di pergunakan Kembali untuk dilakukan perbaikan dan pemanfaatan sebagai pendukung operasional satker
- Atas mutasi ini telah di jabarkan pada seluruh penjelasan mutasi BMN perbidang berupa transaksi penggunaan kembali BMN yang telah di hentikan penggunaannya.
- d. Penghapusan atas BMN yang dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah yang masih memiliki saldo di neraca setelah dilakukan perekaman usul Hapus sebanyak 3.509 unit senilai Rp541.300.000,00 terjadi pada Dinask KP Provinsi Kalimantan Timur berupa Ikan Budidaya Lainnya sesuai SK Penghapusan Nomor 864/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/2021 tanggal 31 Desember 2021.
- e. Transfer Keluar atas BMN Yang Dihentikan sebanyak 1.027 NUP senilai Rp208.678.600,00 terjadi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka Likuidasi Satker dekonsentrasi menjadi Satker Tugas Pembantuan.
- f. Hibah Keluar atas BMN Yang Dihentikan penggunaannya sebanyak 5 unit senilai total Rp585.983.000,00 terjadi apada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten berupa 2 unit Bangunan Gedung Laboratorium Permanen, 1 unit Asrama Permanen, 1 unit Pick Up dan 1 unit Sepeda Motor sesuai SK Penghapusan nomor 580/Kepmen-KP/SJ/PL.750/2024 tanggal 20 Juni 2024.
- g. Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan sebanyak 876 item senilai Rp5.611.657.994,00 merupakan transaksi lanjutan atas dokumen usulan penghapusan BMN yang telah di setujui oleh KPB (terbit ijin prinsip penghapusan).

Satker	Kuantitas	Nilai Barang
Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya	6	714.956.375
Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Timur	0	0
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten	0	0
Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Barat	20	339.836.000
Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan	622	907.502.989
Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	211	1.542.075.452
Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam	1	106.450.000
Balai Perikanan Budidaya Air Payau	10	1.392.612.000
Balai Perikanan Budidaya Air Payau	3	486.769.678
Balai Besar Perikanan Budidaya Laut	3	121.455.500

Akumulasi Penyusutan BMN yang dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp157.368.602.224,00

*Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
Rp(190.600.168.937,00)*

C.24 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp(190.600.168.937,00) dan Rp(160.149.958.814,00). Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Lain-Lain			
Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah	198.198.773.597	185.569.217.063	12.629.556.534

Aset tak berwujud yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	1.517.845.250	1.517.845.250	0
Akumulasi Amortisasi software	-	3.513.106.624	-
Total	199.716.618.847	190.600.168.937	9.116.449.910

*Uang Muka dari KPPN
Rp5.724.103.500,00*

C.25 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp5.724.103.500 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp14.475.895.380,00*

C.26 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp14.475.895.380,00 dan Rp Rp7.438.673.674,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan akan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

*Perbandingan nilai Utang kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

Uraian	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A.2023
Beban Pegawai yang Masih Harus Dibayar	6.832.142.750	140.634.254
Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	7.030.235.235	2.409.785.165
Beban Modal yang Masih Harus Dibayar	167.101.691	0
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	433.877.204	4.858.254.254
Utang kepada pihak ketiga-BLU	0	1
Dana Pihak ketiga	-	30.000.000
Pengeluaran transit yang masih harus dibayar	12.538.500	-
Total	14.475.895.380	7.438.673.674

*Utang Yang Belum
ditagihkan
Rp12.835.835.355,00*

C.27 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp12.835.835.355 dan Rp0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Adapun rincian Utang Yang Belum Ditagihkan adalah sebagai berikut :

Uraian	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A.2023
Utang yang belum ditagihkan	12.835.835.355	0
Total	12.835.835.355	0

*Pendapatan Diterima
Dimuka
Rp632.525.017,00*

C.28 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp632.525.017,00 dan Rp701.790.504,00. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka TA 2024

Uraian	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A.2023
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	632.525.017	701.790.504
	-	-
Total	632.525.017	701.790.504

NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI	(11.873.517,)	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berasal dari sewa tanah, gedung dan bangunan berupa sewa sebagian lahan/bangunan sesuai sesuai PP nomor 28 tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik negara untuk koperasi senilai Rp.15.000.000,- sesuai dengan perjanjian sewa No. B.2918/BBPBAT/TU.450/IX/2022 tanggal 29 September 2022 dan untuk tempat pendidikan (TK) senilai Rp.5.354.600,- sesuai dengan perjanjian sewa No.B.2919/BBPBAT/TU.450/IX/2022 tanggal 29 September 2022 dengan masa sewa selama 3 (tiga) Tahun, pada tahun 2023 sudah diserahkan jasa pendapatan selama 15 bulan.

BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (BLUPPB) KARAWANG	(69.265.487,)	Pendapatan atas Sewa Gedung Banguna dengan PT. ADIB senilai Rp21,814,375,-, dan Koperasi senilai Rp47,451,112,-
BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG	(620.651.500,)	1. Pendapatan Sewa BMN dengan nomor surat perjanjian 572/LP2IL/KU.340/III/2020 an PT Tri Karta Pratama dengan jangka waktu 2 Maret 2020 s.d 2 Maret 2025, Nilai Sewa Rp 1.686.135.000 dikurangi sewa yang telah berjalan Rp 1.292.703.500 Saldo Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp 393.431.500 2. Pendapatan Sewa BMN dengan nomor surat perjanjian 605/LP2IL/KU.340/III/2020 an PT Tri Karta Pratama dengan jangka waktu 2 Maret 2020 s.d 2 Maret 2025, Nilai Sewa 973.800.000 dikurangi sewa yang telah berjalan Rp 746.580.000 Saldo Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp 227.220.000 Total Pendapatan diterima dimuka dari kedua perjanjian sewa tersebut adalah sebesar Rp 620.651.500
TOTAL	(701.790.504,)	

Penjelasan Pendapatan Diterima Dimuka :

1. Perjanjian Sewa Menyewa Barang Milik Negara berupa sebagian dan/atau bangunan antara LP2IL Serang dengan PT.Suri Tani Pemuka No.605/LP2IL/KU.340/III/2020 senilai Rp973.800.000 selama 5 Tahun dihitung tgl 5 Maret 2020 s.d 5 Maret 2025 dibukukan Rp616.740.000.
2. Pendapatan Sewa Diterima Dimuka pada BBPBAT Sukabumi berasal dari sewa tanah, gedung dan bangunan berupa sewa sebagian lahan/bangunan sesuai sesuai PP nomor 28 tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik negara untuk koperasi senilai Rp.15.000.000,- sesuai dengan perjanjian sewa No. B.2918/BBPBAT/TU.450/IX/2022 tanggal 29 September 2022 dan untuk tempat pendidikan (TL) senilai Rp.5.354.600,- sesuai dengan perjanjian sewa No.B.2919/BBPBAT/TU.450/IX/2022 tanggal 29 September 2022 dengan masa sewa selama 3 (tiga) Tahun, pada tahun 2022 sudah diserahkan jasa pendapatan selama 3 bulan.

*Utang Jangka Pendek
Lainnya Rp3.824.213*

C.29 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp3.824.213,00 dan Rp0. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek lain yang akan dilunasi dalam waktu kurang dari 12 bulan.

Uraian	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A.2023
Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	3.824.213	-
	-	-
Total	3.824.213	-

*Ekuitas
Rp5.563.018.790.655,00*

C.30 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5.563.018.790.655,00 dan Rp5.406.458.171.217,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL*Pendapatan PNPB**Rp37.819.551.179,00***D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp37.819.551.179,00 dan Rp27.862.538.522,00 mengalami kenaikan 35,74 persen dari tahun sebelumnya dimana disebabkan karena dari pendapatan BLU. Adapun rincian sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	2024	2023	%
Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	2.248.537.100	-	-
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	52.676.081	-	-
Pendapatan Lain-lain BLU	11.202.209.102	-	-
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	3.416.480	-	-
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	26.380.300	-	-
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Aset Tetap Lainnya	39.949.400	-	-
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya	55.910.240	-	-
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	16.125.856.127	19.420.040.982,00	(16,96)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.260.114.401	1.266.360.290,00	(0,49)
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	784.550.024	808.496.000,00	(3,02)
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	4.857.577.000	5.557.090.000,00	-
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	660.000	5.260.000,00	-
Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	700.000	-	-
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	1.130.883.535	764.483.701,00	-

Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	14.000.000	28.500.000,00	-
Pendapatan Denda Lainnya	6.871.389	-	-
Pendapatan Anggaran Lain-lain	9.260.000	12.296.470,00	-
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	11.079,00	-
Jumlah	37.819.551.179	27.862.538.522	35,73

Rincian Satuan Kerja Pendapatan Hasil Penjualan Budidaya (425112) yaitu penjualan benih, indukkan sebagai berikut :

NAMA SATKER	NOMINAL
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM	(2.362.224.600,)
BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI	(1.246.579.900,)
BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA	(2.095.978.092,)
BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG	(1.121.415.800,)
BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (BLUPPB) KARAWANG	(2.045.874.150,)
BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM	(674.000.000,)
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU	(1.138.885.725,)
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO	(621.221.770,)
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE	(1.618.835.000,)
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT BATAM	(1.020.227.000,)
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN	(1.152.181.990,)
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR	(1.881.458.350,)
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON	(827.062.000,)
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK	(360.713.400,)
BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG	(5.072.500,)
BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (BLUPPB) KARAWANG	2.045.874.150,
TOTAL	(16.125.856.127,0)

Adapun rincian satuan kerja Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan (425131)

NAMA SATKER	NOMINAL
BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI	(64.310.326,)
BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA	(112.235.585,)
BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG	(48.562.636,)
BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (BLUPPB) KARAWANG	(315.534.315,)
BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM	(38.943.400,)
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU	(52.554.031,)
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO	(24.715.834,)
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE	(25.203.989,)
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT BATAM	(81.774.780,)
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN	(22.617.800,)
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR	(22.960.002,)
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON	(46.419.108,)
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK	(35.069.569,)
BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG	(630.798.000,)
SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	(379.280,)
BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (BLUPPB) KARAWANG	261.964.254,
TOTAL	(1.260.114.401)

Pada BBPBAP Jepara selain sewa rumah dinas terdapat sewa tambak terdapat juga sewa lahan, pada BPKIL Serang terdapat sewa lahan untuk tambak serta pada BPBAT Sukabumi selain sewa rumah dinas juga sewa sebagian lahan/bangunan untuk koperasi dan tempat pendidikan sesuai PP nomor 28 tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik negara senilai Rp.15.000.000,- sesuai dengan perjanjian sewa No. B.2918/BBPBAT/TU.450/IX/2022 tanggal 29 September 2022 dengan masa sewa selama 3 tahun dan untuk tempat pendidikan (TK) senilai Rp.5.354.600,- sesuai dengan perjanjian sewa

No.B.2919/BBPBAT/TU.450/IX/2022 tanggal 29 September 2022 dengan masa sewa selama 3 (tiga) Tahun.

Rincian Satuan Kerja Pendapatan sarana prasarana sesuai tusi (425151) adalah sewa guesthouse, ruang pertemuan dan sewa excavator.

NAMA SATKER	NOMINAL
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM	(26.400.000,)
BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI	(30.730.000,)
BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA	(168.670.000,)
BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG	(157.100.000,)
BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (BLUPPB) KARAWANG	(22.250.000,)
BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM	(2.800.000,)
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU	(47.840.000,)
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO	(720.000,)
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT BATAM	(44.850.000,)
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN	(34.430.000,)
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR	(52.660.024,)
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON	(105.782.000,)
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK	(63.590.000,)
BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG	(48.978.000,)
BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (BLUPPB) KARAWANG	22.250.000,
TOTAL	(784.550.024)

Terdapat penambah sebesar Rp440.000,00 dikarenakan temuan BPK Ri terkait kekurangan pembayaran sewa guest house/asrama di BBPBAT Sukabumi.

Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi, (425289) merupakan pendapatan uji laboratorium. Rincian satuan kerja sebagai berikut :

NAMA SATKER	NOMINAL
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM	(23.945.000,)
BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI	(1.204.106.000,)
BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA	(278.720.000,)
BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG	(156.059.000,)
BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (BLUPPB) KARAWANG	(22.305.000,)
BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM	(108.815.000,)
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU	(210.000,)
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO	(1.129.374.000,)
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE	(39.718.000,)
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT BATAM	(45.935.000,)
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN	(65.326.000,)
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR	(677.319.000,)
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON	(9.170.000,)
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK	(113.329.000,)
BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG	(1.313.326.000,)
BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (BLUPPB) KARAWANG	22.305.000,
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO	307.775.000,
TOTAL	(4.857.577.000)

Rincian Satuan Kerja Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan (425811)

NAMA SATKER	NOMINAL
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM	(43.290.919,)
BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI	(3.332.175,)
BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA	(95.468.452,)

BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (BLUPPB) KARAWANG	(13.771.845,)
BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM	(46.344,)
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU	(6.189.679,)
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO	(49.720.044,)
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE	(59.353.117,)
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT BATAM	(2.794.716,)
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR	(6.344.452,)
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK	(27.288.500,)
SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	(823.283.292,)
TOTAL	(1.130.883.535)

Pada akun ini terdapat penambahan sebesar Rp861.930,00 dikarena terjadi kesalahan kode satker pada saat penyetoran di periode 12.

Realisasi Penerimaan Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp37.819.551.179,00 dan Rp27.862.538.522,00. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 1,55 persen dari TA 2022, kenaikan signifikan karena pendapatan BLU. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan
(*Unaudited*) TA 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	37.819.551.179	27.862.538.522	35,73
Jumlah	37.819.551.179	27.862.538.522	35,73

Sedangkan rincian PNBP lainnya sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022	%
Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	2.248.537.100	-	-
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	52.676.081	-	-
Pendapatan Lain-lain BLU	11.202.209.102	-	-
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	3.416.480	-	-
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	26.380.300	-	-
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Aset Tetap Lainnya	39.949.400	-	-
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya	55.910.240	-	-
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	16.125.856.127	19.420.040.982,00	(16,96)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.260.114.401	1.266.360.290,00	(0,49)
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	784.550.024	808.496.000,00	(3,02)
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	4.857.577.000	5.557.090.000,00	-
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	660.000	5.260.000,00	-
Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	700.000	-	-
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	1.130.883.535	764.483.701,00	-
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	14.000.000	28.500.000,00	-
Pendapatan Denda Lainnya	6.871.389	-	-
Pendapatan Anggaran Lain-lain	9.260.000	12.296.470,00	-
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	11.079,00	-
Jumlah	37.819.551.179	27.862.538.522	35,73

Realisasi Pendapatan lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya antara lain berasal dari :

1. Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan pembudidaya berupa penjualan benih ikan dan indukan terdapat pada 15 satker UPT.
2. Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin berupa lelang excavator dan alat-alat kantor. Adapun rincian sebagai berikut :

NAMA SATKER	NOMINAL
DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	(8.000.999,)
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM	(78.028.998,)
BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI	(2.899.999,)
BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA	(234.184.324,)
BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (BLUPPB) KARAWANG	(69.401.666,)
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU	(41.899.999,)
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO	(665.257.555,)
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE	(59.908.433,)
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR	(63.999.999,)
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON	(53.062.222,)
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK	(78.985.999,)
BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG	(64.999.999,)
SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	(91.396.730,)
TOTAL	(1.512.026.922)

3. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan berupa sewa rumah dinas dan dipotong melalui gaji pns terdapat di 14 satker UPT kecuali LP2IL Serang.
4. Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai tusi berupa sewa guest house, sewa ruang pertemuan terdapat pada 15 satker UPT.
5. Pendapatan Pengujian, sertifikasi berupa pengujian sampel lab terdapat di 14 satker UPT kecuali BPBAT Tatelu. Pendapatan pengujian sample lab terbesar di BPKIL Serang. Adapun rincian sebagai berikut :

NAMA SATKER	NOMINAL
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM	(23.945.000,)
BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI	(1.204.106.000,)
BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA	(278.720.000,)
BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG	(156.059.000,)
BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (BLUPPB) KARAWANG	(22.305.000,)
BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM	(108.815.000,)
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU	(210.000,)
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO	(1.129.374.000,)
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE	(39.718.000,)
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT BATAM	(45.935.000,)
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN	(65.326.000,)
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR	(677.319.000,)
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON	(9.170.000,)
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK	(113.329.000,)
BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG	(1.313.326.000,)
BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (BLUPPB) KARAWANG	22.305.000,
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO	307.775.000,
TOTAL	(4.857.577.000)

Pendapatan jasa tenaga kerja, pekerjaan dan Informasi terdapat di BBPBAT Sukabumi yaitu berupa jasa bimbingan teknis pembudidayaan ikan sebesar Rp14.000.000,00.

Pendapatan Layanan Pendidikan dan/Latihan berupa jasa bimbingan teknis pada BPKIL Serang senilai Rp660.000,00 sesuai dengan PP 85 tahun 2021.

Pendapatan persekot gaji terdapat di BPBL Ambon berupa kelebihan pembayaran tunjangan kinerja pada tahun berjalan.

Pendapatan anggaran lain-lain terdapat di BPBAP Tatelu berupa Tindak lanjut atas LHA Kinerja Tahun 2022 No. T.33/ ITJ.3/HP.110/I/2023, tanggal 20 Januari 2023 tentang Menginstruksikan Sdr. Makkulau Sultan setor ke Kas Negara uang pemberian dari CV Berkat Roemon senilai Rp9.260.000,-

Penjelasan selisih pencatatan Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah Sebagai berikut :

PENDAPATAN PNBP (LO)	:	37.819.551.179
PENDAPATAN PNBP (LRA)	:	43.255.851.249
PIUTANG PNBP AKHIR TAHUN (NERACA)	:	
PIUTANG PNBP AWAL TAHUN (NERACA)	:	
Selisih	:	(5.436.300.070)

Selisih tersebut disebabkan pencatatan pendapatan lainnya pada laporan operasional dengan rincian sebagai berikut :

No	Penjelasan	Total
Pos Pendapatan Non Operasional		
1	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan	41.986.800
2	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	1.512.026.922
3	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	40.756.178
4	Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	(547.271.869)
5	Pendapatan Penggunaan sarana dan prasarana sesuai tuisi	120.440.000
Pos Pendapatan Non Operasional Lainnya		
6	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	47.713.697
7	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	498.785.798
8	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	3.719.124.544

9	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	3.618.000
Grand Total		5.436.300.070
JUMLAH		5.436.300.070

*Beban Pegawai**Rp165.536.756.996,00***D.2 Beban Pegawai**

Jumlah Beban Pegawai pada Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp165.536.756.996,00 dan Rp180.473.711.555,00 mengalami penurunan 8,28 persen dari tahun lalu dikarenakan banyaknya pegawai yang sudah memasuki masa pensiun. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2022 dan TA 2021 sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022			
URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Gaji Pokok PNS	60.012.871.088	64.078.424.613	(6,34)
Beban Pembulatan Gaji PNS	831.065	918.144	(9,48)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	4.601.056.158	4.973.139.446	(7,48)
Beban Tunj. Anak PNS	1.424.734.585	1.522.267.568	(6,41)
Beban Tunj. Struktural PNS	888.285.000	1.337.815.000	(33,60)
Beban Tunj. Fungsional PNS	4.650.662.000	6.039.208.000	(22,99)
Beban Tunj. PPh PNS	179.595.648	271.088.612	(33,75)
Beban Tunj. Beras PNS	3.532.502.760	3.822.037.920	(7,58)
Beban Uang Makan PNS	8.274.722.850	9.817.460.700	(15,71)
Beban Tunjangan Umum PNS	1.081.635.000	1.065.602.500	1,50
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	239.198.248	-	-
Beban Uang Lembur	1.066.043.600	448.353.000	137,77
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	78.941.994.342	87.097.396.052	(9,36)
Beban Pembulatan Gaji PPPK	4.497	-	-
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	10.054.170	-	-
Beban Tunjangan Anak PPPK	2.669.850	-	-
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	24.795.000	-	-
Beban Tunjangan Beras PPPK	11.587.200	-	-
Beban Tunjangan Lauk Pauk PPPK	3.182.000	-	-
Beban Uang Makan PPPK	44.473.800	-	-
Beban Tunjangan Kompensasi Kerja PPPK	40.937.306	-	-
Beban Uang Lembur PPPK	2.208.000	-	-
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja	332.712.829	-	-
	-	-	-
Jumlah	165.366.756.996	180.473.711.555	(8,37)

Beban Persediaan

Rp82.586.510.180,00

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp82.586.510.180,00 dan Rp64.359.027.997,00 mengalami kenaikan 28,32persen dari tahun lalu disebabkan penggunaan barang konsumsi mengalami kenaikan. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Persediaan konsumsi	62.070.526.542	45.865.951.846	35,33
Beban Persediaan bahan baku	15.919.889.377	15.310.189.757	3,98
Beban Persediaan Lainnya	4.596.094.261	3.182.886.394	44,40
Jumlah Beban Persediaan	82.586.510.180,00	64.359.027.997	28,32

*Beban Barang dan
Jasa
Rp210.339.309.069,00*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp210.339.309.069,00 dan Rp122.184.587.899,00 mengalami kenaikan 72,15 persen disebabkan karena menurunnya belanja barang operasional lainnya dan belanja bahan. Beban barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Keperluan Perkantoran	31.372.746.362	25.969.499.888	20,81
Beban Pengadaan Bahan Makanan	16.396.900	17.398.575	(5,76)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	740.350.153	482.931.307	53,30
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	117.523.776	87.492.005	34,33
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	5.372.754.000	5.252.488.000	2,29
Beban Barang Operasional Lainnya	10.310.601.407	1.765.539.605	483,99
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	113.671.909	1.459.353.136	(92,21)
Beban Bahan	23.987.776.442	14.823.712.197	139,81
Beban Honor Output Kegiatan	15.898.783.000	11.833.117.357	34,36
Beban Barang Non Operasional Lainnya	13.021.172.234	10.463.260.477	29,87
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	14.000.000	20.000.000	(30,00)
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	199.760.000	-	-
Beban Langganan Listrik	28.576.802.078	22.608.596.728	26,36
Beban Langganan Telepon	298.838.613	224.028.195	33,39
Beban Langganan Air	61.753.500	79.222.400	(22,05)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1.211.797.266	1.143.730.213	5,41
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	45.644.321	139.623.926	(67,31)
Beban Barang Operasional kepada BLU dalam Satu	12.763.196	-	-
Beban Jasa Konsultan	23.184.947.049	9.547.192.235	142,85
Beban Sewa	7.824.060.117	3.352.862.341	133,35

Beban Jasa Profesi	2.734.430.000	1.940.305.000	40,93
Beban Jasa Lainnya	45.180.859.746	10.598.787.464	326,23
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	7.800.000	375.446.850	(97,92)
Beban Barang	34.077.000	-	-
	-	-	-
Jumlah	210.339.309.069	122.184.587.899	72,15

*Beban Pemeliharaan
Rp35.743.047.066,00*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp35.743.047.066,00 dan Rp18.035.758.369,00 mengalami kenaikan sebesar 98,18 persen karena meningkatnya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya serta pemeliharaan gedung dan bangunan. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2023 dan TA 2022

Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11.223.857.790	3.691.122.047	204,08
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1.341.086.444	658.482.051	103,66
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17.272.629.701	9.676.806.972	78,50
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	977.273.990	766.963.880	27,42
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	754.980.659	10.500.000	7.090,29
Beban Pemeliharaan Irigasi	19.980.000	328.593.500	(93,92)
Beban Pemeliharaan Jaringan	1.414.527.541	562.349.559	151,54
Beban Pemeliharaan Lainnya	185.452.400	137.705.840	34,67
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	316.333.374	406.560.809	(22,19)
Beban Persediaan suku cadang	2.178.403.967	1.761.956.971	23,64
Belanja pemeliharaan	58.521.200	-	-

Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	-	34.716.740	(100,00)
Jumlah	35.743.047.066	18.035.758.369	98,18

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp131.421.393.071,00*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp131.421.393.071,00 dan Rp66.046.848.549,00 mengalami kenaikan sebesar 98,98 persen peningkatan kegiatan perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas luar negeri. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2023 dan TA 2022

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Perjalanan Biasa	78.002.173.376	52.065.050.316	49,82
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.991.872.400	940.401.400	111,81
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	14.325.507.049	2.575.068.806	456,32
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	23.381.663.505	9.913.640.127	135,85
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	13.720.176.741	552.687.900	2.384,99
	-	-	-
Jumlah	131.421.393.071,00	66.046.848.549	98,98

*Beban Barang untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat
Rp379.368.872.466,00*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp379.368.872.466,00 dan Rp334.667.125.511,00 mengalami kenaikan sebesar 13,48 persen dibandingkan tahun lalu disebabkan sudah dikeluarkannya beban atas persediaan tanah dan bangunan yang diserahkan ke masyarakat. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Beban Barang untuk diserahkan kepada masyarakat TA 2023 dan 2022

*Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahunan
(Unaudited) TA 2023 dan 2022*

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
Beban Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	9.567.184.000	18.297.500.000,00	(47,71)
Beban Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	22.960.051.136	4.729.893.448,00	385,42
	-	-	-
Jumlah	379.368.872.466,00	334.667.125.511	13,36

*Beban Bantuan Sosial
Rp0*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif.

Beban Penyusutan dan
Amortisasi
Rp110.688.485.039,00

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp110.688.485.039,00 dan Rp110.464.442.382,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud, dengan rincian sebagai berikut :

Rincian beban penyusutan dan amortisasi TA 2023 dan 2022

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	47.479.596.389	52.063.299.150	(8,80)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	38.308.289.164	42.442.251.518	(9,74)
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	3.001.514.307	3.645.440.835	(17,66)
Beban Penyusutan Irigasi	7.719.866.114	7.765.796.930	(0,59)
Beban Penyusutan Jaringan	1.692.473.545	1.315.037.552	28,70
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	50.575.306	22.505.984	124,72
Beban penyusutan properti investasi	823.644.808	783.539.508	5,12
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	4.373.854.299	2.426.570.905	80,25
Jumlah Penyusutan	103.449.813.932	110.464.442.382	(6,35)
Beban Amortisasi Software	7.238.671.107	-	-
Jumlah Amortisasi	7.238.671.107	-	-
Jumlah	110.688.485.039	110.464.442.382	(0,20)

Beban Penyisihan
Piutang Tak tertagih
Rp396.441.185,00

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2023 dan 31

Desember 2022 adalah masing - masing sebesar Rp396.411.185,00 dan Rp599.576.598,00.

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Penyisihan Piutang PNPB	2.200-	348.250.000	(100)
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	396.438.985	251.326.598	57,74
Beban Penyisihan Piutang PPh Non Migas	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang PPN	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Cukai dan Bea Materai	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Pajak Perdagangan Internasional	-	-	-
Jumlah	396.441.185,00	599.576.598	(34)

Surplus/Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp22.909.402.108

D.11 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

1. Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar

a. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya merupakan :

Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	1.512.026.922	1.356.568.314,00	11
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	40.756.178	21.212.212,00	92
Jumlah	1.594.769.900,00	1.377.780.526	16

NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	(8.000.999,)	
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM	(78.028.998,)	Hasil lelang kendaraan dengan nomor risalah 230/13/2023
BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI	(2.899.999,)	Penjualan Hasil lelang peralatan dan mesin dengan nomor risalah lelang 325/32/2023 Tanggal 28 Februari 2023

BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA	(234.184.324,)	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin berdasarkan Risalah lelang Nomor 497/37/2023 Tanggal 6 April 2023 yaitu 1 (satu) unit Crawler Excavator Attachment, kondisi rusak berat dengan pembeli An. Budianto, NIK 1271010303960002, Wiraswasta, beralamat di Jalan Mangaaan V Lor Pahlawan LK XIII Kelurahan / Desa Mabar, kecamatan Medan Deli, Kota Medan sebesar Rp83.850.000, Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin berdasarkan Risalah lelang Nomor 847/37/2023 Tanggal 12 Juni 2023 yaitu 1 (satu) unit Crawler Excavator Attachment, kondisi rusak berat dengan pembeli An. Laurentius Ardy Nugroho, NIK 3375031308890004, Karyawan Swasta, beralamat di Dsn Segeni, RT/RW.005/001, Kel/Desa Pagersari, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Propinsi Jawa Tengah sebesar Rp83.333.824, dan Risalah lelang Nomor 847/37/2023 Tanggal 12 Juni 2023 yaitu 1 (satu) unit Amphibi Dreger Lainnya, kondisi rusak berat dengan pembeli An. Rubiyanto, NIK 3171030507690004, Tentara Nasional Indonesia (TNI), beralamat di Taruna Raya II No 15, RT/RW.001/003, Kel/Desa Serdang, Kecamatan Kemayoran, Kota
BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (BLUPPB) KARAWANG	(69.401.666,)	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (kincir) berdasarkan Risalah lelang Nomor 167/33/2023 tanggal 15 Maret 2023 Penjualan Kend Rd 2 senilai Rp1.735.000,- dan Penjualan Alsin senilai Rp67.666.666,-
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU	(41.899.999,)	
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO	(665.257.555,)	Penjualan Hasil Lelang Peralatan dan Mesin Berupa Excavator, Amphibi Master, dan Gedung Bangunan. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin berdasarkan Risalah lelang Nomor 218/48/2023 Tanggal 11 Mei Berupa 1 unit Pick up L300 Double Cabin.
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE	(59.908.433,)	
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR	(63.999.999,)	
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON	(53.062.222,)	Hasil Lelang Kendaraan Bermotor Berupa 1 bh Mobil SW Rp.38.522.222, +1 bh Pickup Rp.6.700.000, dan 4 bh Sepeda Motor, Rp.1.500.000,- Rp.1.270.000,- Rp.1.570.000,- Rp.3.500.000,- Dari Penjualan Peralatan dan Mesin berdasarkan Kutipan Risalah Lelang No. 45 / 80 / 2023
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK	(78.985.999,)	

BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG	(64.999.999,)	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin berupa kendaraan bermotor berdasarkan Risalah lelang Nomor : 115/22/2023 Tanggal 13 Maret 2023
SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	(91.396.730,)	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin berupa kendaraan bermotor yaitu Mobil isuzu phanter berdasarkan Risalah lelang Nomor : 240/26/2023 Tanggal 20 Maret 2023
TOTAL	(1.512.026.922,)	

Pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya terdapat pada satker BBPBL Lampung berupa jaringan tegangan 1 s.d 20 KVA yang berupa instalasi genset senilai Rp36.200.623,-

b. Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Beban Pelepasan Aset Non Lancar Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya merupakan beban non operasional yang disebabkan adanya selisih penyusutan karena Reklasifikasi sebesar Rp82.927.423.224,00. Dimana untuk proses hibah ke pemda untuk DK dan TP, dan untuk UPT berupa kematian hasil produksi benih ikan dan indukkan.

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Kerugian Pelepasan Aset	(87.931.385.339)	(100.445.440.075)	17,44
Jumlah	(87.931.385.339)	(100.445.440.075)	17,44

2. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

a. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya berdasarkan akun adalah sebagai berikut :

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	47.713.697	178.249.602,00	(73,23)
Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	83.638.486	110.808.831,00	(24,52)
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	41.928.986	-	-
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	111.112.355.756	122.130.996.815,00	(9)
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	314.918.771	604.542.850,00	(48)
Jumlah	109.246.017.547,00	123.024.598.098	(9,80)

b. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya pada periode 31 Desember 2023 berupa Beban Penyesuaian Nilai Persediaan dan kerugian persediaan rusak/usang. Adapun rinciannya sebagai berikut :

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	(1.807.772.171)	-	
Kerugian Persediaan Rusak/Usang	(403.885.097)	-9.680	4172266,7
Beban Kerugian Selisih Kurs belum terealisasi	(142.880.881)		
Jumlah	(2.354.538.149)	(9.680)	24323641,2

Pos-Pos Luar Biasa
Rp0

D.12 POS-POS LUAR BIASA

Pos Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Pada periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tidak terdapat nilai pada Pos-pos Luar Biasa.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp5.356.986.583.499,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5.356.986.583.499,00 dan Rp5.412.217.690.928,00

Surplus(defisit) LO
Defisit
Rp(1.055.181.861.785,00)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah defisit sebesar Rp(1.055.181.861.785,00) dan Rp(846.921.944.507,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, sampai dengan pos luar biasa.

Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan
Mendasar Rp0

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar

Tidak terdapat transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023.

E.4 Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas tahun pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp23.130.854.646 dan Rp(124.579.277.200,00) yaitu sebagai berikut :

Penyesuaian nilai aset
Rp0

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Tidak terdapat transaksi Penyesuaian nilai Aset pada periode 31 Desember 2024 dan 2023.

Koreksi Nilai
Persediaan

Rp3.419.045.379,00

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Nilai Koreksi Nilai Persediaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5.071.380.177,00 dan Rp3.419.045.379,00.

*Koreksi Atas
Reklasifikasi
Rp177.286.850*

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Nilai Koreksi Atas Reklasifikasi pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp177.286.850 dan Rp0. Penjelasan koreksi atas reklasifikasi adalah Perubahan ukuran benih dan selisih penyusutan atau nilai buku aset tetap yang di koreksi kodefikasi barangnya serta koreksi pengurangan nilai atas temuan-temuan itjen.

*Selisih Revaluasi Aset
Tetap Rp0*

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap pada Periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Revaluasi tersebut berasal dari selisih revaluasi nilai aset tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan.

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2024

Jenis Aset	Nilai Koreksi
Ekuitas Transaksi Lainnya	-
Revaluasi Aset Tetap	-
Jumlah	-

*Koreksi Nilai Aset
Tetap Non Revaluasi
Rp15.241.336.951,00*

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp15.241.336.951 dan Rp(127.729.982.115,00). Koreksi ini berasal dari koreksi nilai dikarenakan temuan Itjen.

Rincian Koreksi Aset Teap Non Revaluasi Tahun 2024

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	15.242.795.285
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	(1.458.334)
	-

Jumlah	15.241.336.951
---------------	-----------------------

Koreksi Lain-lain
Rp2.640.850.668,00

E.4.6 Koreksi Lain-lain

Koreksi lain-lain untuk periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp2.640.850.668 dan Rp1.659.536. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi ini berupa koreksi beban penyisihan piutang jurnal awal tahun.

NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA	(85.047.460,)	penyisihan temuan BPK tahun 2020 yang dilunasi tahun 2023
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	(825,)	Penyisihan piutang tidak tertagih TA.2023
BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (BLUPPB) KARAWANG	(2.403.127.917,)	koreksi pencatatan atas kesalahan input nilai harga satuan
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE	(17,)	Penyisihan piutang tidak tertagih TA.2023
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR	(149.928.000,)	Penyisihan piutang tidak tertagih TA.2020
SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	(2.746.449,)	Temuan BPK terkait Tugas belajar sebelum tahun 2023
TOTAL	(2.640.850.668,)	

Transaksi Antar Entitas
Rp1.081.522.594.857,00

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.081.522.594.857,00 dan Rp916.270.114.278,00 Rincian Transaksi antar Entitas terdiri dari:

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	1.085.122.366.948
Diterima dari Entitas Lain	(29.626.772.546)
Transfer Keluar	(182.705.051.724)
Transfer Masuk	181.954.168.724
Pengesahan Hibah Langsung	26.777.883.455

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
	-
Jumlah	1.081.522.594.857

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar Rp(29.626.772.546,00) sedangkan DKEL sebesar Rp1.085.122.366.948,00 .

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain.

Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp(182.705.051.724,00). Sedangkan transfer masuk sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp181.954.168.724,00.

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan hibah langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp26.777.883.455,00 dari total yang akan diterima sepanjang tahun 2023.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung

TA 2024

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	Sustainable Marine Aquaculture Development	Barang dan Jasa	2.206.723.470

	(SMADI) Project		
2	SMART-Fish 2 (UNIDO)	Jasa	6.165.993.717
3	The Fleming Fund Partnership for Antimicrobial Resistance Control on Aquaculture in Indonesia	Barang dan Jasa	10.207 .527 .622
4	Fleming Fund Partnership for Antimicrobial Resistance Control on Aquaculture No Register Hibah 2W9DJRQA dan Nomor Perjanjian GA-11.03.2021	Renovasi Gedung Laboratorium sebesar Rp 3.706.014.540,- serta Peralatan dan Software Laboratorium sebesar Rp 4.491.624.106,-	8.197.638.646
Jumlah			26.777.883.445

Ekuitas Akhir
Rp5.406.458.171.217,00

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5.406.458.171.217,00 dan RpRp5.356.986.583.499,00.

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

Profil

Sejak era reformasi bergulir di tengah percaturan politik Indonesia, sejak itu pula perubahan kehidupan mendasar berkembang di hampir seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti merebaknya beragam krisis yang melanda Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya adalah berkaitan dengan Orientasi Pembangunan. Dimasa Orde Baru, orientasi pembangunan masih terkonsentrasi pada wilayah daratan.

Sektor kelautan dapat dikatakan hampir tak tersentuh, meski kenyataannya sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam, baik jenis dan potensinya. Potensi sumberdaya tersebut terdiri dari sumberdaya yang dapat diperbaharui, seperti sumberdaya perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya laut dan pantai, energi non konvensional dan energi serta sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui seperti sumberdaya minyak dan gas bumi dan berbagai jenis mineral. Selain dua jenis sumberdaya tersebut, juga terdapat berbagai macam jasa lingkungan lautan yang dapat dikembangkan untuk pembangunan kelautan dan perikanan seperti pariwisata bahari, industri maritim, jasa angkutan dan sebagainya. Tentunya inilah yang mendasari Presiden Abdurrahman Wahid dengan Keputusan Presiden No.355/M Tahun 1999 tanggal 26 Oktober 1999 dalam Kabinet Periode 1999-2004 mengangkat Ir. Sarwono Kusumaatmaja sebagai Menteri Eksplorasi Laut.

Selanjutnya pengangkatan tersebut diikuti dengan pembentukan Departemen Eksplorasi Laut (DEL) beserta rincian tugas dan fungsinya melalui Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tanggal 10 November 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen. Ternyata penggunaan nomenklatur DEL tidak berlangsung lama karena berdasarkan usulan DPR dan berbagai pihak, telah dilakukan perubahan penyebutan dari Menteri Eksplorasi Laut menjadi Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 145 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999. Perubahan ini ditindaklanjuti dengan penggantian nomenklatur DEL menjadi Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (DELP) melalui Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1999 tanggal 1

Desember 1999.

Adapun Perubahan paradigma 2021-2024 :

- Kebijakan Pembangunan perikanan budidaya tidak hanya focus pada produksi.
- Perubahan paradigma menuju Perikanan Budidaya Berkelanjutan, Mandiri, Berdaya Saing, serta fokus pada komoditas bernilai ekonomis tinggi, antara lain vaname, lobster, kepiting, rumput laut, dan komoditas ikan air tawar.
- Perikanan budidaya harus menerapkan konsep Blue Economy, dengan menempatkan ‘Ekologi sebagai Panglima’ untuk mendukung keberlanjutan ekonomi dan lingkungan.

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden No. 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, Nomenklatur Departemen Kelautan dan Perikanan berubah menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Terbentuknya Kementerian Kelautan dan Perikanan pada dasarnya merupakan sebuah tantangan, sekaligus peluang bagi pengembangan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Artinya, bagaimana KKP ini menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu sektor andalan yang mampu mengantarkan Bangsa Indonesia keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Setidaknya ada beberapa alasan pokok yang mendasarinya.

Pertama, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau 17.508 dan garis pantai sepanjang 81.000 km tidak hanya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia tetapi juga menyimpan kekayaan sumberdaya alam laut yang besar dan belum dimanfaatkan secara optimal.

Kedua, selama beberapa dasawarsa, orientasi pembangunan negara ini lebih mangarah ke darat, mengakibatkan sumberdaya daratan terkuras. Oleh karena itu wajar jika sumberdaya laut dan perikanan tumbuh ke depan.

Ketiga, dikaitkan dengan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatnya kesadaran manusia terhadap arti penting produk perikanan dan kelautan bagi kesehatan dan kecerdasan manusia, sangat diyakini masih dapat meningkatkan produk perikanan dan

kelautan di masa datang.

Keempat, kawasan pesisir dan lautan yang dinamis tidak hanya memiliki potensi sumberdaya, tetapi juga memiliki potensi bagi pengembangan berbagai aktivitas pembangunan yang bersifat ekstraksi seperti industri, pemukiman, konservasi dan sebagainya.

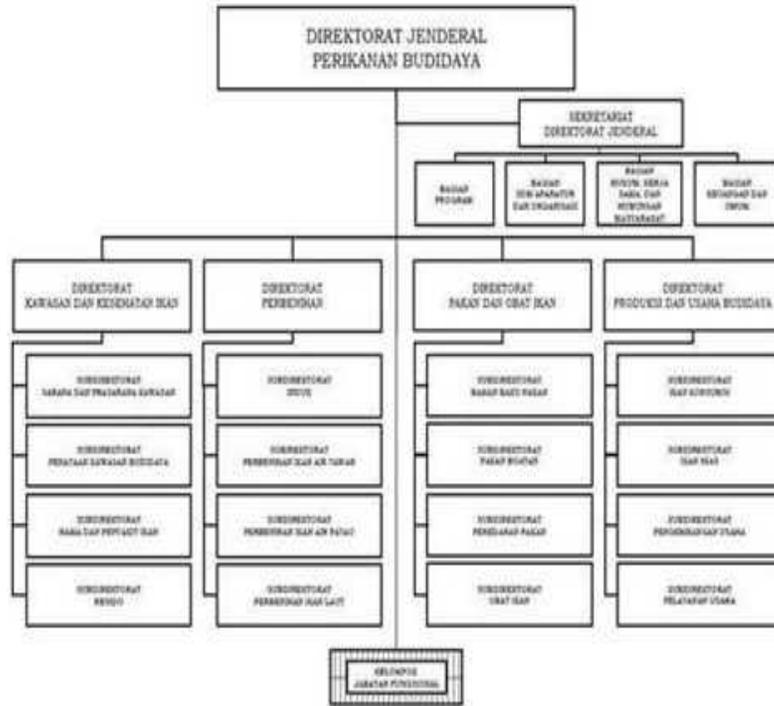
Setelah mengalami beberapa kali perubahan, susunan organisasi KKP khususnya Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2020, adalah sebagai berikut:

Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB), yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budidaya.

Susunan organisasi Ditjen PB terdiri dari: Sekretariat Direktorat Jenderal; Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan; Direktorat Perbenihan; Direktorat Pakan dan Obat Ikan; Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya; Kelompok Jabatan Fungsional, serta didukung oleh 15 Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Pada tahun 2020, tepatnya tanggal 25 September 2020 dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan terdapat perubahan struktur organisasi unit kerja eselon II di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dapat digambarkan sebagai berikut :



Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkat pembangunan perikanan budidaya adalah :

1. Peningkatan kontribusi ekonomi sub-sektor perikanan budidaya terhadap perekonomian sektor perikanan nasional:
 - a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan budidaya;
 - b. Mengoptimalkan pengelolaan kawasan perikanan budidaya secara berkelanjutan; dan
 - c. Meningkatkan produksi perikanan budidaya secara berkelanjutan.
2. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di DJPB, yakni meningkatkan kinerja Reformasi Birokrasi DJPB.

Entitas berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya berkomitmen dengan visi **“Terwujudnya masyarakat perikanan budidaya yang sejahtera dan sumber daya perikanan budidaya yang berkelanjutan”** untuk mewujudkan **“Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong.”** Adapun misi KKP menjalankan 4 (empat) dari 9 (sembilan) Misi Presiden, yaitu:

1. Misi ke-1: Peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan daya saing SDM dan pengembangan inovasi dan riset kelautan dan perikanan;
2. Misi ke-2: Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing melalui peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional;
3. Misi ke-4: Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan; dan
4. Misi ke-8: Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan tata kelola pemerintahan di KKP.

Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya menjalankan Misi ke-2, yaitu **“Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing melalui peningkatan kontribusi ekonomi sub-sektor perikanan budidaya terhadap perekonomian sektor perikanan nasional”**. Misi utama DJPB di atas didukung dengan Misi ke-8, yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh seluruh unit kerja DJPB di pusat dan daerah.

Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan budidaya
- Ekonomi sektor perikanan budidaya meningkat
- Pengelolaan kawasan perikanan budidaya yang berkelanjutan
- Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
- Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumberdaya perikanan budidaya yang partisipatif
- Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya Kebijakan Umum Perencanaan berdasarkan Rapat Koordinasi Pembangunan

Tingkat Pusat (Rakorbangpus) antara lain:

1. Penyusunan Rencana Kerja memperhatikan sasaran utama (outcome) kontribusi KKP terhadap prioritas nasional, yaitu Prioritas Ketahanan Pangan, Pembangunan Wilayah, pendidikan dan Kesehatan
2. Kegiatan dilakukan dengan Pendekatan Kebijakan Money Follow Program dan Kegiatan (Prioritas)
3. Setiap unit kerja Eselon I agar menyusun rencana kegiatan, hingga komponen kegiatan dan lokasinya secara lebih teliti, detail dan rinci agar sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan
4. Pengalokasian anggaran setiap detail kegiatan memperhatikan kaidah-kaidah efektivitas, efisiensi, suffisiensi, outcome oriented, transparan dan akuntabel
5. Unit kerja Eselon I mengefisienkan biaya operasional dan belanja aparatur, serta meningkatkan alokasi anggaran yang bermanfaat untuk masyarakat (stakeholders). Efisiensi dilakukan dengan pembatasan perjalanan dinas, pertemuan (rapat, seminar, lokakarya, peresmian kantor/proyek), dan biaya pendukung lainnya
6. Unit kerja Eselon I menetapkan satuan harga per unit (Unit cost) untuk setiap output/komponen/detail barang/jasa per lokasi kegiatan termasuk komponen biaya pembentuk yang tidak dapat dipisahkan dari output/komponen/detail barang/jasa
7. Melakukan Pengendalian Program dan kegiatan untuk memastikan kegiatan yang direncanakan dapat berjalan dengan baik
8. Integrasi perencanaan dan informasi Kinerja Anggaran, antara lain :
 - a. Unit Eselon I melakukan pengisian rencana dan Informasi Kinerja dalam sistem Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA), dengan memuat program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan detail Kegiatan sampai dengan level komponen, baik prioritas maupun reguler (non prioritas)
 - b. Dalam menentukan Indikator kinerja, harus memperhatikan kriteria sebagai berikut :
 - 1) Specific: spesifik, tidak bisa diartikan lain;
 - 2) Measurable: memiliki ukuran yang jelas;
 - 3) Achievable: realistis dan dapat dicapai;
 - 4) Relevant: sesuai kebutuhan;

- 5) Timeline: memiliki tahapan dan waktu yang jelas dalam pencapaiannya.
 - c. Setiap Komponen kegiatan yang disusun harus berkaitan dan dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Sasaran KKP dan Indikator Kinerja Program
 - d. Penyusunan komponen kegiatan agar memperhatikan :
 - 1) Pelaku/penerima hasil kegiatan/bantuan;
 - 2) Unit cost dalam rangka pencapaian output;
 - 3) Kebutuhan masyarakat dan sara prasarana penunjang;
 - 4) Sumber daya pelaksana kegiatan;
 - 5) Akses pasar dan teknologi yang akan digunakan;
 - 6) Lokasi prioritas dan komoditas utama yang menjadi target.
9. Rencana Belanja
- a. Biaya Operasional (Belanja Pegawai dan Belanja Operasional)
 - 1) Unit eselon I menyediakan belanja pegawai termasuk uang makan (PNS), belanja oprasional, dan pemeliharaan perkantoran yang dihitung secara cermat sesuai kebutuhan riil selama 1(satu) tahun
 - 2) Penyusunan biaya operasional dalam rangka mendapatkan alokasi biaya operasional yang lebih realistis adalah sebagai berikut :
 - a) Belanja gaji pegawai (termasuk uang makan, lembur, tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji dan tunjangan kinerja pegawai) pada pagu indikatif didasarkan data realisasi anggaran sampai bulan berjalan dan belum memasukkan asumsi kenaikan gaji pokok dan kenaikan tunjangan kinerja. Kenaikan hanya diperkenankan berbentuk acress maksimum 3,5%;
 - b) Belanja barang operasional perkantoran dan pemeliharaan aset dihitung berdasarkan data SIMAK BMN dan realisasi sampai bulan berjalan dengan memperhitungkan penambahan aset pada tahun berjalan dan kenaikan standar biaya.
 - b. Biaya Non Operasional (Kegiatan Prioritas dan Pendukung)

- 1) Pengalokasian biaya non operasional harus memperhatikan :
 - a) 9 (sembilan) agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita)
 - b) Kegiatan prioritas yang merupakan arahan Presiden dalam Sidang Kabinet dan Rapat Terbatas serta arahan Menteri Kelautan dan Perikanan
 - c) Pencapaian target indikator Kinerja Sasaran Kementerian Kelautan dan Perikanan
 - d) Kegiatan dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang/Peraturan Pemerintah/peraturan Presiden/Keputusan Presiden /Instruksi Presiden
 - e) Kebutuhan untuk kegiatan yang bersifat tahun jamak (multy years contract) yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan, dan
 - f) Kebutuhan dana pendamping untuk kegiatan yang didanai dari Pinjaman dana/atau Hibah Luar Negeri (bila ada).
- 2) Setiap keluaran yang akan dilaksanakan harus sudah memperhatikan kesiapan yang dipersyaratkan seperti TOR/KAK dan RAB usulan daerah, lahan yang clear and clean, calon penerima manfaat, rencana kelembagaan pengelola, kesiapan biaya operasional, kesiapan dokumen pendukung teknis, bisnis plan, dokumen perizinan, kegiatan resiko, dokumen perizinan dan lain sebagainya.
- 3) Pengalokasian anggaran untuk satker Dekonsentrasi agar memperhatikan kinerja pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya serta capaian indikator kerjanya.

Sebagaimana 48/PERMEN-KP/2020 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai berikut :

Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Direktorat Jenderal (Ditjen) Perikanan Budidaya mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan perikanan budidaya.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Ditjen Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, serta peningkatan usaha budidaya;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, serta peningkatan usaha budidaya;
- 3) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, serta peningkatan usaha budidaya;
- 4) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, serta peningkatan usaha budidaya;
- 5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan

lainnya, peningkatan produksi perikanan budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, serta peningkatan usaha budidaya;

- 6) pelaksanaan administrasi Ditjen Perikanan Budidaya; dan
- 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Struktur Organisasi

Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya terdiri atas:

- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal;
- 2) Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Budidaya;
- 3) Direktorat Perbenihan;
- 4) Direktorat Pakan dan Obat Ikan;
- 5) Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya;
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.

Eselon II

1. Sekretariat Direktorat Jenderal

a. Tugas Pokok

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- 1) Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran;
- 2) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, Sumber Daya Manusia Aparatur, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- 3) pembinaan dan penyiapan bahan penataan organisasi dan tatalaksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- 4) koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan pelaksanaan advokasi hukum; dan hubungan masyarakat, kerjasama, dan dokumentasi;
- 5) pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah.

2. Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Budidaya

a. Tugas Pokok

Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana kawasan, penataan kawasan, hama dan penyakit ikan, residu dan laboratorium.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Budidaya menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, penyediaan, penataan, pemanfaatan dan pemantauan sarana, prasarana dan lingkungan di kawasan pembudidayaan ikan yang memenuhi standar teknis, pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit ikan, pemantauan residu obat ikan dan kontaminan, serta kapasitas laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;
- 2) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, penyediaan, penataan, pemanfaatan dan pemantauan sarana, prasarana dan lingkungan di kawasan pembudidayaan ikan yang memenuhi standar teknis, pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit ikan, pemantauan residu obat ikan dan kontaminan, serta kapasitas laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;
- 3) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, penyediaan, penataan, pemanfaatan dan pemantauan sarana, prasarana dan lingkungan di kawasan pembudidayaan ikan yang memenuhi standar teknis, pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit ikan, pemantauan residu obat ikan dan kontaminan, serta kapasitas laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;
- 4) penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, penyediaan, penataan, pemanfaatan dan pemantauan sarana, prasarana dan lingkungan di kawasan pembudidayaan ikan yang memenuhi standar teknis, pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit ikan, pemantauan residu obat ikan dan kontaminan, serta kapasitas laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;
- 5) penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, penyediaan, penataan, pemanfaatan dan pemantauan sarana, prasarana dan lingkungan di kawasan pembudidayaan ikan yang memenuhi standar teknis, pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit ikan,

pemantauan residu obat ikan dan kontaminan, serta kapasitas laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan; dan

- 6) pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan direktorat.

3. Direktorat Perbenihan

a. Tugas Pokok

Direktorat Perbenihan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang induk, perbenihan ikan air tawar, perbenihan ikan air payau dan perbenihan ikan laut.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Perbenihan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyediaan, peredaran dan pemantauan induk, mutu benih ikan air tawar, air payau, dan ikan laut, pertimbangan teknis pemasukan ikan hidup, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) perbenihan, penerapan cara pembenihan ikan yang baik, serta rekomendasi pasca pelepasan induk unggul;
- 2) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan, peredaran dan pemantauan induk, mutu benih ikan air tawar, air payau, dan ikan laut, pertimbangan teknis pemasukan ikan hidup, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) perbenihan, penerapan cara pembenihan ikan yang baik, serta rekomendasi pasca pelepasan induk unggul;
- 3) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan, peredaran dan pemantauan induk, mutu benih ikan air tawar, air payau, dan ikan laut, pertimbangan teknis pemasukan ikan hidup, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) perbenihan, penerapan cara pembenihan ikan yang baik, serta rekomendasi pasca pelepasan induk unggul;
- 4) penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan, peredaran dan pemantauan induk, mutu benih ikan air tawar, air payau, dan ikan laut, pertimbangan teknis pemasukan ikan hidup, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) perbenihan, penerapan cara

- pembenihan ikan yang baik, serta rekomendasi pasca pelepasan induk unggul;
- 5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan, peredaran dan pemantauan induk, mutu benih ikan air tawar, air payau, dan ikan laut, pertimbangan teknis pemasukan ikan hidup, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) perbenihan, penerapan cara pembenihan ikan yang baik, serta rekomendasi pasca pelepasan induk unggul; dan
 - 6) penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan direktorat.

4. Direktorat Pakan dan Obat Ikan

a. Tugas Pokok

Direktorat Pakan dan Obat Ikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang bahan baku pakan, pakan buatan, peredaran pakan dan obat ikan dan penerapan cara pembuatan pakan ikan dan obat ikan yang baik.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pakan dan Obat Ikan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyediaan, pendaftaran, peredaran dan pemantauan bahan baku pakan, pakan buatan, pakan alami dan obat ikan, surveilen mutu bahan baku pakan, pakan dan obat ikan, penerapancara pembuatan pakan ikan, dan obat ikan yang baik, serta survei kepuasan masyarakat;
- 2) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan, pendaftaran, peredaran dan pemantauan bahan baku pakan, pakan buatan, pakan alami dan obat ikan, surveilen mutu bahan baku pakan, pakan dan obat ikan, penerapancara pembuatan pakan ikan dan obat ikan yang baik, serta survei kepuasan masyarakat;
- 3) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan, pendaftaran, peredaran dan pemantauan bahan baku pakan, pakan buatan, pakan alami dan obat ikan, surveilen mutu bahan baku pakan, pakan dan obat ikan, penerapancara pembuatan pakan ikan dan obat ikan yang baik, serta survei kepuasan masyarakat;

- 4) penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan, pendaftaran, peredaran dan pemantauan bahan baku pakan, pakan buatan, pakan alami dan obat ikan, surveilen mutu bahan baku pakan, pakan dan obat ikan, penerapancara pembuatan pakan ikan dan obat ikan yang baik, serta survei kepuasan masyarakat;
- 5) penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan, pendaftaran, peredaran dan pemantauan bahan baku pakan, pakan buatan, pakan alami dan obat ikan, surveilen mutu bahan baku pakan, pakan dan obat ikan, penerapancara pembuatan pakan ikan dan obat ikan yang baik, serta survei kepuasan masyarakat; dan
- 6) pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

5. Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya

a. Tugas Pokok

Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang produksi ikan konsumsi, ikan hias, pengembangan usaha, dan pelayanan usaha perikanan budidaya.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Produksi dan Usaha menyelenggarakan fungsi:

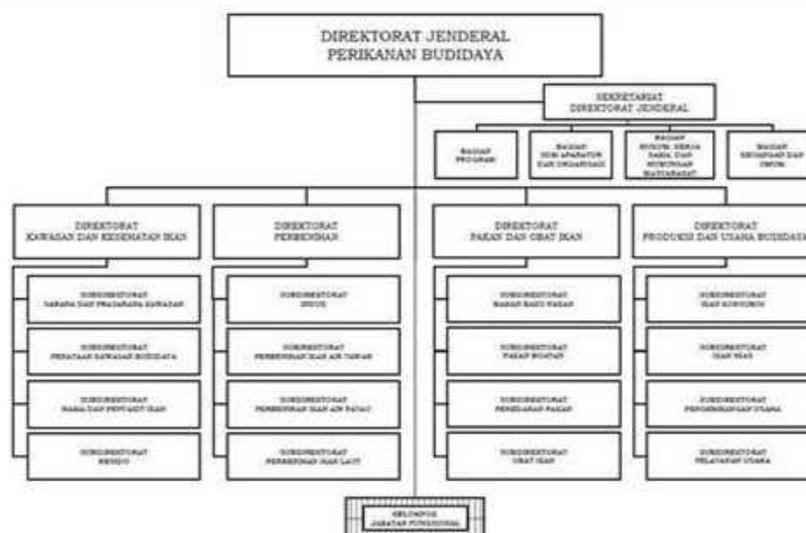
- 1) penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, penyediaan, penerapan teknologi pembesaran ikan konsumsi air tawar, payau, laut dan ikan hias, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) ikan konsumsi dan ikan hias, penerapan cara budidaya ikan yang baik, kelembagaan, kemitraan, pembiayaan, investasi, perlindungan pembudidaya, perizinan dan rekomendasi usaha pembudidayaan ikan;
- 2) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, penyediaan, penerapan teknologi pembesaran ikan konsumsi air tawar, payau, laut dan ikan hias, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) ikan konsumsi dan ikan hias, penerapan cara budidaya ikan yang baik, kelembagaan, kemitraan, pembiayaan, investasi, perlindungan pembudidaya, perizinan dan rekomendasi usaha pembudidayaan ikan;

- 3) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, penyediaan, penerapan teknologi pembesaran ikan konsumsi air tawar, payau, laut dan ikan hias, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) ikan konsumsi dan ikan hias, penerapan cara budidaya ikan yang baik, kelembagaan, kemitraan, pembiayaan, investasi, perlindungan pembudidaya, perizinan dan rekomendasi usaha pembudidayaan ikan;
- 4) penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, penyediaan, penerapan teknologi pembesaran ikan konsumsi air tawar, payau, laut dan ikan hias, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) ikan konsumsi dan ikan hias, penerapan cara budidaya ikan yang baik, kelembagaan, kemitraan, pembiayaan, investasi, perlindungan pembudidaya, perizinan dan rekomendasi usaha pembudidayaan ikan;
- 5) penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, penyediaan, penerapan teknologi pembesaran ikan konsumsi air tawar, payau, laut dan ikan hias, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) ikan konsumsi dan ikan hias, penerapan cara budidaya ikan yang baik, kelembagaan, kemitraan, pembiayaan, investasi, perlindungan pembudidaya, perizinan dan rekomendasi usaha pembudidayaan ikan; dan
- 6) Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya adalah sebagai berikut :



Adapun Program Terobosan KKP Berbasis Ekonomi Biru

1. Penambahan Luas Kawasan Konservasi Laut
2. Penangkapan Ikan terukur berbasis Kuota
3. Pengembangan Budidaya Laut, Pesisir, dan Darat Secara Berkelanjutan
4. Pengelolaan dan Pengawasan Pesisir dan pulau-pulau kecil
5. Pembersihan sampah plastik di Laut

Adapun program dan kegiatan prioritas Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Produksi untuk Pemenuhan Kebutuhan Pangan dan Pembinaan Penerapan Keamanan Pangan
2. Pembangunan Modeling Komoditas Unggulan (Udang, Nila Salin, Rumput Laut, Lobster, Kepiting)
3. Pembangunan Modeling Kampung Perikanan Budi Daya.

Berdasarkan Permen KP No 47 tahun 2021 tentang kampung perikanan budidaya :



Adapun kegiatan prioritas Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2024 adalah sebagai berikut :



Kondisi	Modelling dan Revitalisasi Tambak Udang Berkelanjutan	Hilirisasi	Multiplier Effect
<p>Market Size USD 64,8 miliar (2024), destinasi mencapai USD 149 miliar (2034)</p> <p>Market Share Indonesia 6,7% dari pasar global (2022)</p> <p>Luas tambak tradisional 247.803 Ha</p> <p>Produktivitas masih rendah 0,6 ton/Ha/siklus</p>	<p>Modelling Tambak Udang: Kebumen dan Sumba Timur</p> <p>Revitalisasi Tambak Udang: Aceh Timur, Aceh Tamiang, Lampung Selatan, Bui, Sukasena, Cianjur, Lampung Timur, Sumbawa, Muna, Morowali Utara, Mamuju.</p> <p>Peningkatan Teknologi</p>	<p>Kebutuhan pasca panen</p> <p>Cold storage</p> <p>Unit Pengolah Udang</p> <p>Pabrik es</p>	<p>Peningkatan produktivitas dari semula 0,6 menjadi 40 ton/Ha/siklus</p> <p>Peningkatan penyerapan tenaga kerja</p> <p>Peningkatan ekspor udang Indonesia menjadi USD 2,1 miliar pada 2024</p> <p>Kesejahteraan petambak udang meningkat</p> <p>Pertumbuhan ekonomi wilayah</p> <p>Peningkatan pendapatan negara (pajak dan PNBP)</p>
<p>Market Size USD 14,4 miliar (2024), destinasi mencapai USD 23,0 miliar (2034)</p> <p>Market Share Indonesia 9,7% dari pasar global (2022)</p> <p>Produktivitas masih rendah 0,6 ton/Ha/tahun</p>	<p>Modelling Budidaya Ikan Nila Salin (BINS) Karawang</p> <p>Program budidaya nila salin melalui revitalisasi tambak udang di Pantura seluas 78.000 ha (tambak udang idle) dan mendorong budidaya di danau (lake based) ke daratan (land based).</p> <p>Peningkatan Teknologi</p>	<p>Kebutuhan pasca panen</p> <p>Cold Storage</p> <p>Unit Pengolah Nila</p> <p>Pabrik es</p>	<p>Peningkatan produktivitas dari semula 0,6 menjadi 100 ton/Ha/tahun</p> <p>Peningkatan penyerapan tenaga kerja</p> <p>Peningkatan ekspor nila Indonesia menjadi USD 77 juta pada 2024</p> <p>Kesejahteraan petambak nila meningkat</p> <p>Pertumbuhan ekonomi wilayah</p> <p>Peningkatan pendapatan negara (pajak dan PNBP)</p>
<p>Market Size USD 7,8 miliar (2023), destinasi mencapai USD 19,6 miliar (2033)</p> <p>Market Share Indonesia 18,4% dari pasar global (2022)</p> <p>Produktivitas masih rendah 18 ton/Ha/siklus</p> <p>Luas lahan eksisting 89.549 Ha</p> <p>Kawasan budidaya rumput laut tidak tertata dan penggunaan bibit non-kultur jaringan</p>	<p>Modelling Budidaya Rumput Laut</p> <p>Daerah Pengembangan Modelling: Wakatobi (2023), Maluku Tenggara dan Rote Ndao (2024)</p> <p>Peningkatan Teknologi</p>	<p>Kebutuhan pasca panen</p> <p>Rak pengering</p> <p>Unit Pengolah Rumput Laut</p> <p>Oudang</p>	<p>Peningkatan produktivitas dari semula 18 menjadi 60 ton/Ha/siklus</p> <p>Peningkatan penyerapan tenaga kerja</p> <p>Peningkatan ekspor rumput laut Indonesia menjadi USD 658 juta pada 2024</p> <p>Peningkatan kesejahteraan pembudidaya rumput laut</p> <p>Pertumbuhan ekonomi wilayah</p> <p>Peningkatan pendapatan negara (pajak dan PNBP)</p>

Kondisi	Modelling Budidaya Lobster Berbasis Kawasan	Hilirisasi	Multiplier Effect
<ul style="list-style-type: none"> Market Size USD 8,7 miliar (2024), desimalisasi mencapai USD 13,5 miliar (2029) Market Share Indonesia 0,5% dari pasar global (2022) Indonesia sebagai natural hatchery benih lobster Kegiatan budidaya lobster masih sangat sedikit dan produktivitasnya rendah 	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong penguatan budidaya lobster dengan cara kerjasama dengan negara yang sudah berkembang budidaya lobsternya untuk berinvestasi lobster di Indonesia Prasarana modeling: 70 unit kerangkeng ukuran L <p>Peningkatan Teknologi</p>	<ul style="list-style-type: none"> Kebutuhan pasca panen Cold Storage Unit Pengolah Lobster 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan produktivitas menjadi 20 ton/Ha/tahun Peningkatan penyerapan tenaga kerja Peningkatan ekspor lobster Indonesia menjadi USD 25 juta pada 2024 Kesejahteraan pembudidaya lobster meningkat Pertumbuhan ekonomi wilayah Peningkatan pendapatan negara (pajak dan PNBP)

Kondisi	Modelling Budidaya Kepiting Berbasis Kawasan	Hilirisasi	Multiplier Effect
<ul style="list-style-type: none"> Market Size (2023) USD 879 juta, desimalisasi mencapai USD 1,51 miliar (2033) Market Share Indonesia 1,9% dari pasar global (2022) Produktivitas masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> Luas model tambak 20 Ha <p>Peningkatan Teknologi</p>	<ul style="list-style-type: none"> Kebutuhan pasca panen Cold Storage Unit Pengolah Kepiting 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan produktivitas menjadi 7,92 ton/Ha/tahun Peningkatan penyerapan tenaga kerja Peningkatan ekspor kepiting Indonesia menjadi USD 476 juta pada 2024 Kesejahteraan petambak kepiting meningkat Pertumbuhan ekonomi wilayah Peningkatan pendapatan negara (pajak dan PNBP)

Konsep dan Penetapan KPB	Modeling Kampung Perikanan Budidaya Modern
<ul style="list-style-type: none"> Karakteristik KPB Modern: Kawasan yang maju, modern, canggih, dan teknologi baru (tidak bersifat konvensional) Kegiatan perikanan budidaya di masyarakat sudah menjadi "budaya", dalam arti sebagian besar kehidupan masyarakat bergantung dari usaha budidaya ikan Penetapan 210 Kampung PB melalui Kepmen KP No. 111 Tahun 2023 210 KPB: Nila 50, RI, 41, Ujung 13, Kepiting 6, Lobster 4, Lainnya 96 Tahun 2024 adalah persiapan penentuan 10 lokasi modeling Kampung PB Modern 	<p>Huba → On Farm → Huba</p> <p>Huba (Hatchery, Pakan) → On Farm (Quality Assurance, Kontrol kualitas air dan pakan, Digitalisasi sistem produksi dan marketing, Struktur Pemukiman, Sarana Produksi) → Huba (Pasar, UPI)</p> <p>NTPi: Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Meningkat</p> <p>PAD: Pendapatan Asli Daerah Meningkat</p> <p>Pendanaan: APBN dan APBD, Non-APBN, Sumber lain yang tidak mengikat</p> <p>Kegiatan: Budidaya ikan dilakukan oleh masyarakat (individu / kelompok)</p> <p>Pembiayaan: Didukung oleh KKP, Pemda, dan stakeholder lainnya</p>

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahunan TA. 2024 (*Unaudited*) ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahunan TA. 2024 (*Unaudited*) ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yang meliputi satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah entitas akuntansi di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Pembinaan Akuntansi Instansi adalah 50 entitas. Rincian entitas tersebut tersaji sebagai berikut:

Rekapitulasi Jumlah Entitas UAPPA-EI

No	Kode Es I	Uraian	Jumlah Jenis Kewenangan				Jumlah Satker
			K P	K D	D K	TP	
1	04	Kantor Pusat	1	-	-	-	1
2	04	Kantor Daerah	-	15	-	-	15
3	04	Tugas Pembantuan	-	-	34	-	34
Jumlah			1	15	34	0	50

Mulai penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022, rekonsiliasi eksternal dilakukan melalui Aplikasi SAKTI yaitu aplikasi berbasis web yang dikembangkan dalam rangka proses rekonsiliasi data transaksi keuangan dan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Sekretariat Jenderal dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahunan T.A.2024 (*Unaudited*) telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yang merupakan entitas pelaporan dari Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja**(3) Belanja**

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban**(4) Beban**

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset**(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar**a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan

(*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama

dengan atau lebih dari Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015.

Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun

Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun
--	---------

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(7) Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka

Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(8) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis
Akrual
Pertama Kali*

(9) Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No.71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

**Penjelasan
Umum
Lainnya**

**Entitas
Penyusun
Laporan
Keuangan**

A.6 Penjelasan Umum Lainnya

1. Entitas Penyusun Laporan Keuangan

Dalam pelaksanaan pelaporan keuangan, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya menggunakan pola pelaporan berjenjang yang disusun mulai tingkat satker. Jumlah satker yang melakukan penyusunan atas Laporan keuangan Lingkup DJPB dengan perbandingan antara tahun 2024 dan 2023 dapat digambarkan dalam rincian jumlah satker aktif adalah sebagai berikut.

Tabel A.1
Perbandingan Jumlah Satker Yang Melakukan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 dan 2023

No.	Eselon I	2024					2023					+/-
		KP	KD	DK	TP	Σ	KP	KD	DK	TP	Σ	
1	DJPB	1	15	34		50	1	15	34		50	0
a	Σ	1	15	34		50	1	15	34		50	0

**Rekening
Koran**

2. Rekening Koran

Pada pelaksanaan kegiatan satuan kerja dilingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, untuk menampung pencairan anggaran dan realisasi baik pendapatan maupun Belanja, menggunakan 50 rekening koran pada Bank Pemerintah dengan rincian sesuai dengan tahun penerbitan sebagai berikut.

Tabel A.2
Jumlah Rekening Koran Bank

Eselon I	NAMA BANK									TOTAL
	BRI	MANDIRI	BNI	BPD Sulawesi Tenggara	BPD Riau	BPD Kalimantan Barat	BPD Jawa Timur	Bank Syariah Indonesia	BTN	
DJPB	18	11	14	1	1	1	1	2	1	50
Grand Total	18	11	14	1	1	1	1	2	1	50

Satuan Kerja yang Menggunakan Anggaran PNBP

3. Satuan Kerja yang menggunakan Anggaran PNBP

Selain satuan kerja merealisasikan Anggarannya melalui Rupiah Murni, terdapat juga satuan kerja yang menggunakan anggaran berasal dari

Penggunaan Sebagian PNBPN, yang merupakan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang PNBPN Lingkup DJPN antara lain:

Tabel A.3
Satker Yang Menggunakan Anggaran Berasal Dari Penggunaan Sebagian PNBPN

Eselon I	Jumlah satker	Pagu	Realisasi
DJPB	15	11.634.521.000	11.475.250.182
Jumlah	15	11.634.521.000	11.475.250.182

Informasi Kepegawaian

4. Informasi Kepegawaian

Data Pegawai Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya berdasarkan simpeg pada saat disusunnya Laporan ini, Jumlah Pegawai DJPN dari Tahun 2017 – 2024 terdiri dari

Tabel A.4
Data Pegawai Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

NO	UNIT KERJA		TAHUN						
	PERMEN KP NO.23 TAHUN 2015	PERMEN KP NO.6 TAHUN 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	DITJENKAN BUDIDAYA	DITJENKAN BUDIDAYA	1418	1424	1356	1313	1309	1195	1252
	TOTAL		1418	1424	1356	1313	1309	1195	1252

No.	Negara/Partner	Kerja Sama	Dokumen Kerja Sama	Materi	Progress/Keterangan	Tindak Lanjut/Catatan
1	Financing Fund - UK	Agricultural Resilience (AAR) Grant Agreement (GA)	MOU/TA/AA	Dokumen telah ditandatangani secara online oleh kedua pihak, UK dan DMO United Kingdom di London pada tanggal 11 Maret 2022 dan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2022. Tahap 1A telah dilaksanakan sesuai dengan 11 Maret 2022.	1.) Taper kerja sama strengthening AAR and AAR surveillance in aquaculture, dengan judul strengthening partner for inspection of fish disease and aquaculture environment (SUDA/SAPU) to implement AAR surveillance in aquaculture and AAM/AMR surveillance. 2.) Kerja sama telah berjalan dari 2020 - 2022 dengan Akademi KKP sektor 1 ENR AAR dengan nilai Rp 1 miliar 3022 sebesar UK 11.342.000.000.	1.) Taper dibatalkan kerjasama dan training baik secara daring maupun luring yang dibatalkan oleh UK dan AAR. Kementerian dan Kementerian 2.) Proses penandatanganan telah dilaksanakan dan penandatanganan MOU yang akan dilakukan dalam proses.
2	ICG	Promoting climate risk insurance for sustainable aquaculture development in Indonesia	Technical Arrangement (TA)	TA telah ditandatangani secara online oleh kedua pihak, DMO dan ICG. Ditandatangani oleh DMO dan ICG pada tanggal 3 Oktober 2020 dan secara bertahap pada saat ini, telah selesai 100 persen. Tanggal 14 Desember 2022 dan telah ada dokumen penandatanganan.	Kegiatan dalam kerja sama ini adalah: 1.) Publication of concept paper. 2.) Assessment of aquaculture insurance implementation. 3.) Training on climate change. 4.) Development of aquaculture climate or grant design.	1. Kerja sama ini melibatkan salah satu kegiatan prioritas Ditjen Perikanan Budidaya yaitu kegiatan Bantuan Penyelenggaraan Proyek Asuransi Perikanan Bagi Pemilik Usaha Kecil (APRIK), yang sesuai dengan mandat UU Nomor 7 tahun 2020 tentang Perimbangan dan Pemertayaan. 2. Kerja sama ini melibatkan kegiatan pelatihan on line yang melibatkan pegawai Ditjen PB dan asuransi jiwa keuangan di Indonesia. 3. Taper dibatalkan Proses Pengembangan, pelatihan online dan offline dengan tahun realisasi 2020 - 2022.
3	ICRAR	Forum eda kerja sama komisi dengan GFB, bidang Mutu/Kualitas/Manajemen untuk kerja sama berteknologi	MOU/KEP - ICRAR	Draft MOU/KEP dengan ICRAR telah mendapatkan masukan dari pihak ICRAR, dan pada tanggal 5 Mei 2022, MOU/KEP telah disetujui dan ditandatangani oleh kedua pihak. MOU/KEP ini bertujuan untuk meningkatkan mutu hasil produksi ikan air tawar untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor. MOU/KEP ini akan ditandatangani oleh kedua pihak pada tanggal 14 Desember 2022.	Mula tanggal 21 Mei 2022, Prof. Cive Jones, Program Leader/ICRAR telah melakukan kunjungan ke Ditjen Perikanan Budidaya untuk membahas mengenai program kerjasama ICRAR (Project P2/2020) yang merupakan sebuah nursery technology and business model for smallholder farmer in Indonesia telah dilakukan dengan ACARA sebagai Review (2020) terhadap Draft MOU/KEP. Dan telah ditandatangani kedua pihak telah ditandatangani oleh kedua pihak pada tanggal 14 Desember 2022.	DPR telah menyetujui endorse letter kepada ICRAR yang sama bertujuan mengizinkan kembali kunjungan GFB terhadap kerja sama lainnya tersebut, surat sedang dalam proses ke Ditjen, sesuai Project tersebut.
4	MO - Belanda	Kerjasama Akademi	Implementing Arrangement (IA)	Draft IA telah ditandatangani secara online oleh kedua pihak, MO dan Ditjen Perikanan Budidaya pada tanggal 3 Agustus 2021. Sebagai referensi dokumen IA ini adalah: Draft Document on Development of Maritime - Finance Marine and Fisheries Cooperation Programme dan Letter of Intent on the Establishment of a Maritime Maritime Dialogue. Kedua pemerintah, MO dan Belanda telah menandatangani IA ini pada tanggal 3 Agustus 2021.	Berikut kegiatan selanjutnya, data processing, building a database, seminar, buku penelitian (jurnal), seminar bahan kimia hasil uji dan penelitian untuk pengujian kualitas air ke laboratorium di lingkungan BPPI, Lampung, etc.	1) Januari 2022 telah dilakukan pertemuan 1 buah secara di "Terra House", 2) Pada April, Agustus dan Oktober 2022 LOCCAM telah memberikan bantuan ke Ditjen untuk uji kualitas air di 11 Peta 1 - 11 Juli 2022, dan telah ada LOCCAM berkolaborasi dengan BPPI, Lampung untuk berkolaborasi dan Field checking.
5	Norway/UEF	Sustainable Marine Aquaculture Development in Indonesia (SAMDI)	Technical Arrangement (TA)	TA telah ditandatangani secara online oleh kedua pihak, Norway dan Ditjen Perikanan Budidaya pada tanggal 10 Januari 2021 dan berakhir pada 31 Desember 2022. Sebagai tambahan TA SAMDI akan berlanjut dengan MOU dan kontrak dengan pihak ketiga PT. MACKINDO sebagai pelaksanaan administrasi pada pihak Indonesia meliputi: 1) dan 2) dan 3) dan 4) dan 5) dan 6) dan 7) dan 8) dan 9) dan 10) dan 11) dan 12) dan 13) dan 14) dan 15) dan 16) dan 17) dan 18) dan 19) dan 20) dan 21) dan 22) dan 23) dan 24) dan 25) dan 26) dan 27) dan 28) dan 29) dan 30) dan 31) dan 32) dan 33) dan 34) dan 35) dan 36) dan 37) dan 38) dan 39) dan 40) dan 41) dan 42) dan 43) dan 44) dan 45) dan 46) dan 47) dan 48) dan 49) dan 50) dan 51) dan 52) dan 53) dan 54) dan 55) dan 56) dan 57) dan 58) dan 59) dan 60) dan 61) dan 62) dan 63) dan 64) dan 65) dan 66) dan 67) dan 68) dan 69) dan 70) dan 71) dan 72) dan 73) dan 74) dan 75) dan 76) dan 77) dan 78) dan 79) dan 80) dan 81) dan 82) dan 83) dan 84) dan 85) dan 86) dan 87) dan 88) dan 89) dan 90) dan 91) dan 92) dan 93) dan 94) dan 95) dan 96) dan 97) dan 98) dan 99) dan 100) dan 101) dan 102) dan 103) dan 104) dan 105) dan 106) dan 107) dan 108) dan 109) dan 110) dan 111) dan 112) dan 113) dan 114) dan 115) dan 116) dan 117) dan 118) dan 119) dan 120) dan 121) dan 122) dan 123) dan 124) dan 125) dan 126) dan 127) dan 128) dan 129) dan 130) dan 131) dan 132) dan 133) dan 134) dan 135) dan 136) dan 137) dan 138) dan 139) dan 140) dan 141) dan 142) dan 143) dan 144) dan 145) dan 146) dan 147) dan 148) dan 149) dan 150) dan 151) dan 152) dan 153) dan 154) dan 155) dan 156) dan 157) dan 158) dan 159) dan 160) dan 161) dan 162) dan 163) dan 164) dan 165) dan 166) dan 167) dan 168) dan 169) dan 170) dan 171) dan 172) dan 173) dan 174) dan 175) dan 176) dan 177) dan 178) dan 179) dan 180) dan 181) dan 182) dan 183) dan 184) dan 185) dan 186) dan 187) dan 188) dan 189) dan 190) dan 191) dan 192) dan 193) dan 194) dan 195) dan 196) dan 197) dan 198) dan 199) dan 200) dan 201) dan 202) dan 203) dan 204) dan 205) dan 206) dan 207) dan 208) dan 209) dan 210) dan 211) dan 212) dan 213) dan 214) dan 215) dan 216) dan 217) dan 218) dan 219) dan 220) dan 221) dan 222) dan 223) dan 224) dan 225) dan 226) dan 227) dan 228) dan 229) dan 230) dan 231) dan 232) dan 233) dan 234) dan 235) dan 236) dan 237) dan 238) dan 239) dan 240) dan 241) dan 242) dan 243) dan 244) dan 245) dan 246) dan 247) dan 248) dan 249) dan 250) dan 251) dan 252) dan 253) dan 254) dan 255) dan 256) dan 257) dan 258) dan 259) dan 260) dan 261) dan 262) dan 263) dan 264) dan 265) dan 266) dan 267) dan 268) dan 269) dan 270) dan 271) dan 272) dan 273) dan 274) dan 275) dan 276) dan 277) dan 278) dan 279) dan 280) dan 281) dan 282) dan 283) dan 284) dan 285) dan 286) dan 287) dan 288) dan 289) dan 290) dan 291) dan 292) dan 293) dan 294) dan 295) dan 296) dan 297) dan 298) dan 299) dan 300) dan 301) dan 302) dan 303) dan 304) dan 305) dan 306) dan 307) dan 308) dan 309) dan 310) dan 311) dan 312) dan 313) dan 314) dan 315) dan 316) dan 317) dan 318) dan 319) dan 320) dan 321) dan 322) dan 323) dan 324) dan 325) dan 326) dan 327) dan 328) dan 329) dan 330) dan 331) dan 332) dan 333) dan 334) dan 335) dan 336) dan 337) dan 338) dan 339) dan 340) dan 341) dan 342) dan 343) dan 344) dan 345) dan 346) dan 347) dan 348) dan 349) dan 350) dan 351) dan 352) dan 353) dan 354) dan 355) dan 356) dan 357) dan 358) dan 359) dan 360) dan 361) dan 362) dan 363) dan 364) dan 365) dan 366) dan 367) dan 368) dan 369) dan 370) dan 371) dan 372) dan 373) dan 374) dan 375) dan 376) dan 377) dan 378) dan 379) dan 380) dan 381) dan 382) dan 383) dan 384) dan 385) dan 386) dan 387) dan 388) dan 389) dan 390) dan 391) dan 392) dan 393) dan 394) dan 395) dan 396) dan 397) dan 398) dan 399) dan 400) dan 401) dan 402) dan 403) dan 404) dan 405) dan 406) dan 407) dan 408) dan 409) dan 410) dan 411) dan 412) dan 413) dan 414) dan 415) dan 416) dan 417) dan 418) dan 419) dan 420) dan 421) dan 422) dan 423) dan 424) dan 425) dan 426) dan 427) dan 428) dan 429) dan 430) dan 431) dan 432) dan 433) dan 434) dan 435) dan 436) dan 437) dan 438) dan 439) dan 440) dan 441) dan 442) dan 443) dan 444) dan 445) dan 446) dan 447) dan 448) dan 449) dan 450) dan 451) dan 452) dan 453) dan 454) dan 455) dan 456) dan 457) dan 458) dan 459) dan 460) dan 461) dan 462) dan 463) dan 464) dan 465) dan 466) dan 467) dan 468) dan 469) dan 470) dan 471) dan 472) dan 473) dan 474) dan 475) dan 476) dan 477) dan 478) dan 479) dan 480) dan 481) dan 482) dan 483) dan 484) dan 485) dan 486) dan 487) dan 488) dan 489) dan 490) dan 491) dan 492) dan 493) dan 494) dan 495) dan 496) dan 497) dan 498) dan 499) dan 500) dan 501) dan 502) dan 503) dan 504) dan 505) dan 506) dan 507) dan 508) dan 509) dan 510) dan 511) dan 512) dan 513) dan 514) dan 515) dan 516) dan 517) dan 518) dan 519) dan 520) dan 521) dan 522) dan 523) dan 524) dan 525) dan 526) dan 527) dan 528) dan 529) dan 530) dan 531) dan 532) dan 533) dan 534) dan 535) dan 536) dan 537) dan 538) dan 539) dan 540) dan 541) dan 542) dan 543) dan 544) dan 545) dan 546) dan 547) dan 548) dan 549) dan 550) dan 551) dan 552) dan 553) dan 554) dan 555) dan 556) dan 557) dan 558) dan 559) dan 560) dan 561) dan 562) dan 563) dan 564) dan 565) dan 566) dan 567) dan 568) dan 569) dan 570) dan 571) dan 572) dan 573) dan 574) dan 575) dan 576) dan 577) dan 578) dan 579) dan 580) dan 581) dan 582) dan 583) dan 584) dan 585) dan 586) dan 587) dan 588) dan 589) dan 590) dan 591) dan 592) dan 593) dan 594) dan 595) dan 596) dan 597) dan 598) dan 599) dan 600) dan 601) dan 602) dan 603) dan 604) dan 605) dan 606) dan 607) dan 608) dan 609) dan 610) dan 611) dan 612) dan 613) dan 614) dan 615) dan 616) dan 617) dan 618) dan 619) dan 620) dan 621) dan 622) dan 623) dan 624) dan 625) dan 626) dan 627) dan 628) dan 629) dan 630) dan 631) dan 632) dan 633) dan 634) dan 635) dan 636) dan 637) dan 638) dan 639) dan 640) dan 641) dan 642) dan 643) dan 644) dan 645) dan 646) dan 647) dan 648) dan 649) dan 650) dan 651) dan 652) dan 653) dan 654) dan 655) dan 656) dan 657) dan 658) dan 659) dan 660) dan 661) dan 662) dan 663) dan 664) dan 665) dan 666) dan 667) dan 668) dan 669) dan 670) dan 671) dan 672) dan 673) dan 674) dan 675) dan 676) dan 677) dan 678) dan 679) dan 680) dan 681) dan 682) dan 683) dan 684) dan 685) dan 686) dan 687) dan 688) dan 689) dan 690) dan 691) dan 692) dan 693) dan 694) dan 695) dan 696) dan 697) dan 698) dan 699) dan 700) dan 701) dan 702) dan 703) dan 704) dan 705) dan 706) dan 707) dan 708) dan 709) dan 710) dan 711) dan 712) dan 713) dan 714) dan 715) dan 716) dan 717) dan 718) dan 719) dan 720) dan 721) dan 722) dan 723) dan 724) dan 725) dan 726) dan 727) dan 728) dan 729) dan 730) dan 731) dan 732) dan 733) dan 734) dan 735) dan 736) dan 737) dan 738) dan 739) dan 740) dan 741) dan 742) dan 743) dan 744) dan 745) dan 746) dan 747) dan 748) dan 749) dan 750) dan 751) dan 752) dan 753) dan 754) dan 755) dan 756) dan 757) dan 758) dan 759) dan 760) dan 761) dan 762) dan 763) dan 764) dan 765) dan 766) dan 767) dan 768) dan 769) dan 770) dan 771) dan 772) dan 773) dan 774) dan 775) dan 776) dan 777) dan 778) dan 779) dan 780) dan 781) dan 782) dan 783) dan 784) dan 785) dan 786) dan 787) dan 788) dan 789) dan 790) dan 791) dan 792) dan 793) dan 794) dan 795) dan 796) dan 797) dan 798) dan 799) dan 800) dan 801) dan 802) dan 803) dan 804) dan 805) dan 806) dan 807) dan 808) dan 809) dan 810) dan 811) dan 812) dan 813) dan 814) dan 815) dan 816) dan 817) dan 818) dan 819) dan 820) dan 821) dan 822) dan 823) dan 824) dan 825) dan 826) dan 827) dan 828) dan 829) dan 830) dan 831) dan 832) dan 833) dan 834) dan 835) dan 836) dan 837) dan 838) dan 839) dan 840) dan 841) dan 842) dan 843) dan 844) dan 845) dan 846) dan 847) dan 848) dan 849) dan 850) dan 851) dan 852) dan 853) dan 854) dan 855) dan 856) dan 857) dan 858) dan 859) dan 860) dan 861) dan 862) dan 863) dan 864) dan 865) dan 866) dan 867) dan 868) dan 869) dan 870) dan 871) dan 872) dan 873) dan 874) dan 875) dan 876) dan 877) dan 878) dan 879) dan 880) dan 881) dan 882) dan 883) dan 884) dan 885) dan 886) dan 887) dan 888) dan 889) dan 890) dan 891) dan 892) dan 893) dan 894) dan 895) dan 896) dan 897) dan 898) dan 899) dan 900) dan 901) dan 902) dan 903) dan 904) dan 905) dan 906) dan 907) dan 908) dan 909) dan 910) dan 911) dan 912) dan 913) dan 914) dan 915) dan 916) dan 917) dan 918) dan 919) dan 920) dan 921) dan 922) dan 923) dan 924) dan 925) dan 926) dan 927) dan 928) dan 929) dan 930) dan 931) dan 932) dan 933) dan 934) dan 935) dan 936) dan 937) dan 938) dan 939) dan 940) dan 941) dan 942) dan 943) dan 944) dan 945) dan 946) dan 947) dan 948) dan 949) dan 950) dan 951) dan 952) dan 953) dan 954) dan 955) dan 956) dan 957) dan 958) dan 959) dan 960) dan 961) dan 962) dan 963) dan 964) dan 965) dan 966) dan 967) dan 968) dan 969) dan 970) dan 971) dan 972) dan 973) dan 974) dan 975) dan 976) dan 977) dan 978) dan 979) dan 980) dan 981) dan 982) dan 983) dan 984) dan 985) dan 986) dan 987) dan 988) dan 989) dan 990) dan 991) dan 992) dan 993) dan 994) dan 995) dan 996) dan 997) dan 998) dan 999) dan 1000) dan 1001) dan 1002) dan 1003) dan 1004) dan 1005) dan 1006) dan 1007) dan 1008) dan 1009) dan 1010) dan 1011) dan 1012) dan 1013) dan 1014) dan 1015) dan 1016) dan 1017) dan 1018) dan 1019) dan 1020) dan 1021) dan 1022) dan 1023) dan 1024) dan 1025) dan 1026) dan 1027) dan 1028) dan 1029) dan 1030) dan 1031) dan 1032) dan 1033) dan 1034) dan 1035) dan 1036) dan 1037) dan 1038) dan 1039) dan 1040) dan 1041) dan 1042) dan 1043) dan 1044) dan 1045) dan 1046) dan 1047) dan 1048) dan 1049) dan 1050) dan 1051) dan 1052) dan 1053) dan 1054) dan 1055) dan 1056) dan 1057) dan 1058) dan 1059) dan 1060) dan 1061) dan 1062) dan 1063) dan 1064) dan 1065) dan 1066) dan 1067) dan 1068) dan 1069) dan 1070) dan 1071) dan 1072) dan 1073) dan 1074) dan 1075) dan 1076) dan 1077) dan 1078) dan 1079) dan 1080) dan 1081) dan 1082) dan 1083) dan 1084) dan 1085) dan 1086) dan 1087) dan 1088) dan 1089) dan 1090) dan 1091) dan 1092) dan 1093) dan 1094) dan 1095) dan 1096) dan 1097) dan 1098) dan 1099) dan 1100) dan 1101) dan 1102) dan 1103) dan 1104) dan 1105) dan 1106) dan 1107) dan 1108) dan 1109) dan 1110) dan 1111) dan 1112) dan 1113) dan 1114) dan 1115) dan 1116) dan 1117) dan 1118) dan 1119) dan 1120) dan 1121) dan 1122) dan 1123) dan 1124) dan 1125) dan 1126) dan 1127) dan 1128) dan 1129) dan 1130) dan 1131) dan 1132) dan 1133) dan 1134) dan 1135) dan 1136) dan 1137) dan 1138) dan 1139) dan 1140) dan 1141) dan 1142) dan 1143) dan 1144) dan 1145) dan 1146) dan 1147) dan 1148) dan 1149) dan 1150) dan 1151) dan 1152) dan 1153) dan 1154) dan 1155) dan 1156) dan 1157) dan 1158) dan 1159) dan 1160) dan 1161) dan 1162) dan 1163) dan 1164) dan 1165) dan 1166) dan 1167) dan 1168) dan 1169) dan 1170) dan 1171) dan 1172) dan 1173) dan 1174) dan 1175) dan 1176) dan 1177) dan 1178) dan 1179) dan 1180) dan 1181) dan 1182) dan 1183) dan 1184) dan 1185) dan 1186) dan 1187) dan 1188) dan 1189) dan 1190) dan 1191) dan 1192) dan 1193) dan 1194) dan 1195) dan 1196) dan 1197) dan 1198) dan 1199) dan 1200) dan 1201) dan 1202) dan 1203) dan 1204) dan 1205) dan 1206) dan 1207) dan 1208) dan 1209) dan 1210) dan 1211) dan 1212) dan 1213) dan 1214) dan 1215) dan 1216) dan 1217) dan 1218) dan 1219) dan 1220) dan 1221) dan 1222) dan 1223) dan 1224) dan 1225) dan 1226) dan 1227) dan 1228) dan 1229) dan 1230) dan 1231) dan 1232) dan 1233) dan 1234) dan 1235) dan 1236) dan 1237) dan 1238) dan 1239) dan 1240) dan 1241) dan 1242) dan 1243) dan 1244) dan 1245) dan 1246) dan 1247) dan 1248) dan 1249) dan 1250) dan 1251) dan 1252) dan 1253) dan 1254) dan 1255) dan 1256) dan 1257) dan 1258) dan 1259) dan 1260) dan 1261) dan 1262) dan 1263) dan 1264) dan 1265) dan 1266) dan 1267) dan 1268) dan 1269) dan 1270) dan 1271) dan 1272) dan 1273) dan 1274) dan 1275) dan 1276) dan 1277) dan 1278) dan 1279) dan 1280) dan 1281) dan 1282) dan 1283) dan 1284) dan 1285) dan 1286) dan 1287) dan 1288) dan 1289) dan 1290) dan 1291) dan 1292) dan 1293) dan 1294) dan 1295) dan 1296) dan 1297) dan 1298) dan 1299) dan 1300) dan 1301) dan 1302) dan 1303) dan 1304) dan 1305) dan 1306) dan 1307) dan 1308) dan 1309) dan 1310) dan 1311) dan 1312) dan 1313) dan 1314) dan 1315) dan 1316) dan 1317) dan 1318) dan 1319) dan 1320) dan 1321) dan 1322) dan 1323) dan 1324) dan 1325) dan 1326) dan 1327) dan 1328) dan 1329) dan 1330) dan 1331) dan 1332) dan 1333) dan 1334) dan 1335) dan 1336) dan 1337) dan 1338) dan 1339) dan 1340) dan 1341) dan 1342) dan 1343) dan 1344) dan 1345) dan 1346) dan 1347) dan 1348) dan 1349) dan 1350) dan 1351) dan 1352) dan 1353) dan 1354) dan 1355) dan 1356) dan 1357) dan 1358) dan 1359) dan 1360) dan 1361) dan 1362) dan 1363) dan 1364) dan 1365) dan 1366) dan 1367) dan 1368) dan 1369) dan 1370) dan 1371) dan 1372) dan 1373) dan 1374) dan 1375) dan 1376) dan 1377) dan 1378) dan 1379) dan 1380) dan 1381) dan 1382) dan 1383) dan 1384) dan 1385) dan 1386) dan 1387) dan 1388) dan 1389) dan 1390) dan 1391) dan 1392) dan 1393) dan 1394) dan 1395) dan 1396) dan 1397) dan 1398) dan 1399) dan 1400) dan 1401) dan 1402) dan 1403) dan 1404) dan 1405) dan 1406) dan 1407) dan 1408) dan 1409) dan 1410) dan 1411) dan 1412) dan 1413) dan 1414) dan 1415) dan 1416) dan 1417) dan 1418) dan 1419) dan 1420) dan 1421) dan 1422) dan 1423) dan 1424) dan 1425) dan 1426) dan 1427) dan 1428) dan 1429) dan 1430) dan 1431) dan 1432) dan 1433) dan 1434) dan 1435) dan 1436) dan 1437) dan 1438) dan 1439) dan 1440) dan 1441) dan 1442) dan 1443) dan 1444) dan 1445) dan 1446) dan 1447) dan 1448) dan 1449) dan 1450) dan 1451) dan 1452) dan 1453) dan 1454) dan 1455) dan 1456) dan 1457) dan 1458) dan 1459) dan 1460) dan 1461) dan 1462) dan 1463) dan 1464) dan 1465) dan 1466) dan 1467) dan 1468) dan 1469) dan 1470) dan 1471) dan 1472) dan 1473) dan 1474) dan 1475) dan 1476) dan 1477) dan 1478) dan 1479) dan 1480) dan 1481) dan 1482) dan 1483) dan 1484) dan 1485) dan 1486) dan 1487) dan 1488) dan 1489) dan 1490) dan 1491) dan 1492) dan 1493) dan 1494) dan 1495) dan 1496) dan 1497) dan 1498) dan 1499) dan 1500) dan 1501) dan 1502) dan 1503) dan 1504) dan 1505) dan 1506) dan 1507) dan 1508) dan 1509) dan 1510) dan 1511) dan 1512) dan 1513) dan 1514) dan 1515) dan 1516) dan 1517) dan 1518) dan 1519) dan 1520) dan 1521) dan 1522) dan 1523) dan 1524) dan 1525) dan 1526) dan 1527) dan 1528) dan 1529) dan 1530) dan 1531) dan 1532) dan 1533) dan 1534) dan 1535) dan 1536) dan 1537) dan 1538) dan 1539) dan 1540) dan 1541) dan 1542) dan 1543) dan 1544) dan 1545) dan 1546) dan 1547) dan 1548) dan 1549) dan 1550) dan 1551) dan 1552) dan 1553) dan 1554) dan 1555) dan 1556) dan 1557) dan 1558) dan 1559) dan 1560) dan 1561) dan 1562) dan 1563) dan 1564) dan 1565) dan 1566) dan 1567) dan 1568) dan 1569) dan 1570) dan 1571) dan 1572) dan 1573) dan 1574) dan 1575) dan 1576) dan 1577) dan 1578) dan 1579) dan 1580) dan 1581) dan 1582) dan 1583) dan 1584) dan 1585) dan 1586) dan 1587) dan 1588) dan 1589) dan 1590) dan 1591) dan 1592) dan 1593) dan 1594) dan 1595) dan 1596) dan 1597) dan 1598) dan 1599) dan 1600) dan 1601) dan 1602) dan 1603) dan 1604) dan 1605) dan 1606) dan 1607) dan 1608) dan 160		

14	United States of America/Oceanic Institute of Hawaii	Development of National Shrimp Breeding Program	3.1 Letter of Intent (LOI), dan 3.2 MoU Di- 2019	3.3 Lot telah ditandatangani oleh Dirjen Perikanan Budidaya dan Presiden Oceanic Institute of Hawaii. MoU University of Hawaii pada 20 November 2020 di Hawaii. 3.4 MoU antara OI dan OIB telah ditandatangani pada 20 Desember 2021. MoU akan segera di-DO dalam bulan-bulan awal 2022.	3.4 OI akan memberikan dukungan teknis dan pengetahuan Apresiasi untuk kegiatan Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture Project (ISAP) yang akan dikembangkan melalui ASB tahun 2022-2023. OI akan melakukan preliminary visit ke Indonesia dalam rangka pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan program perikanan udang nasional.	Dukungan kerja sama ditandatangani selama 5 tahun berupa beasiswa teknis atau beasiswa teknis dari pihak OI untuk pengembangan breeding program di Indonesia. Untuk pemeliharaan dan perawatan ikan udang oleh ASB nasional, project code 0409-040, berdasarkan Improvement for Shrimp Aquaculture Project.
15	Misamis	Kerja sama pengembangan perikanan budidaya di Misamis, akses untuk bermitra di tanah dan	3.5 MoU kerja sama kelulusan perikanan Indonesia- Misamis di 772 akan built in dan MOU Misamis di Bali, 28 Oktober 2024. 3.6 MoU kerja sama dengan 29 Oktober 2021. 3.7 Plan of Action di Misamis.	3.7 MOU telah ditandatangani dengan pemerintah Misamis. 3.8 MoU telah ditandatangani dengan pemerintah Misamis. 3.9 MoU telah ditandatangani dengan pemerintah Misamis. 3.10 MoU telah ditandatangani dengan pemerintah Misamis.	Pemula kerja sama yang ditunjukkan dalam POA kepada Misamis adalah pelatihan budidaya rumput laut dan produksi pakan ikan mandiri. Hasil ini digali secara dengan keterbukaan dan keterbukaan pihak lokal yang ditunjukkan pada 075 meeting.	Perencanaan POA kerjasama adalah 2022 untuk mulai dan melakukan pemantauan.
16	Selanjuta Baru	Memorandum komprehensif di Selanjuta Baru.	Plan of Action (PoA) on Comprehensive Partnership in New Zealand 2022-2024	PoA ditandatangani oleh Menteri di New Zealand secara pribadi di Jakarta dan ditandatangani pada 29 Juli 2022.	3.1 Kerjasama pada kegiatan pameran perikanan. 3.2 Kerjasama yang ditunjukkan secara umum via Youtube dan website pada Oktober 2022. 3.3 Kerjasama yang ditunjukkan secara umum via Youtube dan website pada Oktober 2022. 3.4 Kerjasama yang ditunjukkan secara umum via Youtube dan website pada Oktober 2022. 3.5 Kerjasama yang ditunjukkan secara umum via Youtube dan website pada Oktober 2022.	Memorandum kerjasama kegiatan ini setelah penandatanganan perjanjian pada Oktober 2022 dan bentuk ada kelanjutan dari kegiatan tersebut.
17	Angung Oriental Consultant Global (OAG)	Proses kerja sama pengembangan teknologi untuk Shrimp Production System (SPS)	Belum ditandatangani bentuk dokumen kerja sama yang akan dibuat.	Persepsi	Perencanaan OI ditunjukkan akan dibangun melalui dukungan pendanaan OI. OI telah submit proposal ke ICA pada Oktober 2022 dengan dukungan tambahan tahun dan bulan.	Dokumen kerja sama (MoU/LOI) dengan OAG akan di draft setelah mendapat persetujuan pendanaan dari ICA.

Sistem Informasi yang digunakan

7. Sistem Informasi yang dipergunakan

Sistem Informasi yang dipergunakan dalam melakukan penyusunan Laporan Keuangan sebagai berikut :

- a. Aplikasi SAKTI, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, penyempurnaan sistem penganggaran terus dilakukan. Penyempurnaan ini tetap berlandaskan pada konsep penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja dan kerangka penganggaran jangka menengah. aplikasi SAKTI ini dilakukan mengacu pada perubahan kebijakan dan perubahan teknis aplikasi. Aplikasi SAKTI memiliki 8 Modul yaitu Modul Anggaran, Modul Komitmen, Modul Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Modul Pembayaran, Modul GLP, Modul Aset Tetap, Modul Persediaan, dan Modul Piutang. Aplikasi dipergunakan mulai tahun 2022. Aplikasi ini Dibuat dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
- b. Aplikasi SIRUP, aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (*Web based*) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP. SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUPnya. untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan. Aplikasi ini dibuat dan dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- c. Aplikasi SPSE, aplikasi *e-procurement* yang dikembangkan oleh Direktorat *e-Procurement* – Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) untuk digunakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di seluruh K/L/D/I. Aplikasi ini dikembangkan dengan semangat efisiensi nasional sehingga tidak memerlukan biaya lisensi, baik lisensi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) itu sendiri maupun perangkat lunak pendukungnya;
- d. SPAN, sebuah sistem yang dirancang dengan mengintegrasikan proses penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan keuangan Negara sehingga diperoleh laporan keuangan akurat yang melalui proses akuntabel dan transparan. Aplikasi ini Dibuat dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
- e. Simponi, aplikasi yang digunakan untuk memfasilitasi pembayaran/penyetoran PNBP dan penerimaan nonanggaran. Keberadaan aplikasi SIMPONI ini ditujukan untuk memberi kemudahan bagi Wajib Bayar/Wajib Setor guna membayar atau menyetor PNBP dan penerimaan non anggaran. Aplikasi ini Dibuat dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
- f. SIMAN, aplikasi yang digunakan untuk mendukung proses pengelolaan BMN, yang meliputi perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penghapusan, dan pemindahtanganan aset negara berbasis internet yang dapat diakses oleh Pengelola dan Pengguna. Aplikasi ini Dibuat dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

**Perubahan
Manajerial**

8. Perubahan Manajerial

Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2020 tentang Pengisian dan Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 pada tanggal 23 Desember 2020. Telah dilakukan penggantian Pejabat Pengguna Anggaran yaitu Sakti Wahyu Trenggono dari pejabat sebelumnya Edhy Prabowo.

Aplikasi yang digunakan dan dikembangkan oleh DJPB

9. Aplikasi yang digunakan dan dikembangkan oleh DJPB

Nama Eselon I	Nama Aplikasi	Penjelasan Fungsi/Manfaat Dari Aplikasi	Pemilik Aplikasi
DJPB			
	SEMILIR	Pemetaan Potensi dan Sarana/Prasarana Budidaya Perikanan [Pendataan sarana produksi: excavator, saluran tambak, balai-balai benih, potensi lahan]	DJPB
	SIBATIK	Aplikasi berbasis web untuk melakukan pelayanan obat ikan [Serupa dengan SEPEKAN. SIBATIK adalah Sistem Informasi Obat Ikan. SIBATIK sudah running, ada di bagian pelayanan publik. Apabila akan diintegrasikan, harus sangat hati-hati karena bisa sangat mengganggu pelayanan publik]	DJPB
	SEKETIKA	Permohonan surat keterangan teknis impor bahan baku pakan ikan [Catatan: Masih berjalan, namun nanti akan digantikan dengan SRIKANDI. Termasuk pelayanan publik satu pintu (ada loket). Integrasi harus dilakukan dengan hati-hati karena menyangkut pelayanan publik]	Pusdatin
	AKUBISA	Aplikasi pengajuan surat izin impor ikan hidup, Surat Rekomendasi Pembudidayaan Ikan Penanaman Modal(RPIPM) dan SIUP	DJPB

Kebijakan Manajemen bidang Keuangan

10. Kebijakan Manajemen bidang Keuangan

- Melakukan reviu terhadap DIPA 2024 yang sudah disahkan dan hal-hal yang diperlukan penyesuaian agar segera dilakukan penyesuaian/revisi anggaran.
- Melakukan percepatan persiapan pelaksanaan program/kegiatan meliputi:
 - a. Penetapan Petunjuk Operasional Kegiatan.
 - b. Penetapan Pejabat Perbendaharaan yaitu Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Bendahara.
- Melakukan percepatan proses pengadaan barang/jasa yang mencakup:
 - a. Penetapan Pejabat Pengadaan, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan atau kelompok kerja pengadaan.

- b. Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) paling lambat 14 hari kerja setelah kontrak ditandatangani sesuai dengan peraturan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah.
 - c. Penandatanganan kontrak ke KPPN paling lambat lima hari kerja setelah kontrak ditandatangani.
- Melakukan percepatan persiapan penyaluran bantuan pemerintah yang mencakup: penetapan pedoman umum dan Petunjuk Teknis, pelaksanaan verifikasi dan validasi penerima/kelompok serta penetapan surat keputusan penerima.
 - Kebijakan Pelaksanaan Anggaran KKP, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan anggaran serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran yang mencakup:
 - a. Proses penyusunan anggaran tahun 2024 telah memperhatikan urutan prioritas diantaranya kebutuhan anggaran operasional yang sifatnya mendasar, program dan kegiatan yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam dokumen RPJM 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 khususnya kegiatan yang termasuk *Major Project*, kebutuhan anggaran untuk kegiatan lanjutan yang bersifat tahun jamak (*multiyears*) dan penyediaan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan peraturan perundangan.
 - Alokasi anggaran KKP juga difokuskan untuk memberikan nilai tambah bagi sektor kelautan dan perikanan, salah satunya untuk pengembangan sektor budidaya sebagaimana arahan Presiden. Tak hanya budidaya, pengelolaan perikanan tangkap, nilai tambah di sektor penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pengelolaan ruang laut, riset dan pengembangan SDM, pengendalian mutu dan perkarantinaan serta pengawasan keuangan dan dukungan manajemen juga akan menjadi fokus pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2024.
 - Alokasi anggaran mengutamakan kegiatan prioritas (*money follow program* prioritas). Pengalokasian anggaran tidak lagi berbasis pada

pelaksanaan tugas dan fungsi namun berdasarkan kebutuhan organisasi untuk mendukung pencapaian visi dan misi Presiden.

- Melibatkan peran aktif bagian yang menangani Monitoring, Evaluasi dan Pengelola Keuangan seluruh Unit Eselon I Lingkup KKP untuk membantu perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan serta perkembangan realisasi anggaran belanja.
- Dukungan dari Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal dalam mendorong terjadinya percepatan pelaksanaan anggaran belanja KKP.

**Penjelasan
lainnya**

11. Penjelasan Lainnya

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KMK163 Tahun 2023 tentang penetapan Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara, Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo, dan Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan layanan Umum. Selanjutnya ketiga Balai ini telah menjadi Badan Layanan Umum.

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya 31 Desember 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara periode 31 Desember 2024 merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp117.016.527.359,00.

Realisasi Belanja Negara Netto pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp992.008.206.671,00 atau mencapai 80,84 persen, nilai tersebut merupakan nilai setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp2.924.470.192,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp1.227.143.203.000,00

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

Profil

Sejak era reformasi bergulir di tengah percaturan politik Indonesia, sejak itu pula perubahan kehidupan mendasar berkembang di hampir seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti merebaknya beragam krisis yang melanda Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya adalah berkaitan dengan Orientasi Pembangunan. Dimasa Orde Baru, orientasi pembangunan masih terkonsentrasi pada wilayah daratan.

Sektor kelautan dapat dikatakan hampir tak tersentuh, meski kenyataannya sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam, baik jenis dan potensinya. Potensi sumberdaya tersebut terdiri dari sumberdaya yang dapat diperbaharui, seperti sumberdaya perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya laut dan pantai, energi non konvensional dan energi serta sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui seperti sumberdaya minyak dan gas bumi dan berbagai jenis mineral. Selain dua jenis sumberdaya tersebut, juga terdapat berbagai macam jasa lingkungan lautan yang dapat dikembangkan untuk pembangunan kelautan dan perikanan seperti pariwisata bahari, industri maritim, jasa angkutan dan sebagainya. Tentunya inilah yang mendasari Presiden Abdurrahman Wahid dengan Keputusan Presiden No.355/M Tahun 1999 tanggal 26 Oktober 1999 dalam Kabinet Periode 1999-2004 mengangkat Ir. Sarwono Kusumaatmaja sebagai Menteri Eksplorasi Laut.

Selanjutnya pengangkatan tersebut diikuti dengan pembentukan Departemen Eksplorasi Laut (DEL) beserta rincian tugas dan fungsinya melalui Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tanggal 10 November 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen. Ternyata penggunaan nomenklatur DEL tidak berlangsung lama karena berdasarkan usulan DPR dan berbagai pihak, telah dilakukan perubahan penyebutan dari Menteri Eksplorasi Laut menjadi Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 145 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999. Perubahan ini ditindaklanjuti dengan penggantian nomenklatur DEL menjadi Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (DELP) melalui Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1999 tanggal 1

Desember 1999.

Adapun Perubahan paradigma 2021-2024 :

- Kebijakan Pembangunan perikanan budidaya tidak hanya focus pada produksi.
- Perubahan paradigma menuju Perikanan Budidaya Berkelanjutan, Mandiri, Berdaya Saing, serta fokus pada komoditas bernilai ekonomis tinggi, antara lain vaname, lobster, kepiting, rumput laut, dan komoditas ikan air tawar.
- Perikanan budidaya harus menerapkan konsep Blue Economy, dengan menempatkan ‘Ekologi sebagai Panglima’ untuk mendukung keberlanjutan ekonomi dan lingkungan.

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden No. 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, Nomenklatur Departemen Kelautan dan Perikanan berubah menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Terbentuknya Kementerian Kelautan dan Perikanan pada dasarnya merupakan sebuah tantangan, sekaligus peluang bagi pengembangan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Artinya, bagaimana KKP ini menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu sektor andalan yang mampu mengantarkan Bangsa Indonesia keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Setidaknya ada beberapa alasan pokok yang mendasarinya.

Pertama, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau 17.508 dan garis pantai sepanjang 81.000 km tidak hanya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia tetapi juga menyimpan kekayaan sumberdaya alam laut yang besar dan belum dimanfaatkan secara optimal.

Kedua, selama beberapa dasawarsa, orientasi pembangunan negara ini lebih mangarah ke darat, mengakibatkan sumberdaya daratan terkuras. Oleh karena itu wajar jika sumberdaya laut dan perikanan tumbuh ke depan.

Ketiga, dikaitkan dengan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatnya kesadaran manusia terhadap arti penting produk perikanan dan kelautan bagi kesehatan dan kecerdasan manusia, sangat diyakini masih dapat meningkatkan produk perikanan dan

kelautan di masa datang.

Keempat, kawasan pesisir dan lautan yang dinamis tidak hanya memiliki potensi sumberdaya, tetapi juga memiliki potensi bagi pengembangan berbagai aktivitas pembangunan yang bersifat ekstraksi seperti industri, pemukiman, konservasi dan sebagainya.

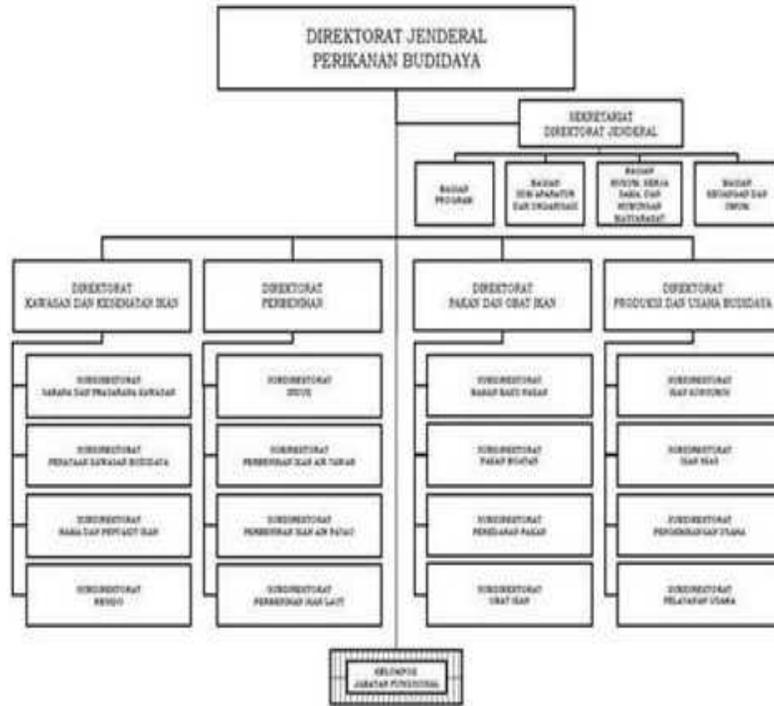
Setelah mengalami beberapa kali perubahan, susunan organisasi KKP khususnya Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2020, adalah sebagai berikut:

Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB), yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budidaya.

Susunan organisasi Ditjen PB terdiri dari: Sekretariat Direktorat Jenderal; Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan; Direktorat Perbenihan; Direktorat Pakan dan Obat Ikan; Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya; Kelompok Jabatan Fungsional, serta didukung oleh 15 Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Pada tahun 2020, tepatnya tanggal 25 September 2020 dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan terdapat perubahan struktur organisasi unit kerja eselon II di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dapat digambarkan sebagai berikut :



Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkat pembangunan perikanan budidaya adalah :

1. Peningkatan kontribusi ekonomi sub-sektor perikanan budidaya terhadap perekonomian sektor perikanan nasional:
 - a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan budidaya;
 - b. Mengoptimalkan pengelolaan kawasan perikanan budidaya secara berkelanjutan; dan
 - c. Meningkatkan produksi perikanan budidaya secara berkelanjutan.
2. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di DJPB, yakni meningkatkan kinerja Reformasi Birokrasi DJPB.

Entitas berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya berkomitmen dengan visi **“Terwujudnya masyarakat perikanan budidaya yang sejahtera dan sumber daya perikanan budidaya yang berkelanjutan”** untuk mewujudkan **“Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong.”** Adapun misi KKP menjalankan 4 (empat) dari 9 (sembilan) Misi Presiden, yaitu:

1. Misi ke-1: Peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan daya saing SDM dan pengembangan inovasi dan riset kelautan dan perikanan;
2. Misi ke-2: Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing melalui peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional;
3. Misi ke-4: Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan; dan
4. Misi ke-8: Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan tata kelola pemerintahan di KKP.

Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya menjalankan Misi ke-2, yaitu **“Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing melalui peningkatan kontribusi ekonomi sub-sektor perikanan budidaya terhadap perekonomian sektor perikanan nasional”**. Misi utama DJPB di atas didukung dengan Misi ke-8, yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh seluruh unit kerja DJPB di pusat dan daerah.

Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan budidaya
- Ekonomi sektor perikanan budidaya meningkat
- Pengelolaan kawasan perikanan budidaya yang berkelanjutan
- Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
- Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumberdaya perikanan budidaya yang partisipatif
- Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya Kebijakan Umum Perencanaan berdasarkan Rapat Koordinasi Pembangunan

Tingkat Pusat (Rakorbangpus) antara lain:

1. Penyusunan Rencana Kerja memperhatikan sasaran utama (outcome) kontribusi KKP terhadap prioritas nasional, yaitu Prioritas Ketahanan Pangan, Pembangunan Wilayah, pendidikan dan Kesehatan
2. Kegiatan dilakukan dengan Pendekatan Kebijakan Money Follow Program dan Kegiatan (Prioritas)
3. Setiap unit kerja Eselon I agar menyusun rencana kegiatan, hingga komponen kegiatan dan lokasinya secara lebih teliti, detail dan rinci agar sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan
4. Pengalokasian anggaran setiap detail kegiatan memperhatikan kaidah-kaidah efektivitas, efisiensi, suffisiensi, outcome oriented, transparan dan akuntabel
5. Unit kerja Eselon I mengefisienkan biaya operasional dan belanja aparatur, serta meningkatkan alokasi anggaran yang bermanfaat untuk masyarakat (stakeholders). Efisiensi dilakukan dengan pembatasan perjalanan dinas, pertemuan (rapat, seminar, lokakarya, peresmian kantor/proyek), dan biaya pendukung lainnya
6. Unit kerja Eselon I menetapkan satuan harga per unit (Unit cost) untuk setiap output/komponen/detail barang/jasa per lokasi kegiatan termasuk komponen biaya pembentuk yang tidak dapat dipisahkan dari output/komponen/detail barang/jasa
7. Melakukan Pengendalian Program dan kegiatan untuk memastikan kegiatan yang direncanakan dapat berjalan dengan baik
8. Integrasi perencanaan dan informasi Kinerja Anggaran, antara lain :
 - a. Unit Eselon I melakukan pengisian rencana dan Informasi Kinerja dalam sistem Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA), dengan memuat program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan detail Kegiatan sampai dengan level komponen, baik prioritas maupun reguler (non prioritas)
 - b. Dalam menentukan Indikator kinerja, harus memperhatikan kriteria sebagai berikut :
 - 1) Specific: spesifik, tidak bisa diartikan lain;
 - 2) Measurable: memiliki ukuran yang jelas;
 - 3) Achievable: realistis dan dapat dicapai;
 - 4) Relevant: sesuai kebutuhan;

- 5) Timeline: memiliki tahapan dan waktu yang jelas dalam pencapaiannya.
 - c. Setiap Komponen kegiatan yang disusun harus berkaitan dan dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Sasaran KKP dan Indikator Kinerja Program
 - d. Penyusunan komponen kegiatan agar memperhatikan :
 - 1) Pelaku/penerima hasil kegiatan/bantuan;
 - 2) Unit cost dalam rangka pencapaian output;
 - 3) Kebutuhan masyarakat dan sara prasarana penunjang;
 - 4) Sumber daya pelaksana kegiatan;
 - 5) Akses pasar dan teknologi yang akan digunakan;
 - 6) Lokasi prioritas dan komoditas utama yang menjadi target.
9. Rencana Belanja
- a. Biaya Operasional (Belanja Pegawai dan Belanja Operasional)
 - 1) Unit eselon I menyediakan belanja pegawai termasuk uang makan (PNS), belanja oprasional, dan pemeliharaan perkantoran yang dihitung secara cermat sesuai kebutuhan riil selama 1(satu) tahun
 - 2) Penyusunan biaya operasional dalam rangka mendapatkan alokasi biaya operasional yang lebih realistis adalah sebagai berikut :
 - a) Belanja gaji pegawai (termasuk uang makan, lembur, tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji dan tunjangan kinerja pegawai) pada pagu indikatif didasarkan data realisasi anggaran sampai bulan berjalan dan belum memasukkan asumsi kenaikan gaji pokok dan kenaikan tunjangan kinerja. Kenaikan hanya diperkenankan berbentuk acress maksimum 3,5%;
 - b) Belanja barang operasional perkantoran dan pemeliharaan aset dihitung berdasarkan data SIMAK BMN dan realisasi sampai bulan berjalan dengan memperhitungkan penambahan aset pada tahun berjalan dan kenaikan standar biaya.
 - b. Biaya Non Operasional (Kegiatan Prioritas dan Pendukung)

- 1) Pengalokasian biaya non operasional harus memperhatikan :
 - a) 9 (sembilan) agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita)
 - b) Kegiatan prioritas yang merupakan arahan Presiden dalam Sidang Kabinet dan Rapat Terbatas serta arahan Menteri Kelautan dan Perikanan
 - c) Pencapaian target indikator Kinerja Sasaran Kementerian Kelautan dan Perikanan
 - d) Kegiatan dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang/Peraturan Pemerintah/peraturan Presiden/Keputusan Presiden /Instruksi Presiden
 - e) Kebutuhan untuk kegiatan yang bersifat tahun jamak (multy years contract) yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan, dan
 - f) Kebutuhan dana pendamping untuk kegiatan yang didanai dari Pinjaman dana/atau Hibah Luar Negeri (bila ada).
- 2) Setiap keluaran yang akan dilaksanakan harus sudah memperhatikan kesiapan yang dipersyaratkan seperti TOR/KAK dan RAB usulan daerah, lahan yang clear and clean, calon penerima manfaat, rencana kelembagaan pengelola, kesiapan biaya operasional, kesiapan dokumen pendukung teknis, bisnis plan, dokumen perizinan, kegiatan resiko, dokumen perizinan dan lain sebagainya.
- 3) Pengalokasian anggaran untuk satker Dekonsentrasi agar memperhatikan kinerja pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya serta capaian indikator kerjanya.

Sebagaimana 48/PERMEN-KP/2020 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai berikut :

Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Direktorat Jenderal (Ditjen) Perikanan Budidaya mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan perikanan budidaya.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Ditjen Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, serta peningkatan usaha budidaya;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, serta peningkatan usaha budidaya;
- 3) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, serta peningkatan usaha budidaya;
- 4) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, serta peningkatan usaha budidaya;
- 5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan

lainnya, peningkatan produksi perikanan budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, serta peningkatan usaha budidaya;

- 6) pelaksanaan administrasi Ditjen Perikanan Budidaya; dan
- 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Struktur Organisasi

Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya terdiri atas:

- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal;
- 2) Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Budidaya;
- 3) Direktorat Perbenihan;
- 4) Direktorat Pakan dan Obat Ikan;
- 5) Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya;
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.

Eselon II

1. Sekretariat Direktorat Jenderal

a. Tugas Pokok

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- 1) Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran;
- 2) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, Sumber Daya Manusia Aparatur, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- 3) pembinaan dan penyiapan bahan penataan organisasi dan tatalaksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- 4) koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan pelaksanaan advokasi hukum; dan hubungan masyarakat, kerjasama, dan dokumentasi;
- 5) pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah.

2. Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Budidaya

a. Tugas Pokok

Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana kawasan, penataan kawasan, hama dan penyakit ikan, residu dan laboratorium.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Budidaya menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, penyediaan, penataan, pemanfaatan dan pemantauan sarana, prasarana dan lingkungan di kawasan pembudidayaan ikan yang memenuhi standar teknis, pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit ikan, pemantauan residu obat ikan dan kontaminan, serta kapasitas laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;
- 2) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, penyediaan, penataan, pemanfaatan dan pemantauan sarana, prasarana dan lingkungan di kawasan pembudidayaan ikan yang memenuhi standar teknis, pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit ikan, pemantauan residu obat ikan dan kontaminan, serta kapasitas laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;
- 3) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, penyediaan, penataan, pemanfaatan dan pemantauan sarana, prasarana dan lingkungan di kawasan pembudidayaan ikan yang memenuhi standar teknis, pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit ikan, pemantauan residu obat ikan dan kontaminan, serta kapasitas laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;
- 4) penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, penyediaan, penataan, pemanfaatan dan pemantauan sarana, prasarana dan lingkungan di kawasan pembudidayaan ikan yang memenuhi standar teknis, pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit ikan, pemantauan residu obat ikan dan kontaminan, serta kapasitas laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;
- 5) penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, penyediaan, penataan, pemanfaatan dan pemantauan sarana, prasarana dan lingkungan di kawasan pembudidayaan ikan yang memenuhi standar teknis, pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit ikan,

pemantauan residu obat ikan dan kontaminan, serta kapasitas laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan; dan

- 6) pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan direktorat.

3. Direktorat Perbenihan

a. Tugas Pokok

Direktorat Perbenihan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang induk, perbenihan ikan air tawar, perbenihan ikan air payau dan perbenihan ikan laut.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Perbenihan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyediaan, peredaran dan pemantauan induk, mutu benih ikan air tawar, air payau, dan ikan laut, pertimbangan teknis pemasukan ikan hidup, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) perbenihan, penerapan cara pembenihan ikan yang baik, serta rekomendasi pasca pelepasan induk unggul;
- 2) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan, peredaran dan pemantauan induk, mutu benih ikan air tawar, air payau, dan ikan laut, pertimbangan teknis pemasukan ikan hidup, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) perbenihan, penerapan cara pembenihan ikan yang baik, serta rekomendasi pasca pelepasan induk unggul;
- 3) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan, peredaran dan pemantauan induk, mutu benih ikan air tawar, air payau, dan ikan laut, pertimbangan teknis pemasukan ikan hidup, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) perbenihan, penerapan cara pembenihan ikan yang baik, serta rekomendasi pasca pelepasan induk unggul;
- 4) penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan, peredaran dan pemantauan induk, mutu benih ikan air tawar, air payau, dan ikan laut, pertimbangan teknis pemasukan ikan hidup, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) perbenihan, penerapan cara

- pembenihan ikan yang baik, serta rekomendasi pasca pelepasan induk unggul;
- 5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan, peredaran dan pemantauan induk, mutu benih ikan air tawar, air payau, dan ikan laut, pertimbangan teknis pemasukan ikan hidup, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) perbenihan, penerapan cara pembenihan ikan yang baik, serta rekomendasi pasca pelepasan induk unggul; dan
 - 6) penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan direktorat.

4. Direktorat Pakan dan Obat Ikan

a. Tugas Pokok

Direktorat Pakan dan Obat Ikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang bahan baku pakan, pakan buatan, peredaran pakan dan obat ikan dan penerapan cara pembuatan pakan ikan dan obat ikan yang baik.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pakan dan Obat Ikan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyediaan, pendaftaran, peredaran dan pemantauan bahan baku pakan, pakan buatan, pakan alami dan obat ikan, surveilen mutu bahan baku pakan, pakan dan obat ikan, penerapancara pembuatan pakan ikan, dan obat ikan yang baik, serta survei kepuasan masyarakat;
- 2) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan, pendaftaran, peredaran dan pemantauan bahan baku pakan, pakan buatan, pakan alami dan obat ikan, surveilen mutu bahan baku pakan, pakan dan obat ikan, penerapancara pembuatan pakan ikan dan obat ikan yang baik, serta survei kepuasan masyarakat;
- 3) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan, pendaftaran, peredaran dan pemantauan bahan baku pakan, pakan buatan, pakan alami dan obat ikan, surveilen mutu bahan baku pakan, pakan dan obat ikan, penerapancara pembuatan pakan ikan dan obat ikan yang baik, serta survei kepuasan masyarakat;

- 4) penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan, pendaftaran, peredaran dan pemantauan bahan baku pakan, pakan buatan, pakan alami dan obat ikan, surveilen mutu bahan baku pakan, pakan dan obat ikan, penerapancara pembuatan pakan ikan dan obat ikan yang baik, serta survei kepuasan masyarakat;
- 5) penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan, pendaftaran, peredaran dan pemantauan bahan baku pakan, pakan buatan, pakan alami dan obat ikan, surveilen mutu bahan baku pakan, pakan dan obat ikan, penerapancara pembuatan pakan ikan dan obat ikan yang baik, serta survei kepuasan masyarakat; dan
- 6) pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

5. Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya

a. Tugas Pokok

Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang produksi ikan konsumsi, ikan hias, pengembangan usaha, dan pelayanan usaha perikanan budidaya.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Produksi dan Usaha menyelenggarakan fungsi:

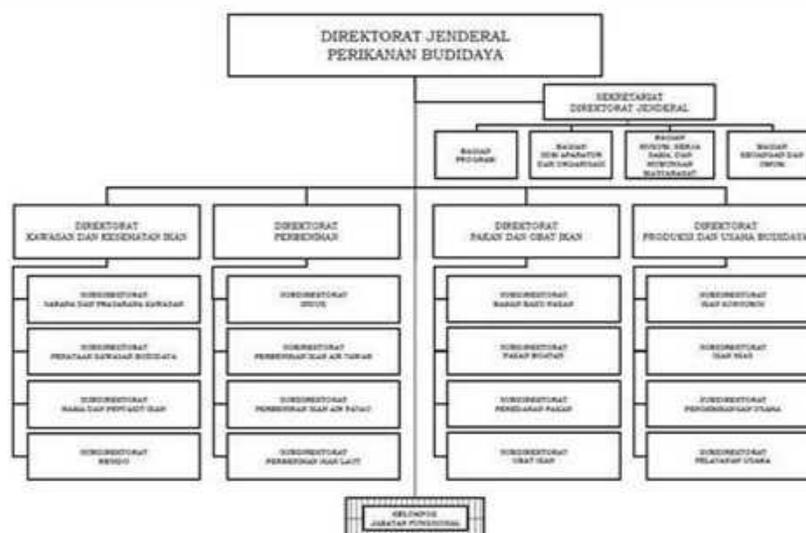
- 1) penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, penyediaan, penerapan teknologi pembesaran ikan konsumsi air tawar, payau, laut dan ikan hias, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) ikan konsumsi dan ikan hias, penerapan cara budidaya ikan yang baik, kelembagaan, kemitraan, pembiayaan, investasi, perlindungan pembudidaya, perizinan dan rekomendasi usaha pembudidayaan ikan;
- 2) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, penyediaan, penerapan teknologi pembesaran ikan konsumsi air tawar, payau, laut dan ikan hias, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) ikan konsumsi dan ikan hias, penerapan cara budidaya ikan yang baik, kelembagaan, kemitraan, pembiayaan, investasi, perlindungan pembudidaya, perizinan dan rekomendasi usaha pembudidayaan ikan;

- 3) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, penyediaan, penerapan teknologi pembesaran ikan konsumsi air tawar, payau, laut dan ikan hias, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) ikan konsumsi dan ikan hias, penerapan cara budidaya ikan yang baik, kelembagaan, kemitraan, pembiayaan, investasi, perlindungan pembudidaya, perizinan dan rekomendasi usaha pembudidayaan ikan;
- 4) penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, penyediaan, penerapan teknologi pembesaran ikan konsumsi air tawar, payau, laut dan ikan hias, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) ikan konsumsi dan ikan hias, penerapan cara budidaya ikan yang baik, kelembagaan, kemitraan, pembiayaan, investasi, perlindungan pembudidaya, perizinan dan rekomendasi usaha pembudidayaan ikan;
- 5) penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, penyediaan, penerapan teknologi pembesaran ikan konsumsi air tawar, payau, laut dan ikan hias, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) ikan konsumsi dan ikan hias, penerapan cara budidaya ikan yang baik, kelembagaan, kemitraan, pembiayaan, investasi, perlindungan pembudidaya, perizinan dan rekomendasi usaha pembudidayaan ikan; dan
- 6) Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya adalah sebagai berikut :



Adapun Program Terobosan KKP Berbasis Ekonomi Biru

1. Penambahan Luas Kawasan Konservasi Laut
2. Penangkapan Ikan terukur berbasis Kuota
3. Pengembangan Budidaya Laut, Pesisir, dan Darat Secara Berkelanjutan
4. Pengelolaan dan Pengawasan Pesisir dan pulau-pulau kecil
5. Pembersihan sampah plastik di Laut

Adapun program dan kegiatan prioritas Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Produksi untuk Pemenuhan Kebutuhan Pangan dan Pembinaan Penerapan Keamanan Pangan
2. Pembangunan Modeling Komoditas Unggulan (Udang, Nila Salin, Rumput Laut, Lobster, Kepiting)
3. Pembangunan Modeling Kampung Perikanan Budi Daya.

Berdasarkan Permen KP No 47 tahun 2021 tentang kampung perikanan budidaya :



Adapun kegiatan prioritas Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2024 adalah sebagai berikut :



Kondisi	Modelling dan Revitalisasi Tambak Udang Berkelanjutan	Hilirisasi	Multiplier Effect
<p>Market Size USD 64,8 miliar (2024), destinasi mencapai USD 149 miliar (2034)</p> <p>Market Share Indonesia 6,7% dari pasar global (2022)</p> <p>Luas tambak tradisional 247.803 Ha</p> <p>Produktivitas masih rendah 0,6 ton/Ha/siklus</p>	<p>Modelling Tambak Udang: Kebumen dan Sumba Timur</p> <p>Revitalisasi Tambak Udang: Aceh Timur, Aceh Tamiang, Lampung Selatan, Bui, Sukasena, Cianjur, Lampung Timur, Sumbawa, Muna, Morowali Utara, Mamuju.</p> <p>Peningkatan Teknologi</p>	<p>Kebutuhan pasca panen</p> <p>Cold storage</p> <p>Unit Pengolah Udang</p> <p>Pabrik es</p>	<p>Peningkatan produktivitas dari semula 0,6 menjadi 40 ton/Ha/siklus</p> <p>Peningkatan penyerapan tenaga kerja</p> <p>Peningkatan ekspor udang Indonesia menjadi USD 2,1 miliar pada 2024</p> <p>Kesejahteraan petambak udang meningkat</p> <p>Pertumbuhan ekonomi wilayah</p> <p>Peningkatan pendapatan negara (pajak dan PNBP)</p>
<p>Market Size USD 14,4 miliar (2024), destinasi mencapai USD 23,0 miliar (2034)</p> <p>Market Share Indonesia 9,7% dari pasar global (2022)</p> <p>Produktivitas masih rendah 0,6 ton/Ha/tahun</p>	<p>Modelling Budidaya Ikan Nila Salin (BINS) Karawang</p> <p>Program budidaya nila salin melalui revitalisasi tambak udang di Pantura seluas 78.000 ha (tambak udang idle) dan mendorong budidaya di danau (lake based) ke daratan (land based).</p> <p>Peningkatan Teknologi</p>	<p>Kebutuhan pasca panen</p> <p>Cold Storage</p> <p>Unit Pengolah Nila</p> <p>Pabrik es</p>	<p>Peningkatan produktivitas dari semula 0,6 menjadi 100 ton/Ha/tahun</p> <p>Peningkatan penyerapan tenaga kerja</p> <p>Peningkatan ekspor nila Indonesia menjadi USD 77 juta pada 2024</p> <p>Kesejahteraan petambak nila meningkat</p> <p>Pertumbuhan ekonomi wilayah</p> <p>Peningkatan pendapatan negara (pajak dan PNBP)</p>
<p>Market Size USD 7,8 miliar (2023), destinasi mencapai USD 19,6 miliar (2033)</p> <p>Market Share Indonesia 18,4% dari pasar global (2022)</p> <p>Produktivitas masih rendah 18 ton/Ha/siklus</p> <p>Luas lahan eksisting 89.549 Ha</p> <p>Kawasan budidaya rumput laut tidak tertata dan penggunaan bibit non-kultur jaringan</p>	<p>Modelling Budidaya Rumput Laut</p> <p>Daerah Pengembangan Modelling: Wakatobi (2023), Maluku Tenggara dan Rote Ndao (2024)</p> <p>Peningkatan Teknologi</p>	<p>Kebutuhan pasca panen</p> <p>Rak pengering</p> <p>Unit Pengolah Rumput Laut</p> <p>Gudang</p>	<p>Peningkatan produktivitas dari semula 18 menjadi 60 ton/Ha/siklus</p> <p>Peningkatan penyerapan tenaga kerja</p> <p>Peningkatan ekspor rumput laut Indonesia menjadi USD 658 juta pada 2024</p> <p>Peningkatan kesejahteraan pembudidaya rumput laut</p> <p>Pertumbuhan ekonomi wilayah</p> <p>Peningkatan pendapatan negara (pajak dan PNBP)</p>

Kondisi	Modelling Budidaya Lobster Berbasis Kawasan	Hilirisasi	Multiplier Effect
<ul style="list-style-type: none"> Market Size USD 8,7 miliar (2024), desimalisasi mencapai USD 13,5 miliar (2029) Market Share Indonesia 0,5% dari pasar global (2022) Indonesia sebagai natural hatchery benih lobster Kegiatan budidaya lobster masih sangat sedikit dan produktivitasnya rendah 	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong penguatan budidaya lobster dengan cara kerjasama dengan negara yang sudah berkembang budidaya lobsternya untuk berinvestasi lobster di Indonesia Prasarana modeling: 70 unit kerangkeng ukuran L <p>Peningkatan Teknologi</p>	<ul style="list-style-type: none"> Kebutuhan pasca panen Cold Storage Unit Pengolah Lobster 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan produktivitas menjadi 20 ton/Ha/tahun Peningkatan penyerapan tenaga kerja Peningkatan ekspor lobster Indonesia menjadi USD 25 juta pada 2024 Kesejahteraan pembudidaya lobster meningkat Pertumbuhan ekonomi wilayah Peningkatan pendapatan negara (pajak dan PNBP)

Kondisi	Modelling Budidaya Kepiting Berbasis Kawasan	Hilirisasi	Multiplier Effect
<ul style="list-style-type: none"> Market Size (2023) USD 879 juta, desimalisasi mencapai USD 1,51 miliar (2033) Market Share Indonesia 1,9% dari pasar global (2022) Produktivitas masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> Luas model tambak 20 Ha <p>Peningkatan Teknologi</p>	<ul style="list-style-type: none"> Kebutuhan pasca panen Cold Storage Unit Pengolah Kepiting 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan produktivitas menjadi 7,92 ton/Ha/tahun Peningkatan penyerapan tenaga kerja Peningkatan ekspor kepiting Indonesia menjadi USD 476 juta pada 2024 Kesejahteraan petambak kepiting meningkat Pertumbuhan ekonomi wilayah Peningkatan pendapatan negara (pajak dan PNBP)

Konsep dan Penetapan KPB	Modeling Kampung Perikanan Budidaya Modern
<ul style="list-style-type: none"> Karakteristik KPB Modern: Kawasan yang maju, modern, canggih, dan teknologi baru (tidak bersifat konvensional) Kegiatan perikanan budidaya di masyarakat sudah menjadi "budaya", dalam arti sebagian besar kehidupan masyarakat bergantung dari usaha budidaya ikan Penetapan 210 Kampung PB melalui Kepmen KP No. 111 Tahun 2023 210 KPB: Nila 50, RI, 41, Ujung 13, Kepiting 6, Lobster 4, Lainnya 96 Tahun 2024 adalah persiapan penempatan 10 lokasi modeling Kampung PB Modern 	<p>Huba → On Farm → Huba</p> <p>Huba (Hatchery, Pakan) → On Farm (Quality Assurance, Kontrol kualitas air dan pakan, Digitalisasi sistem produksi dan marketing, Struktur Pemukiman) → Huba (Pasar, Sarana Produksi)</p> <p>NTPi: Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Meningkat</p> <p>PAD: Pendapatan Asli Daerah Meningkat</p> <p>Pendanaan: APBN dan APBD, Non-APBN, Sumber lain yang tidak mengikat</p> <p>Kegiatan: Budidaya ikan dilakukan oleh masyarakat (individu / kelompok)</p> <p>Pembiayaan: Didukung oleh KKP, Pemda, dan stakeholder lainnya</p>

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahunan TA. 2024 (*Unaudited*) ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahunan TA. 2024 (*Unaudited*) ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yang meliputi satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah entitas akuntansi di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Pembinaan Akuntansi Instansi adalah 50 entitas. Rincian entitas tersebut tersaji sebagai berikut:

Rekapitulasi Jumlah Entitas UAPPA-EI

No	Kode Es I	Uraian	Jumlah Jenis Kewenangan				Jumlah Satker
			K P	K D	D K	TP	
1	04	Kantor Pusat	1	-	-	-	1
2	04	Kantor Daerah	-	15	-	-	15
3	04	Tugas Pembantuan	-	-	34	-	34
Jumlah			1	15	34	0	50

Mulai penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022, rekonsiliasi eksternal dilakukan melalui Aplikasi SAKTI yaitu aplikasi berbasis web yang dikembangkan dalam rangka proses rekonsiliasi data transaksi keuangan dan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Sekretariat Jenderal dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahunan T.A.2024 (*Unaudited*) telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yang merupakan entitas pelaporan dari Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja**(3) Belanja**

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban**(4) Beban**

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset**(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar**a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan

(*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama

dengan atau lebih dari Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015.

Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun

Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun
--	---------

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(7) Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka

Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(8) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis
Akrual
Pertama Kali*

(9) Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No.71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

**Penjelasan
Umum
Lainnya**

**Entitas
Penyusun
Laporan
Keuangan**

A.6 Penjelasan Umum Lainnya

1. Entitas Penyusun Laporan Keuangan

Dalam pelaksanaan pelaporan keuangan, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya menggunakan pola pelaporan berjenjang yang disusun mulai tingkat satker. Jumlah satker yang melakukan penyusunan atas Laporan keuangan Lingkup DJPB dengan perbandingan antara tahun 2024 dan 2023 dapat digambarkan dalam rincian jumlah satker aktif adalah sebagai berikut.

Tabel A.1
Perbandingan Jumlah Satker Yang Melakukan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 dan 2023

No.	Eselon I	2024					2023					+/-
		KP	KD	DK	TP	Σ	KP	KD	DK	TP	Σ	
1	DJPB	1	15	34		50	1	15	34		50	0
a	Σ	1	15	34		50	1	15	34		50	0

**Rekening
Koran**

2. Rekening Koran

Pada pelaksanaan kegiatan satuan kerja dilingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, untuk menampung pencairan anggaran dan realisasi baik pendapatan maupun Belanja, menggunakan 50 rekening koran pada Bank Pemerintah dengan rincian sesuai dengan tahun penerbitan sebagai berikut.

Tabel A.2
Jumlah Rekening Koran Bank

Eselon I	NAMA BANK									TOTAL
	BRI	MANDIRI	BNI	BPD Sulawesi Tenggara	BPD Riau	BPD Kalimantan Barat	BPD Jawa Timur	Bank Syariah Indonesia	BTN	
DJPB	18	11	14	1	1	1	1	2	1	50
Grand Total	18	11	14	1	1	1	1	2	1	50

Satuan Kerja yang Menggunakan Anggaran PNBP

3. Satuan Kerja yang menggunakan Anggaran PNBP

Selain satuan kerja merealisasikan Anggarannya melalui Rupiah Murni, terdapat juga satuan kerja yang menggunakan anggaran berasal dari

Penggunaan Sebagian PNBPN, yang merupakan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang PNBPN Lingkup DJPN antara lain:

Tabel A.3
Satker Yang Menggunakan Anggaran Berasal Dari Penggunaan Sebagian PNBPN

Eselon I	Jumlah satker	Pagu	Realisasi
DJPB	15	11.634.521.000	11.475.250.182
Jumlah	15	11.634.521.000	11.475.250.182

Informasi Kepegawaian

4. Informasi Kepegawaian

Data Pegawai Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya berdasarkan simpeg pada saat disusunnya Laporan ini, Jumlah Pegawai DJPN dari Tahun 2017 – 2024 terdiri dari

Tabel A.4
Data Pegawai Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

NO	UNIT KERJA		TAHUN						
	PERMEN KP NO.23 TAHUN 2015	PERMEN KP NO.6 TAHUN 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	DITJENKAN BUDIDAYA	DITJENKAN BUDIDAYA	1418	1424	1356	1313	1309	1195	1252
	TOTAL		1418	1424	1356	1313	1309	1195	1252

Informasi Hukum

5. Informasi Hukum

REKAPITULASI RESIKO TUNTUTAN HUKUM										
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN										
DAFTAR PERKARA YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN PENGELUARAN NEGARA TAHUN 2022										
No	Nomer Perkara Deskripsi Perkara	Penggugat Tergugat	Status Perkara		Gugatan / Pelitum		Potensi Pengeluaran Negara			Amar Putusan
			Status	Ket	Materi	Imateri	Rupiah	Valas	Tanah	
1.	712/PDT.G/2019/PN.JKT.PST	PT.Kwasa Hexagon	Berjalan	Putusan Tingkat 1 dan Tingkat 2	1.203.000.000	180.000.000.000	V			
2.	302/IV/ARB-BANI/2009	PT. Semeru Cemerlang	Inkracht	-	117.000.000.000		V			Inkracht
3.	3/Pdt.G/2022/PN.Bks	PT.Tambak Mas Makmur	Proses Sidang	-			V			

Informasi Kerjasama

6. Informasi Kerjasama

Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya melakukan kerjasama multilateral dan bilateral selama tahun 2024 sebagai berikut yang tersusun dalam tabel :

REKAPITULASI KERJASAMA MULTILATERAL									
No	Negara/Partners	Keaja Saja	Dokumentasi Kerja Sama	Status	Kejelasan	Pemangung Jawa	Program/Kelembagaan	Estimasi Manfaat	Estimasi Risiko/Catatan
1	Food and Agriculture Organization	Support Migration of Indonesian Fisheries (MFI) Risk Assessment with Aquaculture in Asia (PDR42172)	Mou Joint Agreement	On Going	1. Menunjang kegiatan pada aspek: a. Penelitian pemantauan Indonesia terhadap AMU / AMU terhadap lingkungan perairan b. Menunjang pemantauan mutasi genetik ikan melakukan uji gen-tipe dan AMU c. Menunjang pemantauan pemeliharaan ikan dalam lingkungan akuakultur secara baik dan benar d. Menunjang kerja yang berkaitan dengan AMU pada sektor perikanan yang berkaitan dengan keamanan pangan dan kesehatan manusia	Direktoral LUPB NKP	1. Pemahaman Risiko Mutasi Genetik (PDR42172) pada 2021, 2022, dan 2023 2. Penelitian dengan Okeanografi, 17 Maret 2021 3. Penelitian tentang AMU di perairan laut PANG, 10 Maret 2021 4. Penelitian dengan Internal LUPB, 23 Maret 2021	Partnership dengan tahun 2019 (3 April 2021), 2021, dan 2022 Pusat Penelitian Biologi Indonesia Pusat Penelitian Biologi Hewan dan Perikanan (Pusat Penelitian Perikanan) Pusat Penelitian Mutasi Genetik (Pusat Penelitian Mutasi Genetik)	Proses akan berakhir di Bulan Juli 2021
	Financing (Joint Planning) Tracability Program (JTPM421724)	Mou Joint Agreement	On Going	1. Pemahaman tentang dengan dukungan penelitian dan penelitian di daerah lain yang berkaitan dengan sistem pemantauan ikan di laut di Indonesia dan bentuk dukungan untuk budidaya ulang di Indonesia 2. Penelitian praktik budidaya ikan dan pemantauan kesehatan pemeliharaan ulang dan ikan 3. Menunjang kegiatan kerja penelitian dan penelitian di bidang kesehatan untuk pemantauan ulang dan kesehatan ulang dan penelitian kesehatan ulang dan kesehatan di Indonesia	Direktoral Perikanan dan LUPB NKP	1. Pelaksanaan monitor kesehatan ikan pada tahun April 2021 2. Pelaksanaan National Training (JTPM421724) bagi 50 pembudidaya ulang di NKP, Boreng pada bulan Maret 2021	Partnership dengan 2019 (3 April 2021), 2021, dan 2022 Pusat Penelitian Biologi Hewan dan Perikanan (Pusat Penelitian Perikanan) Pusat Penelitian Mutasi Genetik (Pusat Penelitian Mutasi Genetik)	Proses akan berakhir di Bulan Juli 2021	
	FAO-GOPDCE/FAO/Indonesia/Program Development of Progressive Fisheries Management (PMPM) in Indonesia	Agreement Letter dan LUPB akan terdapat di buku Global FAO	On Going	1. Melakukan FGD untuk 12 point wawancara dan diskusi dengan pemangku kebijakan nasional dan lokal 2. Melakukan FGD untuk 12 point wawancara dan diskusi dengan pemangku kebijakan nasional dan lokal 3. Melakukan FGD untuk 12 point wawancara dan diskusi dengan pemangku kebijakan nasional dan lokal 4. Melakukan FGD untuk 12 point wawancara dan diskusi dengan pemangku kebijakan nasional dan lokal 5. Melakukan FGD untuk 12 point wawancara dan diskusi dengan pemangku kebijakan nasional dan lokal 6. Melakukan FGD untuk 12 point wawancara dan diskusi dengan pemangku kebijakan nasional dan lokal 7. Melakukan FGD untuk 12 point wawancara dan diskusi dengan pemangku kebijakan nasional dan lokal 8. Melakukan FGD untuk 12 point wawancara dan diskusi dengan pemangku kebijakan nasional dan lokal 9. Melakukan FGD untuk 12 point wawancara dan diskusi dengan pemangku kebijakan nasional dan lokal 10. Melakukan FGD untuk 12 point wawancara dan diskusi dengan pemangku kebijakan nasional dan lokal 11. Melakukan FGD untuk 12 point wawancara dan diskusi dengan pemangku kebijakan nasional dan lokal 12. Melakukan FGD untuk 12 point wawancara dan diskusi dengan pemangku kebijakan nasional dan lokal	Direktoral Kawasan dan Kerjasama	1. Kegiatan FGD dan wawancara untuk melakukan 12 wawancara dan diskusi dengan pemangku kebijakan nasional dan lokal 2. Melakukan FGD untuk 12 point wawancara dan diskusi dengan pemangku kebijakan nasional dan lokal 3. Melakukan FGD untuk 12 point wawancara dan diskusi dengan pemangku kebijakan nasional dan lokal 4. Melakukan FGD untuk 12 point wawancara dan diskusi dengan pemangku kebijakan nasional dan lokal 5. Melakukan FGD untuk 12 point wawancara dan diskusi dengan pemangku kebijakan nasional dan lokal 6. Melakukan FGD untuk 12 point wawancara dan diskusi dengan pemangku kebijakan nasional dan lokal 7. Melakukan FGD untuk 12 point wawancara dan diskusi dengan pemangku kebijakan nasional dan lokal 8. Melakukan FGD untuk 12 point wawancara dan diskusi dengan pemangku kebijakan nasional dan lokal 9. Melakukan FGD untuk 12 point wawancara dan diskusi dengan pemangku kebijakan nasional dan lokal 10. Melakukan FGD untuk 12 point wawancara dan diskusi dengan pemangku kebijakan nasional dan lokal 11. Melakukan FGD untuk 12 point wawancara dan diskusi dengan pemangku kebijakan nasional dan lokal 12. Melakukan FGD untuk 12 point wawancara dan diskusi dengan pemangku kebijakan nasional dan lokal	Partnership dengan 2019 (3 April 2021), 2021, dan 2022 Pusat Penelitian Biologi Indonesia Pusat Penelitian Biologi Hewan dan Perikanan (Pusat Penelitian Perikanan) Pusat Penelitian Mutasi Genetik (Pusat Penelitian Mutasi Genetik)	Proses akan berakhir di Bulan Juli 2021	
2	United Nations Industrial Organization	Digital Quality and Standards	Mou Joint Agreement	On Going	1. Penelitian dan pengembangan teknologi digital untuk industri perikanan 2. Penelitian dan pengembangan teknologi digital untuk industri perikanan 3. Penelitian dan pengembangan teknologi digital untuk industri perikanan 4. Penelitian dan pengembangan teknologi digital untuk industri perikanan 5. Penelitian dan pengembangan teknologi digital untuk industri perikanan 6. Penelitian dan pengembangan teknologi digital untuk industri perikanan 7. Penelitian dan pengembangan teknologi digital untuk industri perikanan 8. Penelitian dan pengembangan teknologi digital untuk industri perikanan 9. Penelitian dan pengembangan teknologi digital untuk industri perikanan 10. Penelitian dan pengembangan teknologi digital untuk industri perikanan 11. Penelitian dan pengembangan teknologi digital untuk industri perikanan 12. Penelitian dan pengembangan teknologi digital untuk industri perikanan	Direktoral Perikanan dan LUPB NKP	1. Kegiatan FGD dan wawancara untuk melakukan 12 wawancara dan diskusi dengan pemangku kebijakan nasional dan lokal 2. Melakukan FGD untuk 12 point wawancara dan diskusi dengan pemangku kebijakan nasional dan lokal 3. Melakukan FGD untuk 12 point wawancara dan diskusi dengan pemangku kebijakan nasional dan lokal 4. Melakukan FGD untuk 12 point wawancara dan diskusi dengan pemangku kebijakan nasional dan lokal 5. Melakukan FGD untuk 12 point wawancara dan diskusi dengan pemangku kebijakan nasional dan lokal 6. Melakukan FGD untuk 12 point wawancara dan diskusi dengan pemangku kebijakan nasional dan lokal 7. Melakukan FGD untuk 12 point wawancara dan diskusi dengan pemangku kebijakan nasional dan lokal 8. Melakukan FGD untuk 12 point wawancara dan diskusi dengan pemangku kebijakan nasional dan lokal 9. Melakukan FGD untuk 12 point wawancara dan diskusi dengan pemangku kebijakan nasional dan lokal 10. Melakukan FGD untuk 12 point wawancara dan diskusi dengan pemangku kebijakan nasional dan lokal 11. Melakukan FGD untuk 12 point wawancara dan diskusi dengan pemangku kebijakan nasional dan lokal 12. Melakukan FGD untuk 12 point wawancara dan diskusi dengan pemangku kebijakan nasional dan lokal	Partnership dengan 2019 (3 April 2021), 2021, dan 2022 Pusat Penelitian Biologi Indonesia Pusat Penelitian Biologi Hewan dan Perikanan (Pusat Penelitian Perikanan) Pusat Penelitian Mutasi Genetik (Pusat Penelitian Mutasi Genetik)	Proses akan berakhir di Bulan Juli 2021
	Asian Development Bank	Loan SMOG-IND Indonesia Infrastructure Improvement for Strong Aquaculture Project	Mou on Project/Loan Indonesia Infrastructure Improvement for Strong Aquaculture Project	Preparation	Proses di akan membantu KOP dalam meningkatkan budidaya ulang yang ramah lingkungan dan meningkatkan transparansi, keterbukaan dan proses perbaikan masa pemangku produksi, kualitas dan kesejahteraan tambak ulang ulang di 7 provinsi Proses di akan membantu inspeksi lingkungan yang mendukung proses budidaya ulang dan meningkatkan produktivitas, efisiensi dan nilai tambah ulang ulang, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas perikanan dan kaitannya dengan nilai tambah ulang ulang.	Direktoral KOP dan Kerjasama	1. Kegiatan FGD dan wawancara untuk melakukan 12 wawancara dan diskusi dengan pemangku kebijakan nasional dan lokal 2. Melakukan FGD untuk 12 point wawancara dan diskusi dengan pemangku kebijakan nasional dan lokal 3. Melakukan FGD untuk 12 point wawancara dan diskusi dengan pemangku kebijakan nasional dan lokal 4. Melakukan FGD untuk 12 point wawancara dan diskusi dengan pemangku kebijakan nasional dan lokal 5. Melakukan FGD untuk 12 point wawancara dan diskusi dengan pemangku kebijakan nasional dan lokal 6. Melakukan FGD untuk 12 point wawancara dan diskusi dengan pemangku kebijakan nasional dan lokal 7. Melakukan FGD untuk 12 point wawancara dan diskusi dengan pemangku kebijakan nasional dan lokal 8. Melakukan FGD untuk 12 point wawancara dan diskusi dengan pemangku kebijakan nasional dan lokal 9. Melakukan FGD untuk 12 point wawancara dan diskusi dengan pemangku kebijakan nasional dan lokal 10. Melakukan FGD untuk 12 point wawancara dan diskusi dengan pemangku kebijakan nasional dan lokal 11. Melakukan FGD untuk 12 point wawancara dan diskusi dengan pemangku kebijakan nasional dan lokal 12. Melakukan FGD untuk 12 point wawancara dan diskusi dengan pemangku kebijakan nasional dan lokal	Partnership dengan 2019 (3 April 2021), 2021, dan 2022 Pusat Penelitian Biologi Indonesia Pusat Penelitian Biologi Hewan dan Perikanan (Pusat Penelitian Perikanan) Pusat Penelitian Mutasi Genetik (Pusat Penelitian Mutasi Genetik)	Proses akan berakhir di Bulan Juli 2021

14	United States of America/Oceanic Institute of Hawaii	Development of National Shrimp Breeding Program	3.1 Letter of Intent (LOI), dan 3.2 MoU Di- 2019	3.3 Lot telah ditandatangani oleh Dirjen Perikanan Budidaya dan Presiden Oceanic Institute of Hawaii. MoU University of Hawaii pada 20 November 2020 di Hawaii. 3.4 MoU antara OI dan OIB telah ditandatangani pada bulan Desember 2021.	3.4 OI akan memberikan dukungan teknis dan pengetahuan Apresiasi untuk kegiatan Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture Project (ISAP) yang akan dikembangkan melalui ASB tahun 2023. Pada Agustus 2023 tim ahli dari Oceanic Institute telah melakukan preliminary visit ke Indonesia dalam rangka pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan program perikanan udang nasional.	Dukungan kerja sama ditandatangani selama 5 tahun berupa beasiswa teknis atau beasiswa teknis dari pihak OI untuk pengembangan breeding program di Indonesia. Untuk pemeliharaan dan perawatan ikan udang oleh ASB nasional, project code 0409-0403, berdasarkan Improvement for Shrimp Aquaculture Project.
15	Musambis	Kerja sama pengembangan perikanan budidaya di Musambis, Aceh untuk kemaritiman air tawar dan	3.5 MoU kerja sama kolaborasi perikanan Indonesia - Musambis di 772 tahun lahir RI dan UNP Musambis di Bali, 28 Oktober 2024.	3.6 MoU telah ditandatangani dengan Pemerintah Aceh Musambis pada tanggal 28 Oktober 2024. 3.7 MoU telah ditandatangani oleh OIB dan Musambis pada tanggal 28 Oktober 2024.	3.8 Kerja sama yang ditunjukkan dalam PKA kepada Musambis adalah pelatihan budidaya rumput laut dan produksi pakan ikan mandiri. Hasil ini digali secara langsung dari kunjungan dan wawancara pihak lokal yang disampaikan pada 075 meeting.	Pengembangan Pula kerjasama antara OIB dan Musambis, dan melakukan pemantauan/monitoring.
16	Selanjutnya Bang	Memorandum kerja sama di Selanjutnya Bang	Plan of Action (PoA) on Comprehensive Partnership New Zealand 2023 - 2028	PoA ditandatangani oleh Menteri RI dan Menteri New Zealand secara pribadi di Jakarta dan Wellington pada 29 Juli 2023.	3.9 Kerja sama pada kegiatan pameran perikanan di Kecamatan yang dilakukan secara virtual via Youtube dan website pada Oktober 2023. OIB menyampaikan materi tentang Policy in Aquaculture dan Bagian Humas menyampaikan brosur dan brosur. Pameran diorganisir oleh OIB dan OIB. Semua pihak 3.10 Melakukan kegiatan pameran kerja sama RI - New Zealand yang diorganisir oleh OIB.	Memorandum kerja sama selanjutnya ditandatangani pemerintah pada Oktober 2023 dan berturut-turut akan dilanjutkan dengan kegiatan lainnya.
17	Perang Oriental Consultant Global (OCC)	Proyek kerja sama pengembangan teknologi untuk Shrimp Production System (SPS)	Belum ditandatangani bentuk dokumen kerja sama yang akan dibuat.	Pengajuan	Pengembangan OIB ditunjukkan akan dibagikan melalui dukungan pendanaan OIB. OCC telah submit proposal ke ICA pada Oktober 2023 dengan dukungan tambahan tahun dan biaya.	Dokumen kerja sama OIB/OA/TA dengan OCC akan di draft setelah mendapat persetujuan pendanaan dari ICA.

Sistem Informasi yang digunakan

7. Sistem Informasi yang dipergunakan

Sistem Informasi yang dipergunakan dalam melakukan penyusunan Laporan Keuangan sebagai berikut :

- a. Aplikasi SAKTI, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, penyempurnaan sistem penganggaran terus dilakukan. Penyempurnaan ini tetap berlandaskan pada konsep penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja dan kerangka penganggaran jangka menengah. aplikasi SAKTI ini dilakukan mengacu pada perubahan kebijakan dan perubahan teknis aplikasi. Aplikasi SAKTI memiliki 8 Modul yaitu Modul Anggaran, Modul Komitmen, Modul Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Modul Pembayaran, Modul GLP, Modul Aset Tetap, Modul Persediaan, dan Modul Piutang. Aplikasi dipergunakan mulai tahun 2022. Aplikasi ini Dibuat dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
- b. Aplikasi SIRUP, aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (*Web based*) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP. SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUPnya. untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan. Aplikasi ini dibuat dan dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- c. Aplikasi SPSE, aplikasi *e-procurement* yang dikembangkan oleh Direktorat *e-Procurement* – Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) untuk digunakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di seluruh K/L/D/I. Aplikasi ini dikembangkan dengan semangat efisiensi nasional sehingga tidak memerlukan biaya lisensi, baik lisensi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) itu sendiri maupun perangkat lunak pendukungnya;
- d. SPAN, sebuah sistem yang dirancang dengan mengintegrasikan proses penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan keuangan Negara sehingga diperoleh laporan keuangan akurat yang melalui proses akuntabel dan transparan. Aplikasi ini Dibuat dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
- e. Simponi, aplikasi yang digunakan untuk memfasilitasi pembayaran/penyetoran PNBPN dan penerimaan nonanggaran. Keberadaan aplikasi SIMPONI ini ditujukan untuk memberi kemudahan bagi Wajib Bayar/Wajib Setor guna membayar atau menyetor PNBPN dan penerimaan non anggaran. Aplikasi ini Dibuat dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
- f. SIMAN, aplikasi yang digunakan untuk mendukung proses pengelolaan BMN, yang meliputi perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penghapusan, dan pemindahtanganan aset negara berbasis internet yang dapat diakses oleh Pengelola dan Pengguna. Aplikasi ini Dibuat dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

**Perubahan
Manajerial**

8. Perubahan Manajerial

Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2020 tentang Pengisian dan Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 pada tanggal 23 Desember 2020. Telah dilakukan penggantian Pejabat Pengguna Anggaran yaitu Sakti Wahyu Trenggono dari pejabat sebelumnya Edhy Prabowo.

Aplikasi yang digunakan dan dikembangkan oleh DJPB

9. Aplikasi yang digunakan dan dikembangkan oleh DJPB

Nama Eselon I	Nama Aplikasi	Penjelasan Fungsi/Manfaat Dari Aplikasi	Pemilik Aplikasi
DJPB			
	SEMILIR	Pemetaan Potensi dan Sarana/Prasarana Budidaya Perikanan [Pendataan sarana produksi: excavator, saluran tambak, balai-balai benih, potensi lahan]	DJPB
	SIBATIK	Aplikasi berbasis web untuk melakukan pelayanan obat ikan [Serupa dengan SEPEKAN. SIBATIK adalah Sistem Informasi Obat Ikan. SIBATIK sudah running, ada di bagian pelayanan publik. Apabila akan diintegrasikan, harus sangat hati-hati karena bisa sangat mengganggu pelayanan publik]	DJPB
	SEKETIKA	Permohonan surat keterangan teknis impor bahan baku pakan ikan [Catatan: Masih berjalan, namun nanti akan digantikan dengan SRIKANDI. Termasuk pelayanan publik satu pintu (ada loket). Integrasi harus dilakukan dengan hati-hati karena menyangkut pelayanan publik]	Pusdatin
	AKUBISA	Aplikasi pengajuan surat izin impor ikan hidup, Surat Rekomendasi Pembudidayaan Ikan Penanaman Modal(RPIPM) dan SIUP	DJPB

Kebijakan Manajemen bidang Keuangan

10. Kebijakan Manajemen bidang Keuangan

- Melakukan reuiu terhadap DIPA 2024 yang sudah disahkan dan hal-hal yang diperlukan penyesuaian agar segera dilakukan penyesuaian/revisi anggaran.
- Melakukan percepatan persiapan pelaksanaan program/kegiatan meliputi:
 - a. Penetapan Petunjuk Operasional Kegiatan.
 - b. Penetapan Pejabat Perbendaharaan yaitu Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Bendahara.
- Melakukan percepatan proses pengadaan barang/jasa yang mencakup:
 - a. Penetapan Pejabat Pengadaan, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan atau kelompok kerja pengadaan.

- b. Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) paling lambat 14 hari kerja setelah kontrak ditandatangani sesuai dengan peraturan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah.
 - c. Penandatanganan kontrak ke KPPN paling lambat lima hari kerja setelah kontrak ditandatangani.
- Melakukan percepatan persiapan penyaluran bantuan pemerintah yang mencakup: penetapan pedoman umum dan Petunjuk Teknis, pelaksanaan verifikasi dan validasi penerima/kelompok serta penetapan surat keputusan penerima.
 - Kebijakan Pelaksanaan Anggaran KKP, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan anggaran serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran yang mencakup:
 - a. Proses penyusunan anggaran tahun 2024 telah memperhatikan urutan prioritas diantaranya kebutuhan anggaran operasional yang sifatnya mendasar, program dan kegiatan yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam dokumen RPJM 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 khususnya kegiatan yang termasuk *Major Project*, kebutuhan anggaran untuk kegiatan lanjutan yang bersifat tahun jamak (*multiyears*) dan penyediaan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan peraturan perundangan.
 - Alokasi anggaran KKP juga difokuskan untuk memberikan nilai tambah bagi sektor kelautan dan perikanan, salah satunya untuk pengembangan sektor budidaya sebagaimana arahan Presiden. Tak hanya budidaya, pengelolaan perikanan tangkap, nilai tambah di sektor penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pengelolaan ruang laut, riset dan pengembangan SDM, pengendalian mutu dan perkarantinaan serta pengawasan keuangan dan dukungan manajemen juga akan menjadi fokus pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2024.
 - Alokasi anggaran mengutamakan kegiatan prioritas (*money follow program* prioritas). Pengalokasian anggaran tidak lagi berbasis pada

pelaksanaan tugas dan fungsi namun berdasarkan kebutuhan organisasi untuk mendukung pencapaian visi dan misi Presiden.

- Melibatkan peran aktif bagian yang menangani Monitoring, Evaluasi dan Pengelola Keuangan seluruh Unit Eselon I Lingkup KKP untuk membantu perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan serta perkembangan realisasi anggaran belanja.
- Dukungan dari Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal dalam mendorong terjadinya percepatan pelaksanaan anggaran belanja KKP.

**Penjelasan
lainnya**

11. Penjelasan Lainnya

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KMK163 Tahun 2023 tentang penetapan Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara, Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo, dan Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan layanan Umum. Selanjutnya ketiga Balai ini telah menjadi Badan Layanan Umum.

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya 31 Desember 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara periode 31 Desember 2024 merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp117.016.527.359,00.

Realisasi Belanja Negara Netto pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp992.008.206.671,00 atau mencapai 80,84 persen, nilai tersebut merupakan nilai setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp2.924.470.192,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp1.227.143.203.000,00

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 04

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 18/09/25 12:51 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum					
424113	Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan	0	344,968,750	0	344,968,750	0
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	991,290,000	1,017,159,500	0	1,017,159,500	102.61
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4241	991,290,000	1,362,128,250	0	1,362,128,250	137.41
4243	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU					
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	0	66,073,273,000	0	66,073,273,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4243	0	66,073,273,000	0	66,073,273,000	
4249	Pendapatan BLU Lainnya					
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	48,000,000	564,679,971	0	564,679,971	1176.42
424919	Pendapatan Lain-lain BLU	35,944,734,000	23,702,944,699	700,000	23,702,244,699	65.94
424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	93,600,000	179,474,390	0	179,474,390	191.75
424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	144,340,000	491,473,383	0	491,473,383	340.5
424929	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya	63,400,000	420,000	420,000	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4249	36,294,074,000	24,938,992,443	1,120,000	24,937,872,443	68.71
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan	12,301,594,000	13,412,266,129	0	13,412,266,129	109.03
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	38,477,800	0	38,477,800	0
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	50,000,000	2,014,396,347	0	2,014,396,347	4028.79
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	27,918,000	0	27,918,000	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	185,126,000	743,111,147	0	743,111,147	401.41
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	316,355,000	707,176,924	0	707,176,924	223.54
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	12,853,075,000	16,943,346,347	0	16,943,346,347	131.82
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum					

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 04

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 18/09/25 12:51 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_pen_akun_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	2,280,154,000	3,706,286,800	0	3,706,286,800	162.55
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	2,280,154,000	3,706,286,800	0	3,706,286,800	162.55
4256	Pendapatan Jasa Lainnya					
425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	8,000,000	34,500,000	0	34,500,000	431.25
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4256	8,000,000	34,500,000	0	34,500,000	431.25
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan					
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	0	4,800,000	0	4,800,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	0	4,800,000	0	4,800,000	
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	1,249,447,622	0	1,249,447,622	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	1,249,447,622	0	1,249,447,622	
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	392,446,010	0	392,446,010	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,281,873,298	0	2,281,873,298	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	29,102,029	0	29,102,029	0
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	1,451,560	0	1,451,560	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	2,704,872,897	0	2,704,872,897	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	52,426,593,000	117,017,647,359	1,120,000	117,016,527,359	223.2
	JUMLAH PENDAPATAN	52,426,593,000	117,017,647,359	1,120,000	117,016,527,359	223.2

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 04

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 18/09/25 12:50 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1_poc

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	66,737,601,000	62,048,092,000	61,965,358,000	42,419,356	61,922,938,644	99.8	125,153,356
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	10,059,000	948,000	883,949	27,227	856,722	90.37	91,278
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	5,418,798,000	4,784,768,000	4,774,433,080	1,358,080	4,773,075,000	99.76	11,693,000
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	1,603,518,000	1,490,257,000	1,483,438,206	189,454	1,483,248,752	99.53	7,008,248
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	1,403,735,000	786,711,000	784,210,000	1,850,000	782,360,000	99.45	4,351,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	6,012,423,000	4,336,013,000	4,322,801,000	68,695,300	4,254,105,700	98.11	81,907,300
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	238,021,000	627,272,000	613,214,647	0	613,214,647	97.76	14,057,353
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	4,011,176,000	3,363,089,000	3,356,405,510	434,520	3,355,970,990	99.79	7,118,010
511129	Belanja Uang Makan PNS	11,838,874,000	8,139,692,000	7,975,680,000	5,155,500	7,970,524,500	97.92	169,167,500
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1,300,561,000	1,025,630,000	1,019,390,000	4,515,400	1,014,874,600	98.95	10,755,400
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	98,574,766,000	86,602,472,000	86,295,814,392	124,644,837	86,171,169,555	99.5	431,302,445
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	1,238,543,000	5,671,204,000	5,653,418,900	0	5,653,418,900	99.69	17,785,100
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4,617,000	531,000	109,108	180	108,928	20.51	422,072
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	64,080,000	305,098,000	301,029,970	0	301,029,970	98.67	4,068,030
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	137,678,000	92,477,000	79,982,574	0	79,982,574	86.49	12,494,426
511623	Belanja Tunjangan Struktural PPPK	8,700,000	20,000	0	0	0	0	20,000
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	127,346,000	242,714,000	208,253,720	0	208,253,720	85.8	34,460,280
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	72,695,000	318,492,000	313,288,920	0	313,288,920	98.37	5,203,080
511627	Belanja Tunjangan Lauk Pauk PPPK	19,536,000	56,774,000	56,176,000	0	56,176,000	98.95	598,000
511628	Belanja Uang Makan PPPK	251,489,000	1,004,560,000	928,844,000	420,600	928,423,400	92.42	76,136,600
511629	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PPPK	270,188,000	427,377,000	426,970,924	0	426,970,924	99.9	406,076
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	1,470,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	2,196,342,000	8,119,247,000	7,968,074,116	420,780	7,967,653,336	98.13	151,593,664
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	944,956,000	457,408,000	404,852,000	6,379,150	398,472,850	87.12	58,935,150
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	92,000,000	69,363,000	38,166,000	0	38,166,000	55.02	31,197,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	1,036,956,000	526,771,000	443,018,000	6,379,150	436,638,850	82.89	90,132,150
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	94,002,784,000	85,002,057,000	84,810,105,477	5,630,148	84,804,475,329	99.77	197,581,671
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	1,273,053,000	6,533,238,000	6,512,386,226	146,567	6,512,239,659	99.68	20,998,341
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	95,275,837,000	91,535,295,000	91,322,491,703	5,776,715	91,316,714,988	99.76	218,580,012
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	197,083,901,000	186,783,785,000	186,029,398,211	137,221,482	185,892,176,729	99.52	891608271
52	BELANJA BARANG							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 04

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 18/09/25 12:50 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1_poc

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	36,534,959,000	31,445,221,000	31,274,660,974	2,416,000	31,272,244,974	99.45	172,976,026
521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	3,817,000	23,820,000	23,816,775	0	23,816,775	99.99	3,225
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	953,654,000	524,275,000	545,559,855	28,955,000	516,604,855	98.54	7,670,145
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	321,533,000	84,294,000	75,343,268	0	75,343,268	89.38	8,950,732
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	5,295,404,000	3,303,726,000	3,241,708,400	171,000	3,241,537,400	98.12	62,188,600
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	3,436,839,000	9,365,374,000	9,346,214,031	0	9,346,214,031	99.8	19,159,969
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	46,546,206,000	44,746,710,000	44,507,303,303	31,542,000	44,475,761,303	99.39	270,948,697
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	18,566,283,000	24,504,768,000	23,682,503,539	14,371,711	23,668,131,828	96.59	836,636,172
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	15,656,057,000	11,779,574,000	11,663,300,805	1,162,800	11,662,138,005	99	117,435,995
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	5,208,872,000	8,857,140,000	8,757,160,251	18,765,420	8,738,394,831	98.66	118,745,169
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	124,723,000	124,721,000	0	124,721,000	100	2,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	39,431,212,000	45,266,205,000	44,227,685,595	34,299,931	44,193,385,664	97.63	1,072,819,336
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	83,965,398,000	71,780,230,000	71,497,589,085	1,022,000	71,496,567,085	99.6	283,662,915
521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku	2,475,543,000	1,472,958,000	1,472,558,232	0	1,472,558,232	99.97	399,768
521822	Belanja Barang Persediaan barang dalam proses	5,206,554,000	4,583,274,000	4,583,229,451	0	4,583,229,451	100	44,549
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	0	90,000,000	89,950,000	0	89,950,000	99.94	50,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	91,647,495,000	77,926,462,000	77,643,326,768	1,022,000	77,642,304,768	99.64	284,157,232
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	36,148,946,000	33,154,512,000	33,179,600,264	140,496,351	33,039,103,913	99.65	115,408,087
522112	Belanja Langganan Telepon	258,000,000	196,110,000	189,574,309	0	189,574,309	96.67	6,535,691
522113	Belanja Langganan Air	61,200,000	67,200,000	65,531,200	0	65,531,200	97.52	1,668,800
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	2,154,266,000	1,680,504,000	1,652,654,363	0	1,652,654,363	98.34	27,849,637
522131	Belanja Jasa Konsultan	26,206,995,000	28,754,531,000	27,629,585,794	804,825,000	26,824,760,794	93.29	1,929,770,206
522141	Belanja Sewa	6,414,379,000	8,850,931,000	8,651,277,492	46,521,720	8,604,755,772	97.22	246,175,228
522151	Belanja Jasa Profesi	3,479,778,000	1,942,811,000	1,816,688,070	10,020,000	1,806,668,070	92.99	136,142,930
522191	Belanja Jasa Lainnya	28,865,549,000	29,940,324,000	28,226,850,030	18,374,000	28,208,476,030	94.22	1,731,847,970
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	103,589,113,000	104,586,923,000	101,411,761,522	1,020,237,071	100,391,524,451	95.99	4,195,398,549
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11,624,143,000	11,922,653,000	11,910,968,765	2,189,302	11,908,779,463	99.88	13,873,537
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	2,982,360,000	5,180,446,000	5,182,960,518	4,808,559	5,178,151,959	99.96	2,294,041
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13,809,835,000	15,246,293,000	15,144,098,979	0	15,144,098,979	99.33	102,194,021
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	157,086,000	197,483,000	197,435,250	0	197,435,250	99.98	47,750
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,759,140,000	1,503,298,000	1,503,288,072	0	1,503,288,072	100	9,928

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 04

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 18/09/25 12:50 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1_poc

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
523131	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	2,722,285,000	1,513,380,000	1,513,356,526	4,583,908	1,508,772,618	99.7	4,607,382
523132	Belanja Pemeliharaan Irigasi	40,040,000	1,361,182,000	1,360,927,378	0	1,360,927,378	99.98	254,622
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	570,379,000	585,309,000	584,858,965	0	584,858,965	99.92	450,035
523136	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	308,000,000	334,000,000	331,474,500	0	331,474,500	99.24	2,525,500
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	50,000,000	157,080,000	157,051,150	0	157,051,150	99.98	28,850
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	34,023,268,000	38,001,124,000	37,886,420,103	11,581,769	37,874,838,334	99.67	126,285,666
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	78,241,122,000	72,899,846,000	64,029,060,680	447,371,194	63,581,689,486	87.22	9,318,156,514
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,536,794,000	2,158,333,000	2,119,308,275	8,374,000	2,110,934,275	97.8	47,398,725
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	9,619,273,000	6,518,592,000	6,113,569,929	172,026,300	5,941,543,629	91.15	577,048,371
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	26,220,778,000	18,806,196,000	17,740,613,594	172,348,272	17,568,265,322	93.42	1,237,930,678
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	116,617,967,000	100,382,967,000	90,002,552,478	800,119,766	89,202,432,712	88.86	11,180,534,288
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	4,800,000,000	2,969,210,000	2,661,519,392	13,216,732	2,648,302,660	89.19	320,907,340
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	4,800,000,000	2,969,210,000	2,661,519,392	13,216,732	2,648,302,660	89.19	320,907,340
5251	Belanja Barang BLU							
525112	Belanja Barang	0	3,130,228,000	2,973,949,914	0	2,973,949,914	95.01	156,278,086
525113	Belanja Jasa	0	1,574,645,000	1,573,464,100	0	1,573,464,100	99.93	1,180,900
525114	Belanja Pemeliharaan	0	3,125,686,000	2,973,209,220	0	2,973,209,220	95.12	152,476,780
525115	Belanja Perjalanan	0	510,590,000	493,565,247	0	493,565,247	96.67	17,024,753
525118	Belanja Ketersediaan Layanan BLU	0	44,826,000	44,825,040	0	44,825,040	100	960
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	0	791,072,000	791,072,000	0	791,072,000	100	0
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	0	24,083,070,000	22,055,564,857	0	22,055,564,857	91.58	2,027,505,143
525126	Belanja Barang Persediaan Bahan Baku untuk Proses Produksi	0	1,078,641,000	1,078,431,250	0	1,078,431,250	99.98	209,750
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5251	0	34,338,758,000	31,984,081,628	0	31,984,081,628	93.14	2,354,676,372
5261	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda							
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada	143,476,830,000	127,570,716,000	127,523,001,460	0	127,523,001,460	99.96	47,714,540
526113	Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada	5,465,260,000	8,519,375,000	8,508,048,311	0	8,508,048,311	99.87	11,326,689
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada	120,275,020,000	110,567,003,000	110,425,221,110	7,187,820	110,418,033,290	99.87	148,969,710
526124	Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada	1,700,000,000	2,380,000,000	2,380,000,000	0	2,380,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5261	270,917,110,000	249,037,094,000	248,836,270,881	7,187,820	248,829,083,061	99.92	208,010,939
5263	Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada							
526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada	40,461,598,000	35,287,138,000	35,241,956,322	545,493,011	34,696,463,311	98.33	590,674,689
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5263	40,461,598,000	35,287,138,000	35,241,956,322	545,493,011	34,696,463,311	98.33	590,674,689
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	748,033,969,000	732,542,591,000	714,402,877,992	2,464,700,100	711,938,177,892	97.19	20604413108

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 04

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 18/09/25 12:50 PM
Halaman : 4
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1_poc

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
53	BELANJA MODAL							
5311	Belanja Modal Tanah							
531115	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	252,135,000	252,133,501	0	252,133,501	100	1,499
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5311	0	252,135,000	252,133,501	0	252,133,501	100	1,499
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32,387,245,000	27,325,369,000	27,306,446,430	14,569,271	27,291,877,159	99.88	33,491,841
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	32,387,245,000	27,325,369,000	27,306,446,430	14,569,271	27,291,877,159	99.88	33,491,841
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	261,072,428,000	250,204,989,000	36,902,035,350	17,114,928	36,884,920,422	14.74	213,320,068,578
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	4,991,506,000	5,544,748,000	5,529,303,717	68,735,898	5,460,567,819	98.48	84,180,181
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	266,063,934,000	255,749,737,000	42,431,339,067	85,850,826	42,345,488,241	16.56	213,404,248,759
5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan							
534111	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0	2,001,786,000	2,001,299,424	0	2,001,299,424	99.98	486,576
534121	Belanja Modal Irigasi	1,017,661,000	10,917,967,000	10,908,967,755	0	10,908,967,755	99.92	8,999,245
534131	Belanja Modal Jaringan	200,000,000	2,445,164,000	2,437,126,466	0	2,437,126,466	99.67	8,037,534
534135	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jaringan	0	80,947,000	80,946,550	0	80,946,550	100	450
534141	Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	150,400,000	8,163,119,000	8,204,528,567	222,128,513	7,982,400,054	97.79	180,718,946
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5341	1,368,061,000	23,608,983,000	23,632,868,762	222,128,513	23,410,740,249	99.16	198,242,751
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	100,000,000	94,580,000	94,580,000	0	94,580,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	100,000,000	94,580,000	94,580,000	0	94,580,000	100	0
5371	Belanja Modal BLU							
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	0	587,333,000	584,342,900	0	584,342,900	99.49	2,990,100
537115	Belanja Modal Lainnya - BLU	0	198,690,000	198,690,000	0	198,690,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5371	0	786,023,000	783,032,900	0	783,032,900	99.62	2,990,100
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	299,919,240,000	307,816,827,000	94,500,400,660	322,548,610	94,177,852,050	30.6	213638974950
	JUMLAH BELANJA	1,245,037,110,000	1,227,143,203,000	994,932,676,863	2,924,470,192	992,008,206,671	80.84	235,134,996,329

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

Tgl Data : 22/05/25 6:25 PM

Tgl Cetak : 18/09/25 12:50 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	992,008,206,671
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	117,016,527,359	0
3.0	424113	Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan TeKnologi	0	344,968,750
3.0	424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	0	1,017,159,500
3.0	424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	0	66,073,273,000
3.0	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	564,679,971
3.0	424919	Pendapatan Lain-lain BLU	0	23,702,944,699
3.0	424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	0	179,474,390
3.0	424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	0	491,473,383
3.0	424929	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya	0	420,000
3.0	425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	13,412,266,129
3.0	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	38,477,800
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	2,014,396,347
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	27,918,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	743,111,147
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	707,176,924
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	3,706,286,800
3.0	425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	0	34,500,000
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0	4,800,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	1,249,447,622
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	392,446,010
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,281,873,298
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	29,102,029
3.0	425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	1,451,560
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	61,965,358,000	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	883,949	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	4,774,433,080	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	1,483,438,206	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	784,210,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	4,322,801,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	613,214,647	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	3,356,405,510	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	7,975,680,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1,019,390,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	5,653,418,900	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	109,108	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

Tgl Data : 22/05/25 6:25 PM

Tgl Cetak : 18/09/25 12:50 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	301,029,970	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	79,982,574	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	208,253,720	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	313,288,920	0
3.0	511627	Belanja Tunjangan Lauk Pauk PPPK	56,176,000	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	928,844,000	0
3.0	511629	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PPPK	426,970,924	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	404,852,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	38,166,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	84,810,105,477	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	6,512,386,226	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	31,274,660,974	0
3.0	521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	23,816,775	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	545,559,855	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	75,343,268	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	3,241,708,400	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	9,346,214,031	0
3.0	521211	Belanja Bahan	23,682,503,539	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	11,663,300,805	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	8,757,160,251	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	124,721,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	71,497,589,085	0
3.0	521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku	1,472,558,232	0
3.0	521822	Belanja Barang Persediaan barang dalam proses	4,583,229,451	0
3.0	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	89,950,000	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	33,179,600,264	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	189,574,309	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	65,531,200	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,652,654,363	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	27,629,585,794	0
3.0	522141	Belanja Sewa	8,651,277,492	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	1,816,688,070	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	28,226,850,030	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11,910,968,765	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	5,182,960,518	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15,144,098,979	0
3.0	523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	197,435,250	0
3.0	523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,503,288,072	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

Tgl Data : 22/05/25 6:25 PM

Tgl Cetak : 18/09/25 12:50 PM

Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_kas_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523131	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1,513,356,526	0
3.0	523132	Belanja Pemeliharaan Irigasi	1,360,927,378	0
3.0	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	584,858,965	0
3.0	523136	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	331,474,500	0
3.0	523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	157,051,150	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	64,029,060,680	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,119,308,275	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6,113,569,929	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	17,740,613,594	0
3.0	524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	2,661,519,392	0
3.0	525112	Belanja Barang	2,973,949,914	0
3.0	525113	Belanja Jasa	1,573,464,100	0
3.0	525114	Belanja Pemeliharaan	2,973,209,220	0
3.0	525115	Belanja Perjalanan	493,565,247	0
3.0	525118	Belanja Ketersediaan Layanan BLU	44,825,040	0
3.0	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	791,072,000	0
3.0	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	22,055,564,857	0
3.0	525126	Belanja Barang Persediaan Bahan Baku untuk Proses Produksi - BLU	1,078,431,250	0
3.0	526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	127,523,001,460	0
3.0	526113	Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	8,508,048,311	0
3.0	526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	110,425,221,110	0
3.0	526124	Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	2,380,000,000	0
3.0	526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	35,241,956,322	0
3.0	531115	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	252,133,501	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27,306,446,430	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36,902,035,350	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	5,529,303,717	0
3.0	534111	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	2,001,299,424	0
3.0	534121	Belanja Modal Irigasi	10,908,967,755	0
3.0	534131	Belanja Modal Jaringan	2,437,126,466	0
3.0	534135	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jaringan	80,946,550	0
3.0	534141	Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	8,204,528,567	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	94,580,000	0
3.0	537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	584,342,900	0
3.0	537115	Belanja Modal Lainnya - BLU	198,690,000	0
3.1	424919	Pengembalian Pendapatan Lain-lain BLU	700,000	0
3.1	424929	Pengembalian Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya	420,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

Tgl Data : 22/05/25 6:25 PM

Tgl Cetak : 18/09/25 12:50 PM

Halaman : 4

lap_neraca_percobaan_kas_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	42,419,356
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	27,227
3.1	511121	Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	1,358,080
3.1	511122	Pengembalian Belanja Tunj. Anak PNS	0	189,454
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	1,850,000
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	68,695,300
3.1	511126	Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS	0	434,520
3.1	511129	Pengembalian Belanja Uang Makan PNS	0	5,155,500
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	4,515,400
3.1	511619	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	180
3.1	511628	Pengembalian Belanja Uang Makan PPPK	0	420,600
3.1	512211	Pengembalian Belanja Uang Lembur	0	6,379,150
3.1	512411	Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	0	5,630,148
3.1	512414	Pengembalian Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	0	146,567
3.1	521111	Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran	0	2,416,000
3.1	521113	Pengembalian Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0	28,955,000
3.1	521115	Pengembalian Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	171,000
3.1	521211	Pengembalian Belanja Bahan	0	14,371,711
3.1	521213	Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan	0	1,162,800
3.1	521219	Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	18,765,420
3.1	521811	Pengembalian Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	1,022,000
3.1	522111	Pengembalian Belanja Langganan Listrik	0	140,496,351
3.1	522131	Pengembalian Belanja Jasa Konsultan	0	804,825,000
3.1	522141	Pengembalian Belanja Sewa	0	46,521,720
3.1	522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	0	10,020,000
3.1	522191	Pengembalian Belanja Jasa Lainnya	0	18,374,000
3.1	523111	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	2,189,302
3.1	523119	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0	4,808,559
3.1	523131	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	0	4,583,908
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	447,371,194
3.1	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	8,374,000
3.1	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	172,026,300
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	172,348,272
3.1	524211	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0	13,216,732
3.1	526115	Pengembalian Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	7,187,820
3.1	526311	Pengembalian Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	545,493,011
3.1	532111	Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	14,569,271

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

Tgl Data : 22/05/25 6:25 PM

Tgl Cetak : 18/09/25 12:50 PM

Halaman : 5

lap_neraca_percobaan_kas_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	533111	Pengembalian Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	17,114,928
3.1	533121	Pengembalian Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	68,735,898
3.1	534141	Pengembalian Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	0	222,128,513
JUMLAH			1,111,950,324,222	1,111,950,324,222

Keterangan :

BELUM FINAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

Tgl Data : 22/05/25 6:25 PM

Tgl Cetak : 18/09/25 12:50 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111826	Kas Lainnya di BLU	9,684,074,100	0
0.0	111911	Kas dan Bank - BLU	68,221,487,743	0
0.0	113311	Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari Kas dan Bank BLU Yang Sudah Disahkan	5,000,000,000	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	84,000,000	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	5,521,882,227	0
0.0	115719	Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	166,243,450	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNB	0	84,000,000
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	824,320,347
0.0	116619	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	0	831,217
0.0	117111	Barang Konsumsi	10,324,037,170	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	106,495,137	0
0.0	117114	Suku Cadang	1,373,982,570	0
0.0	117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	12,297,178,010	0
0.0	117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	426,892,990	0
0.0	117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	1,025,355,500	0
0.0	117129	Persediaan Dalam Proses	3,753,169,438	0
0.0	117131	Bahan Baku	3,985,129,192	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	5,694,904,804	0
0.0	131111	Tanah	3,756,767,517,642	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	922,411,425,057	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	1,313,698,875,867	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	75,254,478,215	0
0.0	134112	Irigasi	421,255,626,270	0
0.0	134113	Jaringan	54,465,892,504	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	2,736,548,559	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	1,913,308,790	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	23,005,851,182	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	784,503,953,667
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	266,599,885,582
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	37,563,741,218
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	236,672,990,817
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	13,038,609,268
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	220,260,839
0.0	138311	Properti Investasi	151,245,930,000	0
0.0	138411	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	0	44,841,144,544
0.0	162151	Software	4,413,525,748	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	243,825,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

Tgl Data : 22/05/25 6:25 PM

Tgl Cetak : 18/09/25 12:50 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	162311	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	198,690,000	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	8,217,751,805	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	147,767,675,991	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	1,517,845,250	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	139,135,362,060
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	3,796,586,840
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	1,517,845,250
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	228,879,584
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	2,793,243,161
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	8,217,751,805
0.0	212193	Dana Pihak Ketiga BLU	0	9,684,074,100
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	134,081,644
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	959,241,092,143
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	24,643,253,666	0
0.0	313211	Transfer Keluar	114,587,635,177	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	118,391,745,799
0.0	391111	Ekuitas	0	5,406,458,171,217
0.0	391113	Koreksi Nilai Persediaan	0	1,617,942,116
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	614,458,132
0.0	391119	Koreksi Lainnya	0	359,365,993
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	849,047,246
0.0	391141	Setoran Surplus BLU	351,604,200	0
0.0	391151	Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0	154,864,732
3.0	424113	Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan TeKnologi	0	344,968,750
3.0	424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	0	1,014,659,500
3.0	424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	0	66,073,273,000
3.0	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	564,679,971
3.0	424919	Pendapatan Lain-lain BLU	0	23,868,488,149
3.0	424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	0	219,802,886
3.0	424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	0	493,973,383
3.0	425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	13,412,266,129
3.0	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	38,477,800
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	2,014,396,347
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	27,918,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	1,270,491,511
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	560,736,924

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

Tgl Data : 22/05/25 6:25 PM

Tgl Cetak : 18/09/25 12:50 PM

Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_akrual_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	3,706,286,800
3.0	425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	0	34,500,000
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0	4,800,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	1,045,898,254
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	217,889,770
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,843,226,159
3.0	491111	Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi	0	108,464,250
3.0	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	127,164,214,968
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	4,187,796,217
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	61,900,674,994	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	856,664	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	4,773,264,250	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	1,483,331,594	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	782,360,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	4,254,105,700	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	613,374,033	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	3,355,970,990	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	7,937,940,650	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	1,014,874,600	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	5,648,254,852	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	108,916	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	301,029,970	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	79,982,574	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	207,533,720	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	313,288,920	0
3.0	511627	Beban Tunjangan Lauk Pauk PPPK	56,176,000	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	925,475,760	0
3.0	511629	Beban Tunjangan Kompensasi Kerja PPPK	419,950,124	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	398,472,850	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	38,166,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	84,840,191,391	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	6,542,060,019	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	31,320,444,974	0
3.0	521112	Beban Pengadaan Bahan Makanan	23,816,775	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	516,604,855	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	75,343,268	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	3,246,877,400	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

Tgl Data : 22/05/25 6:25 PM

Tgl Cetak : 18/09/25 12:50 PM

Halaman : 4

lap_neraca_percobaan_akrual_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	8,868,626,596	0
3.0	521211	Beban Bahan	23,474,847,303	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	11,687,688,005	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	8,739,262,831	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	124,721,000	0
3.0	521253	Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	4,000,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	33,416,902,019	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	190,735,138	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	65,531,200	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,653,994,204	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	21,486,240,702	0
3.0	522141	Beban Sewa	8,634,755,772	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	1,806,668,070	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	28,855,932,077	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11,436,350,823	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	3,973,352,625	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15,101,711,519	0
3.0	523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,503,288,072	0
3.0	523131	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1,508,772,618	0
3.0	523132	Beban Pemeliharaan Irigasi	1,264,427,378	0
3.0	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	584,858,965	0
3.0	523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	157,051,150	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	63,576,206,166	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,110,934,275	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5,941,543,629	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	17,568,265,322	0
3.0	524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	1,657,699,699	0
3.0	525112	Beban Barang	2,882,144,977	0
3.0	525113	Beban Jasa	1,573,464,100	0
3.0	525114	Beban Pemeliharaan	2,973,209,220	0
3.0	525115	Beban Perjalanan	493,565,247	0
3.0	525118	Beban Ketersediaan Layanan BLU	44,825,040	0
3.0	525119	Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	791,072,000	0
3.0	526124	Beban Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	2,712,816,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	43,583,413,365	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	38,866,917,524	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	4,195,090,577	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	9,267,200,262	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

Tgl Data : 22/05/25 6:25 PM

Tgl Cetak : 18/09/25 12:50 PM

Halaman : 5

lap_neraca_percobaan_akrual_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	1,724,273,426	0
3.0	591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	50,575,306	0
3.0	591611	Beban Penyusutan Properti Investasi	6,208,936,900	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	713,746,205	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	4,877,449,425	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	73,683,919,851	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	141,513,153	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	887,096,897	0
3.0	593122	Beban Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	2,716,757,624	0
3.0	593123	Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	55,691,220,982	0
3.0	593124	Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	144,206,898,965	0
3.0	593127	Beban Persediaan Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	4,787,047,755	0
3.0	593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	124,500,876,517	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	17,172,591,461	0
3.0	593149	Beban persediaan lainnya	2,887,213,441	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	3,459,119,000	0
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	23,471,225	0
3.0	594619	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	831,217	0
3.0	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	117,702,000	0
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	85,391,101,888	0
3.0	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	236,443,284	0
3.0	596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	71,961,000	0
JUMLAH			8,285,761,458,089	8,285,761,458,089

Keterangan :

BELUM FINAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT ESELON I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

Tgl Data : 22/05/25 6:25 PM

Tgl Cetak : 18/09/25 12:49 PM

Halaman : 1

lap_lpe_es1_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	5,406,458,171,217	5,356,986,583,499	49,471,587,718	0.92
SURPLUS/DEFISIT-LO	(885,182,156,067)	(1,055,181,861,785)	169,999,705,718	(16.11)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	2,746,630,973	23,130,854,646	(20,384,223,673)	(88.13)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	1,617,942,116	5,071,380,177	(3,453,438,061)	(68.1)
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	154,864,732	177,286,850	(22,422,118)	(12.65)
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	614,458,132	15,241,336,951	(14,626,878,819)	(95.97)
LAIN-LAIN	359,365,993	2,640,850,668	(2,281,484,675)	(86.39)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	938,899,392,145	1,081,522,594,857	(142,623,202,712)	(13.19)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	56,463,867,051	49,471,587,718	6,992,279,333	14.13
EKUITAS AKHIR	5,462,922,038,268	5,406,458,171,217	56,463,867,051	1.04

Keterangan :

BELUM FINAL

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT ESELON I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 ESELON I : (04) DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

Tgl Data : 22/05/25 6:25 PM

Tgl Cetak : 18/09/25 12:49 PM

Halaman : 1

lap_lo_es1_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Cukai	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	-
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	-
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	-
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	-
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	-
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	-
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	20,030,179,618	37,819,551,179	(17,789,371,561)	-
Pendapatan Badan Layanan Umum	92,579,845,639	0	92,579,845,639	-
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	112,610,025,257	37,819,551,179	74,790,474,078	-
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	-
Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan	112,610,025,257	37,819,551,179	74,790,474,078	-
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	-
Beban Pegawai	185,887,444,571	165,366,756,996	20,520,687,575	-
Beban Persediaan	93,743,724,753	82,586,510,180	11,157,214,573	-
Beban Barang dan Jasa	189,602,200,306	210,339,309,069	(20,737,108,763)	-
Beban Pemeliharaan	39,531,632,420	35,743,047,066	3,788,585,354	-
Beban Perjalanan Dinas	91,348,214,338	131,421,393,071	(40,073,178,733)	-
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	334,615,617,843	379,368,872,466	(44,753,254,623)	-

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT ESELON I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ESELON I : (04) DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

Tgl Data : 22/05/25 6:25 PM

Tgl Cetak : 18/09/25 12:49 PM

Halaman : 2

lap_lo_es1_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	-
Beban Subsidi	0	0	0	-
Beban Hibah	0	0	0	-
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	109,487,602,990	110,688,485,039	(1,200,882,049)	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	24,302,442	396,441,185	(372,138,743)	-
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	-
Beban Lain-Lain	0	0	0	-
JUMLAH BEBAN	1,044,240,739,663	1,115,910,815,072	(71,670,075,409)	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(931,630,714,406)	(1,078,091,263,893)	146,460,549,487	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	-
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	(83,310,309,741)	(86,336,615,439)	3,026,305,698	-
Pendapatan Pelepasan Aset	2,080,792,147	1,594,769,900	486,022,247	-
Beban Pelepasan Aset	85,391,101,888	87,931,385,339	(2,540,283,451)	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	129,758,868,080	109,246,017,547	20,512,850,533	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	133,526,391,364	111,600,555,696	21,925,835,668	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	3,767,523,284	2,354,538,149	1,412,985,135	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	46,448,558,339	22,909,402,108	23,539,156,231	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(885,182,156,067)	(1,055,181,861,785)	169,999,705,718	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
Beban Luar Biasa	0	0	0	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT - LO	(885,182,156,067)	(1,055,181,861,785)	169,999,705,718	-

Keterangan :

BELUM FINAL